MANAJEMEN KURIKULUM

Dr. Khusnul Wardan, M. Pd.
Dr. Anik Puji Rahayu, M. Kep.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

SANGATTA

KUTAI TIMUR – KALIMANTAN TIMUR

https://staiskutim.ac.id

MANAJEMEN
KURIKULUM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN KURIKULUM

Dr. Khusnul Wardan, M.Pd.
Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep.

literasi nusantara

MANAJEMEN KURIKULUM

Penulis : Dr. Khusnul Wardan, M.Pd.
Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep.

ISBN : 978-623-329-122-4

Copyright © April 2021
Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: x + 276

Penata isi : Rosyiful Aqli
Desainer sampul : Ahmad Ariyanto
Editor : Nur Azizah Rahma

Cetakan I, April 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**
Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi
Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163
Telp : +6282233992061
Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan kepada kita segala nikmat sehingga kita masih tetap berada dalam Agama Islam yang dimuliakan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti Sunnahnya. Ditulisnya buku ini untuk membantu para pembaca mendapatkan sumber belajar tentang manajemen kurikulum. Harapannya, buku ini dapat diakses semua pihak dan dijadikan referensi dalam perkuliahan terkait manajemen kurikulum.

Buku ini masih bersifat global dan mengungkap berbagai persoalan seputar konsep manajemen kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, ruang lingkup manajemen kurikulum lembaga pendidikan, masalah-masalah dan kendala dalam implementasi kurikulum 2013, tahapan manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan, analisis dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan pada tingkat satuan pendidikan, evaluasi manajemen kurikulum pada satuan pendidikan, tugas pokok dan fungsi manajer dan personil satuan pendidikan dalam manajemen kurikulum, inovasi dalam implementasi manajemen kurikulum, peranan dan aplikasi IT dalam manajemen kurikulum, model dan organisasi pengembangan kurikulum, KKNI dan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang diperkuat dengan berbagai sumber bacaan.

Tak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ajar ini. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang

konstruktif untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalam

Sangatta, Maret 2021

Penulis

Daftar Isi

Prakata — v
Daftar Isi — vii

1. **Konsep Manajemen Kurikulum — 1**
   Pengertian — 1
   Prinsip — 7
   Fungsi — 8
   Komponen Kurikulum — 11
   Karakteristik — 13

2. **Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia — 19**
   Kurikulum Rencana Pelajaran (1947—1968) — 20
   Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975—1994) — 23
   Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP (2004/2006) — 29
   Kurikulum 2013 — 35

3. **Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan — 45**
   Penyusunan Jadwal Pelajaran — 45
   Penyusunan Kalender Pendidikan — 51
   Pembagian Tugas Guru — 54
   Pengelompokan Siswa — 59
   Penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP) — 68

4. **Implementasi Kurikulum 2013 — 75**
   Landasan Kurikulum 2013 — 75
   Kurikulum 2013 dan Kesiapan Guru dalam Mengajar — 75

Berbagai Masalah dalam Penerapan Kurikulum 2013 beserta Solusinya — 77
Tugas Pokok dan Fungsi Guru — 81
Permasalahan Kurikulum di Indonesia — 85

5. **Tahapan Manajemen Kurikulum — 89**
Perencanaan — 89
Pengorganisasian — 97
Implementasi — 106
Evaluasi — 120

6. **Analisis dan Identifikasi Sumber Daya yang Dibutuhkan Satuan Pendidikan — 127**
Sumber Daya Manusia — 127
Sumber Daya Fisik (Sarana Prasarana) — 149
Sumber Daya Keuangan — 152

7. **Evaluasi Manajemen Kurikulum — 159**
Pengertian — 159
Tujuan — 163
Proses — 165
Fungsi — 170

8. **Tugas Pokok dan Fungsi Manajer serta Personil Satuan Pendidikan dalam Manajemen Kurikulum — 177**
Manajemen Kurikulum — 177
Tugas Pokok dan Fungsi Manajer serta Personilnya — 184

9. **Inovasi dalam Implementasi Manajemen Kurikulum — 193**
Inovasi Manajemen Kurikulum — 193
Implementasi Manajemen Kurikulum — 197

10. **Peranan dan Implementasi Teknologi Informasi dalam Manajemen Kurikulum — 201**
Peranan Teknologi Informasi — 201
Implementasi Teknologi Informasi — 202

11. **Model dan Organisasi Pengembangan Kurikulum — 209**
Model Pengembangan Kurikulum — 209
Organisasi Pengembangan Kurikulum — 214

12. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) — 225**
Peran KKNI — 227
Jalur Ilmu Terapan dan Ilmu Akademik — 231
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) — 240

13. **Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar — 253**
Kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar — 253
Mekanisme Pelaksanaan Kampus Merdeka di Indonesia beserta Permasalahannya — 258

Daftar Pustaka — 265
Tentang Penulis — 273

PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA

I
KONSEP MANAJEMEN KURIKULUM

Pengertian

Pendapat sejumlah pakar pendidikan dan kurikulum dapat dijadikan dasar pemahaman yang lebih luas tentang manajemen kurikulum. Salah satu pendapat menjelaskan bahwa manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Menurut Wahyudin (2014: 18—19) tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui empat tahap: a) perencanaan; b) pengorganisasian; c) pelaksanaan; dan d) pengendalian.

Muara proses dan aktivitas manajemen adalah mencapai efektivitas. Oleh karena itu, fungsi manajemen yang dilakukan melalui sejumlah proses dan aktivitas dalam organisasi adalah mempertemukan efektivitas individu manajer dan pekerja, efektivitas kelompok (unit tugas), dan efektivitas organisasi (totalitas sistem) yang bermuara kepada pencapaian akhir organisasi. Setidaknya tujuan yang dicapai adalah produksi berkualitas tinggi, pelayanan yang baik, dan kepuasan kerja pada pegawai.

Maka, tujuan individu, kelompok, dan organisasi diharapkan benar-benar menyatu dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, berbagai dimensi yang mendorong pencapaian efektivitas individu, kelompok, dan organisasi saling terkait sebagai satu-kesatuan

yang bersifat sistemik. Apalagi konsep organisasi sebagai sistem sosial telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan hidup organisasi dalam berbagai jenis dan aktivitasnya untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut Richard (2010: 5),

> *"Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources—Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi."*

Kegiatan manajemen selalu melibatkan alokasi dan pengendalian uang dan sumber daya manusia serta fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ilmu manajemen memiliki pendekatan sistemik yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan membangun teori manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah proses universal yang berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam dengan berbagai persoalan kehidupan.

Maka dari itu, apa peranan manajer yang sebenarnya? Meminjam pendapat Henry Mintzberg's dalam Richard dan Marcic (2009: 22), ada tiga peran utama manajer sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

1. Peran interpersonal mencakup hasil dari kedudukannya, yaitu: (a) sebagai tokoh dan pimpinan unit kerja (bagian, departemen, atau seksi), maka seorang manajer secara rutin mengerjakan kewajibannya; (b) sebagai pemimpin, maka seorang manajer wajib menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan kinerja pegawai, mengurangi konflik, memberikan umpan balik, dan mendorong pertumbuhan individu; (c) sebagai juru bicara bagi atasan atau bawahan, maka manajer berinteraksi dengan orang lain-teman sejawat dalam bagian lain, staf ahli atau pegawai bidang lain dan penyedia serta klien. Dalam peran ini, para manajer diharuskan membangun hubungan yang baik di dalam maupun di luar organisasi.
2. Peran informasional, sebagai hasil dari hubungan di dalam dan di luar organisasi, maka manajer biasanya memiliki lebih banyak informasi daripada bawahan atau anggota stafnya.

Dalam hal ini manajer harus menjalankan tiga peran berikut: (a) sebagai pemantau. Artinya, manajer memantau lingkungan untuk menentukan apa yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, manajer mengumpulkan informasi secara langsung dengan menanyakan masalah dan secara tidak langsung menerima informasi; (b) sebagai penyebar informasi. Dengan kata lain, manajer memberikan beberapa informasi kepada bawahan yang diperlukan mereka; dan (c) sebagai juru bicara, manajer selalu berbicara kepada unit kerjanya dan orang-orang luar yang bekerja dalam unit kerjanya. Selain itu, terkadang ia juga memberikan informasi kepada atasan dan bawahannya.

3. Peran pengambilan keputusan, artinya para manajer membuat pilihan secara pribadi, bersama, atau memengaruhi pilihan yang lain. Manajer harus melakukan hal-hal berikut: (a) sebagai entrepreneur bertugas membagi dan memunculkan gagasan baru atau metode yang dapat meningkatkan kualitas kinerja pada unit operasional; (b) mengatasi kehancuran, manajer menangani masalah kerusakan dengan membuat daftar masalah, kegagalan peralatan, menyerang, merusakkan kontrak, dan perilaku lain dari lingkungan kerja yang mengurangi produktivitas kerja; (c) pengalokasian sumber daya, manajer menentukan seseorang dalam unit kerja yang mengusahakan sumber daya, uang, fasilitas, peralatan, dan akses kepada manajer; dan (d) negosiator, manajer harus menghabiskan waktu untuk bernegosiasi, sebab hanya dia yang memiliki informasi dan kewenangan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut, termasuk bernegosiasi hal kontrak dengan penyedia, pemilik sumber daya di luar organisasi, dan kesepakatan dengan organisasi tenaga kerja.

Keberadaan satu organisasi sebagaimana berbagai departemen pada satu pemerintahan khususnya departemen pendidikan dan kebudayaan, sekolah, akademi, universitas, dan kewenangan lain dalam bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang dikelola para ahli yang disebut manajer. Dalam hal ini Everard dkk (2004: 4) menyebutkan bahwa para manajer akan melakukan: (1) pengintegrasian sumber daya dalam mencapai sasaran secara efektif, (2) menjadi agen atau pelopor perubahan yang efektif, dan (3) memelihara dan mengembangkan sumber dayanya. Dengan kata lain, manajemen juga disebut tugas-tugas.

Manajemen adalah disiplin ilmu, tetapi manajemen juga merupakan orang-orang yang bekerja. Setiap pencapaian manajemen adalah

prestasi manajer dan setiap kegagalan adalah kegagalan manajer. Dengan demikian, organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Maka, manajemen diartikan sebagai usaha menggerakkan seseorang yang ada dalam organisasi untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan.

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya 'pelari' dan *curere* yang berarti 'tempat berpacu'. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti 'berlari' (*to run*). Kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* hingga *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan (Zainal Arifin, 2011: 2)

Pengertian kurikulum juga tertuang dalam Undang-Undang No. 20 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

> *"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu."*

Ali Mudlofir (2011: 3) berpendapat bahwa kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yakni sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik (*course of studies*), sebagai pengalaman belajar (*learning experience*), dan sebagai rencana program belajar (*learning plan*). Disimpulkan bahwa kurikulum merupakan segala bentuk kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang dituangkan dalam rencana-rencana, pengorganisasian materi, maupun metode yang digunakan dalam penyampaian materi serta sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih singkat, kurikulum dapat diartikan sebagai rencana, pengaturan, cara, maupun pedoman. Menurut Soemiarti Patmonodewo (2003: 54), kurikulum adalah perencanaan pengalaman belajar secara tertulis. Kurikulum akan menghasilkan proses yang nantinya akan terjadi di sekolah. Rancangan tersebut merupakan silabus yang berupa daftar judul pelajaran dan urutannya akan tersusun secara runtut sehingga merupakan program pembelajaran. Zais (1976: 7) mendefinisikan kurikulum sebagai program mata pelajaran seperti halnya bahasa Inggris, aljabar, sejarah, ekonomi, dan lainnya. Dengan

literasi nusantara

kata lain, kurikulum mencakup daftar atau judul mata pelajaran yang disampaikan oleh sekolah. Pandangan lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang direncanakan sekolah. Belakangan ini, definisi kurikulum telah berubah dari isi mata pelajaran dan daftar mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan kepada pelajar di bawah pengawasan dan pengaturan sekolah.

Ornstein dan Hunkins (1978: 6) mengajukan definisi kurikulum yang dikaitkan dengan pengalaman pelajar. Tegasnya, kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru-guru. Dengan demikian, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan materi serta proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Hamalik, 1995: 19). Tujuan yang hendak dicapai harus teruraikan dalam program yang termuat dalam kurikulum, bahkan program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran.

literasi nusantara

Manajemen kurikulum sebagai sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012: 3). Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana yang dikutip Nur Setyaningsih (2013: 28) mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai proses atau usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan menitikberaktkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam proses pendidikan perlu diimplementasikannya manajemen kurikulum karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi akan berjalan secara efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum.

Manajemen kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan tanpa landasan yang

kokoh dan kuat (Ornstein dan Hunkins: 190). Salah satu landasan memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru atau mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

Bidang kurikulum dan pengajaran merupakan salah satu bagian manajemen operasional pendidikan di sekolah secara mikro. Manajemen pendidikan di sekolah menjadi faktor signifikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi keseluruhan kegiatan pendidikan serta pembinaan siswa di sekolah. Pencapaian tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikulum, dan tujuan pembelajaran, atau standar kompetensi/kompetensi inti menjadi tanggung jawab manajemen pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif. Dengan memadukan seluruh kekuatan sumber daya organisasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka berbagai kegiatan dilakukan dengan bekerja sama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan begitu, seluruh harapan yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dicapai jika sumber daya manusia, para manajer, pimpinan, staf, dan pegawai yang bekerja sama mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi dalam melayani *stakeholders* di masyarakat.

literasi nusantara

Pendapat lain diungkapkan oleh Rusman (2009: 3) yang menegaskan bahwa manajemen kurikulum sebagai sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu dirancang, diimplementasikan (dilaksanakan), dan dikendalikan (dievaluasi dan disempurnakan) oleh siapa, kapan, dan dalam lingkup mana. Menurut Teguh Triwiyanto (2015: 25), manajemen kurikulum juga berkaitan dengan kebijakan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum.

Secara umum, dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (*centralized curriculum development management*

atau *top down curriculum development*) dengan manajemen pengembangan kurikulum tersebar (*decentralized curriculum development management* atau *bottom up curriculum development*). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan sumber daya kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

Prinsip

Manajemen merupakan proses atau kegiatan manajerial yang ada pada setiap organisasi. Setiap manajer atau pengelola organisasi pendidikan dipastikan melakukan penataan terhadap semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, faktor kurikulum sebagai isi dan proses aktivitas kurikulum menjadi bagian integral yang harus dikelola oleh para manajer di setiap lembaga pendidikan. Pada satuan tingkat pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan menghubungkan kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.

literasi

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pengelola organisasi sebagaimana yang diuraikan oleh Wahyudin (2014: 20—21).

1. Produktivitas
   Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi
   Pelaksanaan manajemen kurikulum harus didasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif
   Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama positif dari berbagai pihak yang terlibat.

4. Efektivitas dan efisiensi
   Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum.
5. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Fungsi

Manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi berikut.

1. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana.
2. Untuk meningkatkan kesamaan atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar mereka dapat mencapai hasil maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan melalui intrakulikuler, ekstrakulikuler, dan kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran antara siswa dengan lingkungannya.
4. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.
5. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar.

Pendapat lain mengatakan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik sebagai berikut.

1. Fungsi penyesuaian (*The adjustive or adaptive function*)
   Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Tentu lingkungan ini selalu mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
2. Fungsi integrasi (*The integrating function*)
   Kurikulum harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Pada dasarnya, siswa merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan

literasi nusantara

berintegrasi dengan masyarakatnya.

3. Fungsi diferensiasi (*The differentiating function*)
   Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan kepada setiap siswa sebab mereka memiliki perbedaan dari aspek fisik maupun psikis. Oleh karena itu, setiap siswa harus mendapatkan pelayanan dan penghargaan dengan baik.
4. Fungsi persiapan (*The propaedeutic function*)
   Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa agar dapat hidup dalam masyarakat seandainya ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
5. Fungsi pemilihan (*The selective function*)
   Kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti siswa diberikan kesempatan untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Maka, untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut diperlukan kurikulum yang bersifat luas dan fleksibel.
6. Fungsi diagnostik (*The diagnostic function*)
   Kurikulum harus dapat membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) serta kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa telah mampu memahami kekuatan dan kelemahannya, maka siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

literasi nusantara

Adapun H. Siagian (1977) mengungkapkan fungsi manajemen menurut pandangan G.R. Terry sebagai berikut.

Pertama, perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Arti penting perencanaan adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Hani Handoko (2009) mengemukakan sembilan manfaat perencanaan sebagai berikut.

1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama.
3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran.
4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat.
5. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi.
6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi.
7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami.
8. Meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.
9. Menghemat waktu, usaha, dan dana.

Kedua, pengorganisasian (*organizing*). George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa,

> *"Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu."*

Dengan kata lain, pengorganisasian merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Dalam hal ini, setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.

Ketiga, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama sebab lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan. Maka, fungsi *actuating* merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemberian motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Seseorang atau karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:
1. yakin mampu mengerjakan;
2. yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya;
3. tidak sedang dibebani oleh permasalahan pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak;

literasi

4. tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan; dan
5. hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Keempat, pengawasan (*controlling*). Semua fungsi tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan. Agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Tanpa didukung proses manajemen yang baik, maka tujuan sekolah tidak akan tercapai. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan, dan pemberian motivasi bagi seluruh personil sekolah agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan

Komponen Kurikulum

Kurikulum merupakan sistem yang memiliki komponen-komponen berikut.

1. Komponen tujuan

   Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat, bahkan rumusan tujuan mendeskripsikan cita-cita masyarakat. Contohnya masyarakat yang menganut filsafat dan nilai-nilai Pancasila, maka tujuan yang diharapkan oleh kurikulum adalah membentuk masyarakat pancasilais. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah dan tujuan yang lebih sempit, seperti mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.

   Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat dari tujuan umum hingga tujuan khusus sebagaimana berikut.

   a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

      Tujuan pendidikan nasional ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai rumusan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal.

      Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai pandangan hidup bangsa

literasi nusantara

yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, tepatnya pada UU No. 20 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Institusional (TI)
Tujuan institusional harus dicapai setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di lembaga tertentu. Tujuan institusional ini digunakan untuk mencapai rumusan dalam bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang pendidikan, seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

c. Tujuan Kurikuler (TK)
Tujuan kurikuler ini harus dicapai setiap bidang studi. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah menyelesaikan bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler pada dasarnya untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Contoh tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pembelajaran IPS di SLTP, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum yang berpotensi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada setiap satuan pendidikan.

d. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari materi bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses pembelajaran, guru bertugas menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai setiap siswa. Menurut Bloom dalam *Taxonomy of Educational Objectives* yang terbit pada 1965, bentuk perilaku

literasi nusantara

sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga domain (bagian), yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Komponen isi/materi pembelajaran
   Komponen isi kurikulum menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki anak didik dalam proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tertuang dalam setiap materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa.
3. Komponen metode
   Komponen metode berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Dalam posisi ini, guru hendaknya tidak hanya menerapkan satu metode, tetapi bermacam-macam metode agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian, rencana yang telah disusun dapat diterapkan secara optimal.
4. Komponen evaluasi
   Melalui evaluasi kurikulum, kita dapat menentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan: apakah kurikulum dapat dipertahankan atau tidak? atau bagian-bagian mana yang harus disempurnakan? Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven (1967) adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan formatif.

literasi nusantara

Karakteristik

Karakteristik manajemen kurikulum terbatas pada implementasi kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum.

1. Karakteristik perencanaan kurikulum

   Karakteristik perencanaan kurikulum ialah

   a. Pengertian perencanaan kurikulum
   b. Fungsi perencanaan kurikulum
   c. Model perencanaan kurikulum
   d. Desain kurikulum.

   Secara lebih rinci, karakteristik perencanaan kurikulum menurut Wahyudin (2014: 22─23) adalah

   a. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas.
   b. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif.
   c. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasi.
   d. Tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat.
   e. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret.
   f. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal.
   g. Dengan keahlian profesional mereka, pendidikan berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa.
   h. Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan bersama-sama.
   i. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada jenjang dan tingkatan sekolah.
   j. Program sekolah harus dirancang untuk mengoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan.
   k. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum.
   l. Harus diadakan evaluasi secara kontinu.
   m. Berbagai jenjang sekolah, dari TK hingga perguruan tinggi hendaknya merespons dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa.

   Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perencanaan kurikulum perlu memperhatikan perencanaan kurikulum, baik dalam kerangka penyusunan kurikulum yang benar-benar baru (perumusan awal) maupun dalam rangka pengembangan kurikulum agar sasaran perencanaan kurikulum

literasi nusantara

memenuhi harapan *stakeholders* pendidikan dan pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

2. Karakteristik pengorganisasian kurikulum

   Terdapat beberapa bentuk organisasi kurikulum yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri, yakni

   a. Kurikulum mata pelajaran, memiliki ciri-ciri: 1) terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah; 2) tidak berdasarkan kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa; dan 3) bentuk kurikulum yang tidak dipertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang.
   b. Kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Ciri-cirinya adalah: 1) berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya; 2) adanya usaha yang mengorelasikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari; dan 3) metode penyampaian menggunakan metode korelasi.
   c. Kurikulum bidang studi, memiliki ciri-ciri: 1) kurikulum terdiri atas bidang pengajaran; 2) sistem penyampaian bersifat terpadu; dan 3) minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum.
   d. Kurikulum integrasi, memiliki ciri-ciri: 1) berdasarkan psikologi belajar; 2) berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan siswa; 3) sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit; dan 4) peran guru sama aktifnya dengan peran siswa.
   e. Kurikulum inti, memiliki ciri-ciri pokok dan umum. Ciri pokoknya adalah mata pelajaran berisi pengalaman-pengalaman penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Sementara ciri-ciri umumnya adalah: 1) perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif; 2) pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas dan komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya; 3) guru dan siswa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik; dan 4) pengalaman belajar bersifat fungsional serta melibatkan banyak kegiatan dan tanggung jawab terhadap para siswa (Wahyudin, 2014: 23—24)

literasi nusantara

Kegiatan manajemen kurikulum berkaitan dengan tugas guru dan proses pembelajaran.

1. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, meliputi
   a. Pembagian tugas membelajarkan yang biasanya dilakukan dalam rapat guru pada awal tahun pembelajaran atau menjelang awal semester baru.
   b. Pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan pramuka, koperasi, unit kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, dan lain-lain.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi
   a. Penyusunan jadwal pembelajaran
      Jadwal pembelajaran merupakan penjabaran dari seluruh program pembelajaran di sekolah. Biasanya, jadwal pembelajaran dijadikan pedoman bagi guru: kapan dan di kelas mana saja ia harus mengajar.
   b. Penyusunan program pembelajaran
      Kegiatan penyusunan program pembelajaran ini meliputi: (1) menghitung jumlah pokok bahasan dan subpokok bahasan yang harus disampaikan dalam jangka waktu tertentu (semester atau caturwulan); (2) menghitung jumlah jam pelajaran yang tersedia menurut kurikulum yang berlaku; (3) menghitung jumlah jam yang efektif pada semester atau caturwulan berdasarkan kalender akademik yang berlaku; (4) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu jangka waktu tertentu (satu semester atau caturwulan).
   c. Pengisian daftar kemajuan kelas yakni menggambarkan kemajuan kelas tentang penguasaan materi pelajaran.
   d. Kegiatan mengelola kelas
      Aktivitas ini adalah upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan menyangkut strategi pembelajaran, pemanfaatan media, tempat duduk, dan lain-lain.
   e. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar
      Evaluasi hasil belajar berguna untuk mendapatkan umpan balik bagi guru tentang tercapainya tujuan pembelajaran.

literasi nusantara

f. Laporan hasil pembelajaran
   Hasil belajar yang diperoleh siswa harus dilaporkan kepada orang tua atau wali murid. Laporan hasil belajar ini disebut rapor.
g. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan
   Kegiatan bimbingan dan penyuluhan ditujukan bagi semua peserta didik di sekolah tanpa terkecuali, baik untuk siswa yang bermasalah maupun yang berprestasi.

literasi
nusantara

literasi
nusantara

2
SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

KURIKULUM merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum diperkirakan dapat meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Namun, kurikulum perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman.

literasi nusantara

Menurut Sudjana (1993: 37), perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum berikut.

1. Perubahan tujuan yang didasarkan pada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa.
2. Perubahan isi dan struktur yakni meninjau mata pelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk isi dari setiap mata pelajaran.
3. Perubahan strategi kurikulum menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, serta sistem penilaian hasil belajar.
4. Perubahan sarana kurikulum terkait dengan ketenagaan, baik dari segi kualitas dan kuantitas serta sarana material berupa perlengkapan sekolah, seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga, dan lain-lain.
5. Perubahan sistem evaluasi kurikulum menyangkut metode atau cara yang paling tepat untuk mengukur atau menilai sejauh mana

kurikulum berjalan efektif dan efisien, relevan, dan produktivitas terhadap program pembelajaran sebagai sistem kurikulum.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013

Kurikulum Rencana Pelajaran (1947—1968)

Saat pra-kemerdekaan, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik. Dalam hal ini, ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang, yakni sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren dan sistem pendidikan Belanda yang bersifat diskriminatif. Susunan sekolah zaman kolonial dapat digambarkan melalui uraian berikut (Sanjaya, 2007: 207).

1. Bagi anak-anak pribumi golongan non-priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah di "Sekolah Desa" selama 3 tahun.
2. Bagi orang timur asing disediakan sekolah seperti "Sekolah Cina" yang masa belajarnya 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina dan "Hollandch Chinese School (HCS)" berbahasa Belanda selama 7 tahun.
3. Bagi orang Belanda disediakan sekolah rendah hingga perguruan tinggi, yaitu "Eropese Legere School" selama 7 tahun, sekolah lanjutan "HBS" dengan masa belajar 3 dan 5 tahun, "Lyceum" selama 6 tahun, "Maddelbare Meisjeschool" selama 5 tahun, "Recht Hoge School" selama 5 tahun, "Sekolah Kedokteran Tinggi" selama 8,5 tahun, dan "Sekolah Kedokteran Gigi" selama 5 tahun.

Tiga tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1947, pemerintah membuat kurikulum "Rencana Pelajaran" yang bertahan hingga tahun 1968 ketika pemerintahan beralih ke masa orde baru.

Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum ini lebih populer disebut dalam bahasa belanda *leer plan* yang artinya rencana pelajaran daripada *curriculum* dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikannya lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai *development conformism* lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia

literasi nusantara

Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta disesuaikan agar sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Rencana Pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada 1950. Bentuk kurikulumnya hanya memuat dua hal pokok, yakni (1) daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; dan (2) garis-garis besar program pembelajaran (GBPP). Kurikulum ini mengurangi pendidikan pikiran (kognitif) dan lebih menekankan pendidikan watak atau perilaku (*value* dan *attitude*) yang meliputi: (1) kesadaran bernegara dan bermasyarakat; (2) materi pelajaran yang dikaitkan dengan kejadian sehari-hari; dan (3) perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

Rencana Pelajaran Terurai 1952

Ciri-ciri kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa itu juga dibentuk "Kelas Masyarakat" yakni sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas ini mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak-anak yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP dapat langsung terjun ke dunia kerja.

Mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1952 untuk sekolah rakyat (SD) menurut Rencana Pelajaran 1947 ialah: (1) bahasa Indonesia, (2) bahasa daerah, (3) berhitung, (4) ilmu alam, (5) ilmu hayat, (6) ilmu bumi, (7) sejarah, (8) menggambar, (9) menulis, (10) seni suara, (11) pekerjaan tangan, (12) pekerjaan keputrian, (13) gerak badan, (14) kebersihan dan kesehatan, (15) didik budi pekerti, dan (16) pendidikan agama.

Kurikulum Rencana Pendidikan 1964

Pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah menginginkan rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum ini juga menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004) yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik,

keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Saat itu, cara belajar yang diterapkan menggunakan metode gotong royong terpimpin. Selain itu, pemerintah juga menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida. Artinya, pada hari itu, siswa diberi kesempatan untuk berlatih di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan sesuai minat siswa.

Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia yang pancasilais dan sosialis dengan sifat-sifat sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS No. II tahun 1960. Kurikulum ini bersifat *separate subject curriculum* yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana), yakni (1) pengembangan moral yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama atau budi pekerti, (2) perkembangan kecerdasan terdiri dari mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamiah, (3) pengembangan emosional atau artistik terdiri dari mata pelajaran pendidikan kesenian, (4) pengembangan keprigelan atau keterampilan terdiri dari mata pelajaran keterampilan, dan (5) pengembangan jasmani terdiri dari mata pelajaran pendidikan jasmani atau kesehatan.

Kurikulum 1968

Struktur kurikulum 1968 ini mengalami perubahan yakni dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan kurikulum 1968 adalah agar pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, serta keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran yang meliputi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.

Kurikulum 1968 disebut kurikulum bulat karena hanya memuat mata pelajaran pokok yang bersifat teoretis dan tidak dikaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1968 bersifat *correlated subject curriculum,* artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini diklasifkasikan pada tiga

kelompok besar, yakni 1) pembinaan pancasila memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olah raga; 2) pengetahuan dasar melingkup mata pelajaran berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga; dan 3) kecakapan khusus mencakup mata pelajaran pendidikan kejuruan.

Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975—1994)

Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model-model lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perenalisme dan esensialisme, serta berorientasi pada masa lalu.

Menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Kurikulum subjek akademik tidak hanya menekankan materi yang disampaikan, tetapi dalam perkembangannya juga memperhatikan proses belajar yang dilakukan peserta didik.

Kurikulum 1975

Latar belakang ditetapkannya Kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Sjarif Thajeb adalah:

1. Selama Pelita I yang dimulai pada 1969, banyak memunculkan gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi "Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan."
3. Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional.
4. Adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
5. Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang sedang berlaku.

6. Diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip berikut.

1. Berorientasi pada tujuan
   Pemerintah merumuskan beberapa tujuan yang harus dikuasai siswa atau disebut hierarki tujuan pendidikan meliputi tujuan pendidikan nasional, institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan khusus.
2. Menganut pendekatan integratif
   Artinya, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).
5. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus responss (rangsang-jawab) dan latihan (drill). Pendekatan pembelajaran menggunakan teori Behaviorisme yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar yakni sekolah dan guru.

Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur berikut:

literasi nusantara

1. Tujuan institusional
   Tujuan ini adalah target yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya. Tujuan institusional ini diberlakukan di SD, SMP, hingga SMA.
2. Struktur program kurikulum
   Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah.
3. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)
   GBPP memuat hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yakni
   a. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran selama masa pendidikan.
   b. Tujuan instruksional umum harus dicapai dalam setiap satuan pelajaran, baik dalam satu semester maupun satu tahun.
   c. Pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi siswa agar mencapai tujuan pendidikan

yang telah ditetapkan.

d. Urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya.

4. Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional)

   Sistem PPSI berpandangan bahwa proses belajar-mengajar sebagai sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. PPSI sendiri merupakan sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan dan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar (Hamzah, 2007). Dalam hal ini, Oemar Hamalik (2010) mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun guru dan berguna untuk menyusun satuan pelajaran. Komponen PPSI meliputi:

   a. Pedoman perumusan tujuan, ialah panduan bagi guru untuk merumuskan tujuan-tujuan khusus.
   b. Pedoman prosedur pengembangan alat penilaian. Sistem PPSI menggunakan alat penilaian yang disebut *criterion referenced test* yakni mengukur efektifitas program atau pelaksanaan pengajaran.
   c. Pedoman proses kegiatan belajar siswa, merupakan petunjuk bagi guru untuk menetapkan langkah-langkah kegiatan belajar siswa sesuai dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai dan tujuan khusus instruksional yang harus dicapai oleh para siswa.
   d. Pedoman program kegiatan guru, untuk merencanakan program bimbingan sehingga para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan rumusan TIK.
   e. Pedoman pelaksanaan program, merupakan petunjuk-petunjuk dari program yang telah disusun.
   f. Pedoman perbaikan atau revisi, ialah pengembangan program setelah selesai dilaksanakan.

5. Sistem penilaian

   Sistem penilaian yang digunakan PPSI diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu.

6. Sistem bimbingan dan penyuluhan

   Setiap siswa memiliki tingkat kecepatan belajar yang berbeda-beda sehingga mereka memerlukan pengarahan agar mampu meraih masa depan yang lebih baik.

literasi nusantara

7. Supervisi dan administrasi
   Lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengamat sekolah. Mereka menggunakan teknik supervisi dan administrasi sekolah yang dapat dipelajari pada pedoman pelaksanaan kurikulum.

Adapun mata pelajaran dalam kurikulum 1975 adalah (1) pendidikan agama, (2) pendidikan moral pancasila, (3) bahasa Indonesia, (4) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (5) matematika, (6) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (7) olah raga dan kesehatan, (8) kesenian, dan (9) keterampilan khusus.

Kurikulum 1984

Sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum yakni dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Perubahan ini terjadi karena kurikulum dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dasar perubahan kurikulum tersebut adalah:

1. Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
2. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik.
3. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah.
4. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
5. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak hingga sekolah menengah, termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
6. Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja.

Ciri-ciri kurikulum 1984 dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.

1. Berorientasi kepada tujuan instruksional
   Orientasi ini didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif.

literasi nusantara

2. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA)
   CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
3. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral.
   Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran.
4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan latihan
   Untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa
   Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh hingga kesimpulan.
6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses
   Artinya, memberi tekanan terhadap proses pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengomunikasikan perolehannya.

literasi nusantara

Dasar kebijakan penyusunan kurikulum 1984 ialah

1. Adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Dalam hal ini, kurikulum 1984 memiliki 16 mata pelajaran inti.
2. Penambahan mata pelajaran pilihan sesuai masing-masing jurusan.
3. Perubahan program jurusan. Jika pada Kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, maka dalam Kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari (a) A1 penekanan pada mata pelajaran Fisika, (b) A2 penekanan pada mata pelajaran Biologi, (c) A3 penekanan pada mata pelajaran Ekonomi, (d) A4 penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya. Sedangkan program

B menekankan keterampilan kejuruan. Namun, program tersebut memerlukan sarana sekolah yang cukup banyak, akibatnya program ini ditiadakan untuk sementara waktu.

4. Pentahapan waktu pelaksanaan. Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas I SMA hingga ke kelas yang lebih tinggi.

Kurikulum 1994

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Akibatnya, pada saat itu dibentuk Tim *Basic Science* yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.

Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 di antaranya

1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Dengan pembagian ini diharapkan siswa memperoleh materi yang cukup banyak.
2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran atau isi).
3. Kurikulum 1994 bersifat populis yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum inti untuk semua siswa di seluruh Indonesia.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, maupun sosial.
5. Mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa sehingga menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah siswa.
6. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.

literasi

7. Pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Selama kurikulum 1994 dilaksanakan, muncul beberapa permasalahan, di antaranya

1. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan materi/substansi setiap mata pelajaran.
2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, kurang bermakna, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut membuat para pembuat kebijakan kembali menyempurnakan kurikulum dengan diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yakni

1. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat.
2. Mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.

Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap, yakni penyempurnaan jangka pendek dan jangka panjang.

literasi nusantara

Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP (2004/2006)

Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan (1975—1994) berimplikasi terhadap penguasaan kognitif, tetapi kurang dalam penguasaan keterampilan (*skill*) sehingga para alumni tidak memiliki kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum yang berorientasi terhadap penguasaan kompetensi secara holistik. Penyempurnaan kurikulum ini telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut.

1. Perubahan keempat UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999—2004.
3. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 1999 tentang Otonomi Daerah.

5. Peraturan Pemerintah No. 25 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom yang antara lain menyatakan pusat berkewenangan menentukan kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional dan kalender pendidikan.

Atas dasar kebijakan itulah Indonesia memilih untuk memberlakukan Kurikulum KBK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta penyempurnaannya dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum 2004 atau lebih populer dengan sebutan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) lahir sebagai respons dari tuntutan reformasi, di antaranya Undang-Undang No. 2 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dan Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan Nasional. Kurikulum ini tidak lagi mempersoalkan proses belajar sebab dipandang sebagai otoritas guru, tetapi lebih mementingkan peserta didik agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang dimaksud terdiri dari beberapa aspek, yaitu *knowledge, understanding, skill, value, attitude,* dan *interest.* Dengan mengembangkan aspek-aspek tersebut, siswa diharapkan mampu memahami, mengusai, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

literasi nusantara

Adapun kompetensi diklasifikasikan menjadi: kompetensi lulusan (dimiliki setelah lulus), kompetensi standar (dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran), kompetensi dasar (dimiliki setelah menyelesaikan satu topik atau konsep), kompetensi akademik (pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan), kompetensi okupasional (kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja), kompetensi kultural (adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia), dan kompetensi temporal (memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa).

Secara umum, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pemelajar, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan

kurikulum sekolah (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002: 3).

Kurikulum berbasis kompetensi ini harus termuat kompetensi utama. Dalam hal ini, Anderson dan Krathwohl (2001:11) membagi kompetensi utama menjadi empat gugus, yakni

1. *Factual knowledge*
   Aspek ini menyangkut pengetahuan tentang fitur-fitur dasar pembelajaran dalam disiplin keilmuan dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jenis kompetensi ini yaitu pengetahuan tentang terminologi dan detail spesifik (*specific details)* serta fitur-fitur dasar (*basic elements*).
2. *Conceptual knowledge*
   Kompetensi ini memuat pemahaman tata hubungan antara fitur-fitur dasar dalam struktur yang lebih luas dan yang memungkinkan berfungsinya fitur-fitur tersebut. Pengetahuan yang termasuk dalam kompetensi ini adalah pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, prinsip-prinsip kerja dan generalisasinya, serta pengetahuan tentang teori, model, paradigma dan struktur dasar.
3. *Procedural knowledge*
   Kompetensi ini meliputi pengetahuan dan pemahaman bagaimana melakukan sesuatu (*technical know how*), metode inkuiri, dan kriteria dalam menggunakan keterampilan, alogoritma, teknik, dan metode. Kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan khusus (*subject-specific skills*) dan perhitungan-perhitungan (*algorithm*), teknik dan metode khusus (*subject-specific techniques and methods*), serta kriteria penggunaan prosedur yang tepat.
4. *Metacognitive knowledge*
   Pengetahuan metakognitif berkaitan dengan pengetahuan terhadap kognisi secara umum dan kesadaran serta memahami kognisi diri sendiri. Kompetensi ini meliputi tiga hal, yaitu pengetahuan strategis, tugas-tugas kognitif, termasuk pengetahuan tentang kontekstualitas dan kondisi khusus, serta pengetahuan tentang diri sendiri.

Empat gugus kompetensi utama tersebut perlu dijembatani dengan lima unsur pokok yang diamanatkan dalam Kepmen 045/U/2002 yakni Pengembangan Kepribadian (PK), Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (PKK), Pengembangan Keahlian Berkarya (PKB), Pengembangan Perilaku Berkarya (PPB), dan Pengembangan

literasi nusantara

Berkehidupan Bermasyarakat (PBB).

Beberapa keunggulan Kurikulum Berbasis Kompetensi jika dibandingkan dengan kurikulum 1994 adalah:

1. Kurikulum KBK mengedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi dengan menganut paradigma pembelajaran UNESCO, "*Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be.*"
2. Silabus ditentukan secara seragam dan menjadi kewenangan guru. Selain itu, guru dan siswa sama-sama berperan dalam proses pembelajaran.
3. Jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu 32 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi.
4. Metode pembelajaran menggunakan keterampilan proses melahirkan metode PAKEM dan CTL.
5. Sistem penilaian menitikberatkan pada aspek kognitif, penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas.
6. KBK memiliki empat komponen, yaitu Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB), Penilaian Berbasis Kelas (PBK), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah (PKBS).

literasi nesantara

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing No. 22 2006 dan No. 23 2006 serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP.

Kurikulum ini terdiri dari tujuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas No. 24 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam

persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selain itu, standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat: (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum, (2) beban belajar, (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan (4) kalender pendidikan.

Sementara SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. SKL melingkupi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pemberlakuan kurikulum ini ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional untuk memutuskan pemberlakuan kurikulum ini. Dengan demikian, diharapkan KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi atau karakteristik daerah, dan sosial budaya masyarakat setempat serta peserta didik.

Adapun tujuan dibentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antarsatuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai (Mulyasa, 2006: 22─23).

KTSP perlu diterapkan pada satuan pendidikan berkaitan dengan tujuh hal berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan.
3. Pengambilan keputusan lebih baik dilakukan oleh sekolah.
4. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
5. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikannya masing-masing.
6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan.
7. Sekolah dapat merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat serta mengakomodasikannya dengan KTSP.

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas No. 22 2006 sebagaimana dikutip dari Mulyasa (2006: 151—153) adalah

1. Berpusat pada potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
2. Beragam dan terpadu.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan.
5. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan.
7. Belajar sepanjang hayat.
8. Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal.

Dengan demikian, secara garis besar KTSP memiliki enam komponen penting sebagai berikut:

1. Visi dan misi satuan pendidikan
   Visi merupakan pandangan atau wawasan representasi dari apa yang diyakini dan diharapkan organisasi, dalam hal ini sekolah pada masa yang akan datang.
2. Tujuan pendidikan satuan pendidikan
   Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan untuk pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,

literasi nusantara

kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3. Kalender pendidikan
   Kalender pendidikan untuk pengembangan kurikulum dan jam belajar efektif digunakan untuk mengatur pembentukan kompetensi peserta didik dan menyesuaikan dengan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik.
4. Struktur muatan KTSP
   Struktur muatan KTSP terdiri atas: (a) mata pelajaran, (b) muatan lokal, (c) kegiatan pengembangan diri, (d) pengaturan beban belajar, (e) kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan, (f) pendidikan kecakapan hidup, dan (g) pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
5. Silabus
   Silabus merupakan rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
   RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

literasi nusantara

Kurikulum 2013

Makna manusia yang berkualitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten, dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan.

Konten pendidikan dalam SKL dikembangkan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai rencana tertulis (dokumen) dan kurikulum sebagai proses (implementasi). Dalam dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus mengembangkan SKL menjadi konten kurikulum yang berasal dari prestasi

bangsa di masa lalu, kehidupan bangsa masa kini, dan masa mendatang. Kurikulum 2013 bertujuan mengarahkan peserta didik menjadi:

1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.
3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain itu, kurikulum 2013 juga mempunyai tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku.

Pertama, aspek pengetahuan terdapat dalam materi pelajaran untuk menambah wawasan siswa. Jika dilihat dari struktur kurikulumnya, maka jenjang pendidikan dasar memiliki bobot pengetahuan 20% dan 80% aspek karakter, kemudian pendidikan jenjang pertama memiliki bobot pengetahuan 40% dan aspek karakter 60%, sedangkan jenjang pendidikan menengah atas memiliki bobot 80% aspek pengetahuan dan 20% aspek karakter.

Kedua, aspek keterampilan bertujuan meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan soal atau proyek sehingga dapat melatih sifat ilmiah dan karakter siswa. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan menjawab soal lisan.

Ketiga, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aktivitas menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan oleh: guru yang dicatat dalam jurnal harian; teman sejawat dalam lembaran nilai; dan diri sendiri.

Di dalam kurikulum ini, ada materi pelajaran yang dirampingkan dan ada pula yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS, sedangkan materi yang ditambahkan adalah Matematika. Materi pelajaran tersebut (terutama Matematika) disesuaikan dengan materi pembelajaran standar Internasional sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam dan luar negeri.

literasi nusantara

Berikut materi pelajaran tingkat sekolah dasar dalam kurikulum 2013 adalah

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Matematika
4. Bahasa Indonesia
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Seni Budaya dan Prakarya (Muatan lokal)
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Muatan lokal)
9. Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing)

Sedangkan materi pelajaran di tingkat menengah pertama diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni

1. Kelompok A (Wajib)
   a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
   b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
   c. Matematika
   d. Bahasa Indonesia
   e. Ilmu Pengetahuan Alam
   f. Ilmu Pengetahuan Sosial
   g. Bahasa Inggris
2. Kelompok B (Wajib)
   a. Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
   b. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
   c. Prakarya dan Kewirausahaan (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya /Pengolahan)
   d. Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing)

Sementara untuk mata pelajaran di tingkat sekolah menengah atas adalah

1. Kelompok A (Wajib)
   a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
   b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
   c. Matematika
   d. Bahasa Indonesia
   e. Bahasa Inggris
   f. Sejarah Indonesia

literasi

2. Kelompok B (Wajib)
   a. Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
   b. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
   c. Prakarya dan Kewirausahaan (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya /Pengolahan)
3. Kelompok C (Peminatan)
   a. Matematika dan Ilmu Alam
      1) Matematika Peminatan
      2) Fisika
      3) Biologi
      4) Kimia
   b. Ilmu-Ilmu Sosial
      1) Sejarah Dunia
      2) Geografi
      3) Ekonomi
      4) Sosiologi
   c. Ilmu-Ilmu Bahasa
      1) Bahasa Indonesia Peminatan
      2) Bahasa dan Sastra Inggris
      3) Bahasa Asing
      4) Antropologi

literasi nusantara

Kurikulum 2013 dirancang dengan kompetensi-kompetensi berikut.

1. Isi atau konten kurikulum dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan selanjutnya dirinci dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran.
2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik di suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus dimiliki peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif.
3. Kompetensi Dasar (KD) dipelajari peserta didik untuk suatu tema di jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu bagi siswa-siswi SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.
4. KI dan KD di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah diseimbangkan antara sikap dan kemampuan intelektual.

5. KI menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*), sedangkan KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam KI.
6. KD dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*), dan memperkaya (*enriched*) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).
7. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu mata pelajaran (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut.
8. RPP dikembangkan dari setiap KD untuk mata pelajaran dan kelas tersebut

Adapun pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran.
2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan.
3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran.
4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (*mastery learning*) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi.
5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat.
6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya.
7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni.
8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan.
9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

literasi nusantara

10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi.

Proses pembelajaran Kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

1. Pembelajaran intrakurikuler
   Pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.
   a. Proses pembelajaran intrakurikuler berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat.
   b. Proses pembelajaran di SD/MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan guru.
   c. Proses pembelajaran didasarkan prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan (*excepted*).
   d. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. Dalam hal ini, pengetahuan adalah konten yang bersifat *mastery* dan diajarkan secara langsung (*direct teaching*). Sementara keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah konten yang bersifat developmental yang dapat dilatih (*trainable*) dan diajarkan secara langsung (*direct teaching*). Sedangkan sikap adalah konten developmental dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang tidak langsung (*indirect teaching*).
   e. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat *developmental* dilaksanakan secara berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
   f. Proses pembelajaran tidak langsung (*indirect*) terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses pembelajaran tidak langsung bukan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) karena sikap yang dikembangkan tidak harus tercantum dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru.

literasi nusantara

g. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati (melihat, membaca, mendengar, menyimak), menanya (lisan, tulis), menganalisis (menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep), dan mengomunikasikan (lisan, tulis, gambar, grafik, tabel, *chart*, dan lain-lain).
h. Pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik yang kurang menguasai kompetensi baik secara individu, kelompok, atau kelas. Pembelajaran ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kelemahan yang ditemukan dari analisis hasil tes, ulangan, dan tugas setiap peserta didik.
i. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan.

2. Pembelajaran ekstrakurikuler
   Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kelas yang dijadwalkan setiap minggu. Biasanya, kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib (pramuka) dan pilihan. Nilai dari kegiatan ekstrakurikuler wajib ini dijadikan unsur pendukung pembelajaran intrakurikuler.

Kurikulum 2013 diimplementasikan dengan menggunakan strategi tertentu yang dikemas dalam tahapan-tahapan berikut.

1. Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
   a. Juli 2013: Kelas I, IV, VII, dan X.
   b. Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI.
   c. Juli 2015: Kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII.
2. Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dari 2013—2015.
3. Pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari 2012—2014.
4. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi dan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK dimulai dari Januari—Desember 2013.
5. Pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan dilaksanakan sejak Juli 2013 hingga 2016.

Banyak pakar pendidikan yang telah melakukan penelitian terhadap kurikulum 2013 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Kurikulum 2013 diketahui memiliki beberapa kelebihan berikut.

1. Lebih menekankan pendidikan karakter
   Melalui pendidikan karakter ini, lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk membentuk karakter peserta didik. Upaya pembentukan karakter dan budi pekerti ini ditekankan pada semua program studi sehingga karakter anak bangsa dapat dibentuk dengan lebih maksimal.
2. Memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif
   Kurikulum 2013 didesain agar lebih mudah membentuk peserta didik yang inovatif dan kreatif dalam berbagai hal, khususnya ketika memecahkan persoalan saat proses pembelajaran.
3. Lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada
   Kurikulum 2013 dapat menjadikan siswa lebih responsif dalam berbagai hal. Peserta didik diajarkan untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, ataupun nasional. Sikap ini perlu dipupuk untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa.
4. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek
   Proses penilaian dalam kurikulum ini dilakukan dengan komprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 membuat indikator penilaian dari berbagai aspek, di antaranya dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius.
5. Lembaga memperoleh pendampingan dari pusat
   Pendampingan dan arahan yang diperoleh langsung dari pusat membuat konsep pendidikan lebih mudah diterima dan dapat meminimalisir kesalahpahaman sebab lembaga dan pihak pusat dapat langsung berkoordinasi dengan baik.
6. Mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran
   Kurikulum 2013 mendorong guru agar semakin kreatif memberikan pengajaran kepada para siswa. Inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami siswa. Dalam hal ini penting bagi guru untuk terbuka dan selalu berupaya mengembangkan diri menjadi lebih baik.

literasi nusantara

7. Penyediaan fasilitas belajar semakin efisien
   Kurikulum 2013 telah dirancang sekaligus dengan perangkat dan fasilitas belajar sehingga lembaga tidak kebingungan untuk melengkapinya. Contoh fasilitas yang telah disediakan adalah buku ajar bagi setiap satuan pendidikan.

Terlepas dari semua kelebihannya, kurikulum 2013 juga memiliki berbagai kelemahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kompetensi guru, materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor sekolah dan pemerintahan.

1. Guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013
   Dalam hal ini, guru tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum, padahal guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Maka, alangkah lebih baik jika proses pembuatan kurikulum juga melibatkan guru agar kurikulum koheren dengan kondisi di lapangan.
2. Banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional
   Masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional membuat implementasi kurikulum 2013 terhambat sebab ia menghendaki adanya metode dan konsep belajar yang baru dan inovatif seiring dengan berkembangnya zaman.
3. Banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental
   Kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran sehingga capaian dari kurikulum ini pun terhambat. Maka, dibutuhkan pelatihan dan bimbingan khusus untuk semua guru.
4. Kesalahpahaman guru dalam memahami konsep kurikulum
   Guru terlalu fokus terhadap konsep pembelajaran aktif dan mandiri yang ditawarkan kurikulum ini sehingga mereka kurang memberikan materi pelajaran kepada siswa.
5. Guru kurang efektif dalam menyusun RPP
   RPP diketahui sangat memengaruhi hasil pembelajaran. Semakin baik RPP yang dibuat oleh guru, maka hasil pembelajarannya pun akan maksimal, begitupun sebaliknya. Faktor ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan kualitas guru.
6. Materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak
   Banyaknya materi yang diberikan kepada siswa membuat beberapa pihak menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia tertentu sehingga beban siswa pun

semakin berat. Hal ini berdampak terhadap siswa berkemampuan rendah sehingga mereka akan tertinggal.

7. Sekolah kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada
   Jika pada kurikulum sebelumnya sekolah sangat independen dan dapat menentukan kurikulumnya sendiri, maka pada kurikulum 2013 ini semua materi ajar dan kurikulumnya harus mengikuti pusat. Hal ini menyebabkan sekolah kurang aktif membentuk ciri khas lembaga.

Beberapa kekurangan kurikulum 2013 di atas menunjukkan bahwa ada banyak sisi yang perlu diperbaiki sehingga kualitas kurikulum akan semakin baik. Tentu dalam hal ini, lembaga harus berperan aktif dan selalu berinovasi agar lembaga pendidikannya semakin maju dan tidak tertinggal.

literasi
nusantara

3
RUANG LINGKUP MANAJEMEN KURIKULUM LEMBAGA PENDIDIKAN

Penyusunan Jadwal Pelajaran

Menyusun jadwal pelajaran adalah salah satu kegiatan dalam manajemen kurikulum di sekolah pada proses pengorganisasian (*organizing*). Pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh petugas khusus penyusun jadwal (di Sekolah Dasar), seksi kurikulum (di SMP), atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum (di SMA/SMK/MA). Jadwal pelajaran berfungsi sebagai pedoman mengajar bagi guru dan pedoman belajar bagi siswa. Adanya jadwal pelajaran membuat kita dapat mengetahui: 1) mata pelajaran yang akan diajarkan, 2) waktu pelajaran akan diajarkan, 3) tempat pelajaran diajarkan, dan 4) seseorang (guru) yang akan mengajar. Jadwal pelajaran dibedakan menjadi dua, yakni umum dan khusus. Jadwal pelajaran umum memuat pengaturan pemberian mata pelajaran pada seluruh kelas dan menunjukkan pembagian waktu mengajar bagi seluruh guru di sekolah itu. Sedangkan jadwal pelajaran khusus adalah kegiatan pemberian mata pelajaran yang hanya berlaku bagi suatu kelas tertentu/sekelompok siswa tertentu pada hari-hari tertentu (Suryosubroto, 2004: 43).

Mengingat menyusun jadwal pelajaran membutuhkan ketelitian dan ketelatenan serta diharapkan jadwal dapat memperlancar proses pembelajaran untuk mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran, maka diperlukan beberapa kiat-kiat khusus sebagaimana uraian di bawah ini.

Pertama, memperhatikan syarat-syarat tertentu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Syarat-syarat yang dimaksud adalah

1. Adanya selingan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya agar menjemukan
   Seperti yang kita ketahui, setiap mata pelajaran memiliki tingkat kesukaran dan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Arab (dikatakan) lebih sulit jika dibandingkan mata pelajaran IPS, sejarah, bahasa Indonesia, dan sejenisnya. Agar siswa dapat menyerap semua materi pembelajaran dengan baik dan sekaligus dapat membagi energi untuk memahami materi yang sedang dipelajari, maka penyusunan jadwal pelajaran hendaknya dilakukan selang-seling yaitu ada mata pelajaran yang berat, sedang, dan ringan.
2. Jam pelajaran jangan terlalu lama
   Kegiatan membaca, melihat, mencermati, apalagi memahami membutuhkan konsentrasi mendalam. Artinya, kegiatan ini membutuhkan kemampuan kerja otak. Jika kerja otak berlangsung secara terus-menerus karena merespons materi pembelajaran, maka lama-kelamaan kerja otak akan mengalami kejenuhan dan kelelahan. Di sinilah arti penting memberi batas berapa lama otak harus merespons suatu materi. Secara umum, otak mampu merespons objek setiap materi pembelajaran antara 70 s/d 100 menit atau antara 2 s/d 3 pelajaran. Jadi, jika waktu mata pelajaran yang telah ditetapkan kurikulum adalah 8 jam pelajaran, maka pembagian yang paling baik adalah 2, 2, 2, 2 atau 3, 3, 2, jangan sampai dibagi atau dibuat 4, 4 per minggunya.
3. Masing-masing pelajaran dicarikan waktu yang tepat
   Setiap mata pelajaran memiliki tingkat kedalaman dan cakupan materi yang berbeda-beda. Materi yang bahasannya luas dan kajiannya mendalam tentu memiliki kesulitan yang cukup berat. Agar siswa tetap fokus dan mampu memahami materi pelajaran dengan baik, hendaknya mata pelajaran yang berat dijadwalkan di waktu pagi (misalnya mata pelajaran matematika, fisika, dan sejenisnya), sementara mata pelajaran sedang dijadwalkan di siang hari (setelah jam istirahat pertama), dan untuk mata pelajaran yang ringan dapat diletakkan di akhir jam pelajaran.
4. Disediakan waktu istirahat agar siswa tidak terlalu lelah
   Proses pembelajaran sangat memerlukan energi yang diwujudkan otak dan semua indra pada anak untuk merespons objek

literasi kalimantan

materi pendidikan. Pemusatan seluruh kemampuan terhadap objek/materi pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus akan menimbulkan kelelahan bagi siswa. Oleh karena itu, penting untuk membuat dan menyusun jadwal pelajaran yang diselingi dengan istirahat. Masa istirahat belajar siswa berdurasi antara 15 s/d 20 menit dengan plotting jam pelajaran dalam suatu harinya adalah 2-2-istirahat-2.

5. Diusahakan kegiatan di satu kelas tidak menganggu kelas sebelahnya.
6. Pada mata pelajaran tertentu, siswa di satu kelas dapat digabung atau dipisah.
7. Dapat dilakukan *team teaching* untuk mata pelajaran tertentu.

Kedua, memahami langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran sebagaimana berikut.

1. Penyusunan struktur program kurikulum masing-masing mata pelajaran (jenis mata pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam per minggu masing-masing mata pelajaran di setiap jenjang kelas).
2. Penyusunan pembagian tugas jam mengajar guru (berisi nama guru, jenis mata pelajaran yang diajarkan, jumlah jam masing-masing mata pelajaran, dan kelas yang diajar).
3. Penentuan hari atau jam kosong masing-masing mata pelajaran dan guru (misalnya untuk pelajaran Penjasorkes hanya jam ke 1 s.d. 4, hari untuk kegiatan MGMP, pembinaan, dan kegiatan sekolah lainnya).
4. Penentuan jumlah jam pelajaran sekolah setiap hari atau setiap minggu (misalnya Senin s.d. Kamis: 8 jam pelajaran, kemudian Jumat dan Sabtu: 6 jam pelajaran. Jadi jumlah jam pelajaran sekolah per minggu adalah 44 jam pelajaran).
5. Penentuan jumlah ruang mata pelajaran (khusus sekolah yang menyelenggarakan *moving class*), jumlah ruang mata pelajaran harus menggunakan pembulatan ke atas dari rasio jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran total dengan jumlah jam pelajaran sekolah per minggu yang dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio ruang mapel} = \frac{\text{Jumlah jam mapel total per minggu}}{\text{jumlah jam pelajaran sekolah per minggu}}$$

Contoh:

Menentukan jumlah ruang mata pelajaran kimia

a. Menghitung jumlah jam pelajaran sekolah per minggu
b. Senin s.d. Kamis: 8 jam pelajaran, jadi 4 x 8 JP = 32 JP

Jumat: 4 JP
Sabtu: 6 JP
Jadi, jumlah jam pelajaran sekolah per minggu adalah 32+4+6 =42 JP

c. Menghitung jumlah jam mata pelajaran total per minggu
Jumlah rombel kelas X = 8 rombel
Jumlah rombel kelas XI-IA = 8 rombel
Jumlah rombel kelas XII-IA = 8 rombel
Jumlah jam pelajaran kimia kelas X/minggu = 4 JP
Jumlah jam pelajaran kimia kelas XI/minggu = 5 JP
Jumlah jam pelajaran kimia kelas XII/minggu = 6 JP
Jadi jumlah jam mapel kimia total per minggu = (4x8)+(5x-8)+(6x8) = 120

d. Menghitung rasio ruang mata pelajaran

$$\text{Rasio ruang mapel kimia} = \frac{\text{Jumlah jam kimia total per minggu}}{\text{jumlah jam pelajaran sekolah per minggu}}$$

$$= \frac{120}{42}$$

$$= 2{,}86 \sim 3 \text{ (dibulatkan ke atas)}$$

e. Menentukan jumlah ruang mata pelajaran
Jumlah ruang mata pelajaran kimia adalah pembulatan ke atas dari rasio yang telah dihitung yakni 3. Jadi, mata pelajaran kimia membutuhkan 3 ruang.

6. Penentuan jumlah jam pelajaran tiap ruang mata pelajaran per minggu
Untuk menentukan jumlah jam pelajaran dalam ruang tertentu harus merata yaitu tidak boleh melebihi jumlah jam mapel total per minggu dibagi jumlah ruang mapel. Penentuannya dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

Jumlah jam pelajaran maks tiap ruang mapel:

$$\frac{\text{Jumlah jam mapel total per minggu}}{\text{Jumlah mapel ruang}}$$

Contoh:
Misalnya mata pelajaran kimia memerlukan 3 ruang, yaitu ruang KIM-1, KIM-2, dan KIM-3, dan jumlah jam mapel kimia total adalah 120 jam/minggu, maka jumlah jam pelajaran maksimum tiap ruang kimia adalah:

Jumlah JP maks tiap ruang kimia=

$$= \frac{\text{Jumlah jam kimia total per minggu}}{\text{Jumlah ruang kimia}}$$

$$= \frac{120}{3} = 40 \text{ jam}$$

7. Mendistribusikan jam-jam guru mata pelajaran pada kelas, jam, dan hari-hari yang telah direncanakan.
8. Mempublikasikan jadwal pelajaran kepada guru, siswa, dan komponen lain yang memerlukannya.

Ketiga, memilih alat bantu/*software* yang tepat. Beberapa cara untuk mempermudah penyusunan jadwal adalah dengan menggunakan cara manual dengan sistem kartu, menggunakan format condition pada Microsoft excel, atau dengan *software* ASc Timetables. Untuk membuat komponen dasar jadwal pelajaran, diperlukan beberapa data penting, yakni

1. Nama mata pelajaran dari setiap tingkatan beserta bobot sks
   Semua mata pelajaran yang telah ditetapkan sebagai kurikulum sekolah untuk dibelajarkan kepada siswa, hendaknya diidentifikasi dan dicatat secara lengkap (termasuk kemungkinan adanya mata pelajaran tambahan yang menjadi ciri khas keahlian sekolah tersebut).
2. Kelas/rombongan belajar
   Jumlah rombongan belajar atau kelas dan tingkatan yang dimiliki setiap jenjang sekolah berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah siswa yang diterima/dimiliki sekolah tersebut.
3. Nama-nama guru secara lengkap beserta bidang keahliannya
   Pendataan nama guru bukan hanya penting sebagai database, melainkan juga berpengaruh terhadap sah tidaknya keputusan yang dikeluarkan kepala sekolah tentang penetapan guru mata pelajaran. Begitu pula bidang keahlian guru harus didata dengan benar sebab nantinya akan digunakan untuk menentukan jenis dan nama mata pelajaran yang diemban guru tersebut.
4. Norma jumlah jam pelajaran harian
   Setiap guru yang diangkat sebagai pendidik mempunyai tugas atau beban mengajar yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Saat ini, dalam satu minggu, jam mengajar guru tidak boleh kurang dari 37 JP (bahkan, akan tingkatkan menjadi 40 JP/minggu).

literasi nusantara

Jadwal pelajaran ini disusun agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tertib sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Maka, alangkah baiknya jika pembuatan jadwal pelajaran memperhatikan tiga prinsip berikut.

Pertama, prinsip didaktis. Penyusunan dan pembuatan jadwal pelajaran hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga materi yang sedang dipelajari siswa terserap dengan maksimal. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu mata pelajaran berat dan ringan. Secara didaktis, pelajaran berat hendaknya ditempatkan pada jam-jam awal, sedangkan mata pelajaran yang ringan dapat ditempatkan di bagian tengah ataupun akhir.

Kedua, prinsip praktis. Penyusunan atau pembuatan jadwal memungkinkan terjadinya pertukaran atau pergeseran jadwal pelajaran dengan mudah. Hal tersebut sangat mungkin terjadi saat guru tiba-tiba ada kepentingan mendadak dengan durasi yang cukup lama sehingga jadwal pelajaran akan diisi atau diganti dengan guru yang lain atau dapat pula jam mata pelajaran dimajukan.

Ketiga, prinsip tertib. Prinsip ini mengandung makna bahwa jadwal yang akan disusun dapat mempermudah siapapun yang membacanya, dapat pula untuk kepentingan administrasi dan lain-lain. Jadwal pelajaran yang disusun dengan tertib dan rapi juga mempermudah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memonitoring kehadiran guru. Selain itu, juga mudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan mempermudah bagian kurikulum dalam membuat jadwal piket.

literasi nusantara

Jadwal pelajaran ini tidak dilakukan semua jenjang pendidikan. Penyusunan jadwal pelajaran masing-masing materi telah didasarkan pada analisis siswa atau mahasiswa mampu berpikir secara linear dan fokus. Berbeda dengan siswa atau anak usia dini yang masih memiliki kemampuan berpikir terbatas dan berada dalam dunia permainan, maka jadwal pelajaran tetap dibutuhkan dalam bentuk terintegrasi antara satu materi dengan materi yang lain yang dikemas dalam bentuk tema atau sub tema. Kurikulum yang telah ditetapkan dan dirancang oleh sekolah setelah diimplementasikan (dibelajarkan oleh siswa) hasilnya tidak dapat dirasakan langsung dan tidak bisa diukur secara sama sebab substansi pendidikan adalah membelajarkan siswa agar menjadi beradab, berwatak, dan berkepribadian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar tujuan kurikulum dapat tercapai adalah melakukan penjadwalan.

Penyusunan Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur. Komponen-komponen yang terdapat pada kalender pendidikan adalah

1. Permulaan tahun ajaran merupakan waktu dimulainya kegiatan pembelajaran setiap awal tahun pelajaran di satuan pendidikan.
2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
4. Hari libur ialah waktu yang telah ditentukan untuk tidak diadakannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dan telah tertera atau dijadwalkan di dalam kalender pendidikan. Hari libur ini dapat berupa libur jeda semester, antarsemester, libur hari besar keagamaan, nasional, akhir tahun pelajaran, dan libur hari khusus.

Adapun langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan harus mengindahkan hal-hal berikut.

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Mengacu pada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan atau Kemenag.
3. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antarsemester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan.
4. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Kemendikbud dan atau Kemenag terkait hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
5. Menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi hari libur umum maupun keagamaan.
6. Menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakulikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu.

literasi nusantara

7. Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif (seperti hari-hari pembelajaran di bulan puasa) dan hari libur fakultatif (seperti libur awal puasa dan hari raya keagamaan).
8. Merekap kalender pendidikan selama satu tahun penuh atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan telah diteliti secara saksama oleh tim perumus kalender pendidikan.
9. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana pada dokumen Permendiknas No. 22 2006 tentang Standar Isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

Adapun fungsi kalender pendidikan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran di sekolah, yakni

1. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah/madrasah.
2. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah/madrasah.
3. Pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah.
4. Pedoman bagi guru untuk menyusun silabus, program tahunan (Prota), program semester (Promes), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan satuan acara pembelajaran.

Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyusun kalender pendidikan diuraikan sebagaimana berikut.

1. Penghitungan alokasi waktu tahunan

   Wina (2010) berpendapat bahwa program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok

bahasan yang dalam KBK dikenal dengan modul (Mulyasa, 2008). Dalam program perencanaan, menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah:

a. Melihat jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah dan menganalisis minggu efektif dalam satu semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
b. Menandai hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif (per minggu). Hari-hari libur yang dimaksud meliputi jeda tengah semester, antarsemeser, libur akhir taun pelajaran, hari libur keagamaan, nasional, dan libur umum (termasuk hari nasional), dan hari libur khusus.
c. Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia.
d. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta meninjau ulang materi.

2. Penghitungan alokasi waktu semester

Waktu semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan, seperti kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, ujian tengah semester, ujian semester, dan kegiatan lainya yang diberi penilaian keberhasilan. Program pendidikan semester menggunakan satuan waktu terkecil yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan serta berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester segenap, bahan kegiatan program

literasi nusantara

semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan siswa atau mahasiswa yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan kelulusannya. Program semester berisikan garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan (Mulyasa, 2008). Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan (Wina, 2010). Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangannya.

Adapun langkah-langkah penyusunan program semester sebagai berikut.

a. Memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester.
b. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran.
c. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan.
d. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan

literasi nusantara

Pembagian Tugas Guru

Dasar hukum pembuatan SK Pembagian Tugas Mengajar guru adalah

1. Undang-undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang SNP.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 74 2008 tentang Guru.
5. Permendikdas RI No. 13 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.
6. Permendikdas RI No. 16 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
7. Permen PAN dan RB No. 16 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

9. Permendiknas RI No. 28 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 17 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Presiden No. 68 1995 tentang Hari kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
12. Permendiknas No. 39 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
13. Permendikbud RI No. 23 2017 tentang Hari Sekolah.

Hal-hal yang harus diingat dan diperhatikan ketika pembagian tugas mengajar guru adalah

1. Bidang keahlian yang dimiliki guru
   Bidang keahlian guru perlu dipertimbangkan dalam pembagian tugas mengajar guru sebab mereka harus mengajar sesuai dengan keahliannya. Contohnya bidang studi Matematika harus diajarkan oleh guru yang berkualifikasi Sarjana Pendidikan Matematika.
2. Sistem guru kelas dan guru bidang studi
   Untuk kelas rendah seperti SD kelas 1, 2, dan 3 biasa menggunakan sistem guru kelas, di mana seluruh mata pelajaran diampu oleh satu guru, kecuali mata pelajaran agama, budi pekerti, dan PJOK. Sementara untuk kelas atas setingkat SMP, SMA, dan SMK menggunakan guru bidang studi.
3. Formasi
   Formasi adalah susunan jatah petugas sesuai dengan banyaknya tugas yang akan dipikul. Pembagian tugas guru harus sesuai dengan tugas pokok dan tugas tambahan yang diembannya.
4. Beban tugas guru menurut ketentuan yaitu 24 jam per minggu
   Guru wajib mengajar minimal 24 jam per minggu dan maksimal 40 jam per minggu. Apabila ketentuan minimal 24 jam tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap hak tunjangan di luar gaji guru.
5. Kemungkinan adanya rangkap tugas mengajar
   Diupayakan tidak memberikan tugas tambahan mengajar melebihi jam mengajar pelajaran inti. Bagi guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pejabat di sekolah, sebaiknya jam mengajar mereka juga tidak terlalu banyak.

6. Masa kerja dan pengalaman mengajar dalam bidang pelajaran yang ditekuni
   Kelas yang lebih tinggi biasanya diisi oleh guru yang memiliki pengalaman lebih banyak, sedangkan guru pemula ditempatkan pada kelas-kelas rendah agar mereka tidak kesulitan dalam mengajar

Berikut ini adalah contoh surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar guru.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
Jalan Flamboyan 63 Semarapura, 80714 Bali, Phone (0366) 21508

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SEMARAPURA
Nomor : 421.7/033/SMAN 1 SMR/UPT.DISDIK.KLK/DISDIK

Tentang
PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN
RINCIAN TUGAS TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
DAN TENAGA ADMINISTRASI TIDAK TETAP
SMA NEGERI 1 SEMARAPURA TAHUN PELARAN 2017/2018

Menimbang : bahwa dalam memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan administrasi di SMA Negeri 1 Semarapura perlu ditetapkan pembagian tugas Tenaga Administrasi Sekolah

Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pengelolaan Tata Usaha;
2. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/V/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Rapat Tenaga Administrasi Sekolah tanggal 18 Juli 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama	:	Membagi tugas Tenaga Administrasi Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Masing-masing Tenaga Administrasi SMA Negeri 1 Semarapura melaksanakan tugas ketatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah melalui Kepala Tenaga Administrasi Sekolah.
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada 19 Juli 2017
Kepala SMA Negeri 1 Semarapura,

I Putu Suardi, S.Pd.
Pembina
NIP. 19610619 198411 1 00

Lampiran 1 : SK. Kepala SMA Negeri 1 Semarapura
Nomor : 421.7/033.SMA.1 SMR/DIKPORA
Tanggal : 19 Juli 2017

PEMBAGIAN TUGAS TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH SMA NEGERI 1 SEMARAPURA 2017/2018

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TUGAS POKOK
1.	I Dewa Gede Suartana, S.Pd NIP. 19610619 198411 1 002	Penata/III/c	Kepala Tenaga Administrasi Sekolah
2.	I Made Jegjeg Sumiartha NIP. 19601231 198003 1 083	Penata Muda Tk.I/III/b	Urusan Administrasi Persuratan dan Kearsipan (Bag. Agenda)
3.	Komang Alit Sriadiani, S.E NIP. 19720130 199103 2 003	Penata/III/c	Urusan Kesiswaan

4.	IKomang Citrayasa Astawa,S.E NIP. 19750723 200801 1 009	Penata Muda/ III/a	Urusan Kepegawaian
5.	I Nyoman Silur NIP. 19601231 198503 1 214	Penata Muda Tk.I/III/b	Urusan Perlengkapan
6.	I Nyoman Arnawa NIP. 19601231 198503 1 215	Penata Muda Tk.I/III/b	Urusan Keuangan (Bendahara Rutin)
7.	Sang Ayu Pt. Suartini, S.E NIP. 19620101 199010 2 001	Penata Muda Tk.I/III/b	Urusan Keuangan (Bendahara Gaji)
8.	I Nyoman Supatrayasa NIP. 19671231 198602 1 012	Penata Muda Tk.I/III/b	Urusan Perpustakaan
9.	I Putu Suprapta, S.Kom	PTT	Teknisi
11.	Luh Komang Triyanti	PTT	Caraka/Kurir
13.	Made Suartini	PTT	Pembantu Ur. Perpustakaan
14.	Ni Made Eny Predari, S.Pd	PTT	Pembantu Ur. Perpustakaan
15.	Ni Komang Yulianti	PTT	Pembantu Umum (Konsumsi tamu)
16.	Ni Kadek Widiari	PTT	Pembantu Umum
17.	I Nengah Candra	PTT	Keamanan (Satpam)
18.			Keamanan (Satpam)
19.	I Wayan Wijana	PTT	Keamanan (Satpam)
20.	I Komang Ariasa	PTT	Keamanan (Satpam)
21.	I Ketut Dura	PTT	Kebersihan (Tukang Kebun)
22.	Putu Widnyana	PTT	Kebersihan (Tukang Kebun)
23.	Ni Nyoman Lostri	PTT	Kebersihan (Menyapu Halaman)

Kepala SMA Negeri 1 Semarapura,

I Putu Suardi, S.Pd.
Pembina
NIP. 19610619 198411 1 002

Pengelompokan Siswa

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sisdiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Setelah melakukan daftar ulang di lembaga pendidikan yang dikehendaki, peserta didik perlu diklasifikasikan. Tujuannya bukan untuk membeda-bedakan peserta didik berdasarkan keahlian dan tingkat kepandaiannya, melainkan untuk membantu proses belajar mengajar demi keberhasilan peserta didik. Dengan kata lain, pengelompokan peserta didik bermaksud untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin sehingga pengelompokan tidak boleh diartikan lain, kecuali untuk proses pengembangan peserta didik tersebut.

Pengelompokan peserta didik didasarkan atas pandangan bahwa mereka mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik akan melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan-perbedaan yang ada melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Jika perbedaan antara peserta didik satu dengan yang lain dicermati lebih mendalam, akan didapati perbedaan antarindividu yang teraksentuasi pada berbedanya peserta didik satu dengan yang lain di dalam kelas dan perbedaan intra individu yang menitikberatkan pada berbedanya kemampuan masing-masing peserta didik dalan berbagai mata pelajaran atau bidang studi.

Perbedaan tersebut mengharuskan adanya layanan pendidikan yang berbeda terhadap mereka. Jika layanan yang berbeda secara individual dianggap kurang efisien, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan peserta didik agar kekurangan pada pengajaran secara klasikal dapat dikurangi. Dengan perkataan lain, pengelompokan adalah konvergensi dari pengajaran sistem klasikal dan sistem individual.

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pengelompokan Siswa

Menurut Imron (2015: 97), pengelompokan atau *grouping* adalah penggolongan peserta didik berdasarkan karakteristiknya agar mereka berada dalam kondisi yang sama sehingga memudahkan pemberian layanan pendidikan. Pengelompokan berdasarkan karakteristik tersebut bertujuan menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah agar dapat terlaksana dengan lancar dan tertib sehingga

dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun tujuan lainnya adalah membantu meningkatkan perkembangan kemampuan peserta didik, baik yang cepat maupun yang lambat.

Dengan adanya pengelompokan, peserta didik akan mudah dikenali sebab tidak jarang dari peserta didik di dalam kelas berada dalam keadaan heterogen, bukan homogen. Tentu heterogenitas ini dapat diketahui tingkatannya sesuai kemampuan diskriminan alat ukur yang dipergunakan untuk membedakan. Semakin tinggi tingkat kemampuan membedakan alat ukur, maka semakin tinggi pula tingkat heterogenitas peserta didik yang ada di sekolah. Adapun alat ukur yang lazim digunakan untuk membedakan peserta didik adalah tes: 1) tes kemampuan verbal dan numerikal digunakan untuk membedakan kemampuan umum peserta didik; 2) tes keklerekan bertujuan membedakan kecepatan kerja dan kecermatan kerja peserta didik; 3) tes minat berguna untuk membedakan minat yang dimiliki peserta didik; 4) tes prestasi belajar digunakan untuk membedakan daya serap masing-masing peserta didik terhadap bahan ajaran yang telah disampaikan; dan 5) tes kepribadian berfungsi untuk membedakan integritas dan pribadi peserta didik.

Menurut Yeager dalam Imron (2015: 112), pengelompokan peserta didik didasarkan atas dua fungsi, yaitu fungsi integrasi dan perbedaan. Fungsi integrasi adalah pengelompokan berdasarkan kesamaan-kesamaan peserta didik, seperti berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya sehingga menghasilkan pembelajaran yang klasikal. Sementara fungsi perbedaan adalah pengelompokan peserta didik didasarkan perbedaan yang dimiliki peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya sehingga menghasilkan pembelajaran individual.

literasi nusantara

Dasar Pengelompokan Peserta Didik

Hendyat Soetopo (1982) dalam Imron (1995: 86) mengemukakan lima dasar pengelompokan peserta didik sebagaimana berikut.

1. *Friendship grouping*
   Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Pengelompokan ini menimbulkan kecenderungan menjadikan peserta didik yang pandai dengan yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai dengan anak yang kurang pandai pula.

2. *Achievement grouping*
   Pengelompokan didasarkan atas prestasi peserta didik.
3. *Aptitude grouping*
   Pengelompokan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat.
4. *Attention or interest grouping*
   Pengelompokan didasarkan atas minat peserta didik.
5. *Intelligent grouping*
   Pengelompokan didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau intelegensi.

Teknik-Teknik Pengelompokan Peserta Didik

Teknik pengelompokan peserta didik dapat didasarkan pada tiga aspek, yaitu berdasarkan kemampuan, kegiatan, dan sosio-emosional.

1. Berdasarkan kemampuan
   a. Kemampuan siswa dalam setiap pembelajaran berbeda-beda. Bisa saja siswa yang pandai di pelajaran bahasa, ternyata lemah di pelajaran matematika.
   b. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memilliki kemampuan sama berada duduk di meja yang sama.
   c. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswa
2. Berdasarkan kegiatan
   a. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja.
   b. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena berpengaruh terhadap pembentukan karakter.
   c. Dalam tugas kelompok siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya.

literasi nusantara

3. Berdasarkan sosio-emosional
   a. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosi dan sifat yang sama. Maka untuk membantu sosio-emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri.
   b. Kegiatan yang diberikan dapat berbentuk apapun. Pengelompokan ini harus direncanakan dalam penulisan *lesson plan* dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid.
   c. Banyak orang tua yang melupakan perkembangan sosio-emosional siswa, padahal aspek ini akan sangat berpengaruh terhadap *learning style* siswa.

Jenis-Jenis Pengelompokan Peserta Didik

Mitchun (1960) dalam Imron (1995) mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik, yaitu *ability grouping* dan *sub grouping with in the class. Ability grouping* adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam *setting* sekolah. Sedangkan *sub grouping with in the class* adalah pengelompokan dalam *setting* kelas.

Jika peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuan, maka mereka yang pandai akan dikumpulkan dengan yang pandai pula. Sementara pengelompokan dalam *setting* kelas, peseta didik di masing-masing kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Pengelompokan ini juga memberikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk masuk ke dalam lebih dari satu kelompok yang dibentuk berdasarkan karakteristik. Dalam hal ini, terdapat berbagai kelompok kecil, yaitu

1. Pengelompokan berdasarkan minat (*interest grouping*)
   Interest grouping adalah pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik, seperti minat pada pokok bahasan, kegiatan, topik, atau tema tertentu.
2. Pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus (*special need grouping*)
   Special need grouping adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik. Maksudnya peserta didik yang telah tergabung ke dalam kelompok-kelompok tertentu dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan khusus.

3. Pengelompokan beregu (*team grouping*)
   Team grouping adalah kelompok yang terbentuk karena dua atau lebih peserta didik yang ingin bekerja dan belajar secara bersama memecahkan masalah-masalah khusus.
4. Pengelompokan tutorial (*tutorial grouping*)
   Tutorial grouping adalah peserta didik bersama-sama dengan guru merencanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya. Kegiatan dalam kelompok satu dengan yang lain dapat berbeda-beda karena mereka memiliki otonomi untuk menentukan kelompok masing-masing.
5. Pengelompokan penelitian (*research grouping*)
   Research grouping adalah pengelompokan di mana dua atau lebih peserta didik menggarap topik khusus untuk dilaporkan di depan kelas.
6. Pengelompokan kelas utuh (*full class grouping*)
   Full class grouping adalah pengelompokan di mana peserta didik secara bersama-sama mempelajari dan mendapatkan pengalaman di bidang seni.
7. Pengelompokan kombinasi (*combined class grouping*)
   Combined class grouping adalah pengelompokan di mana dua atau lebih kelas yang dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran film, slide, TV, dan media audio visual lainnya

literasi nusantara

Ragan (1966) dalam Imron (1995) mengemukakan tujuh macam pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas realitas pendidikan di sekolah sebagaimana berikut.

1. *The non grade elementary school*
   The non grade elementary school adalah sekolah dasar tanpa tingkat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individu yang tidak dibatasi dengan angkatan masuk. Maksud dari "tidak dibatasi dengan angkatan masuk" adalah peserta didik dapat mengambil mata pelajaran yang mungkin sama dengan mereka dari angkatan masuk yang berbeda. Pada sistem demikian, sistem tingkat (naik tingkat atau tidak) tidak dikenal karena adanya kelas tersebut lebih dipandang sebagai kode atau ruangan daripada tingkatan.

   Sistem pengajaran pada sistem ini menggunakan pengajaran kelompok, artinya seorang guru melayani kelompok-kelompok yang anggota kelompoknya mempunyai kemajuan, keinginan,

dan kebutuhan yang sama dari angkatan tahun yang berbeda-beda. Keuntungan sistem pengelompokan demikian adalah

a. Secara psikologis, terpenuhinya kebutuhan peserta didik karena mereka tidak dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa, tidak suka, dan tidak mampu.
b. Peserta didik tidak bosan karena pengajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuannya.
c. Peserta didik akan dibantu sesuai tingkat dan kecepatan perkembangannya.
d. Peserta didik akan puas karena peserta didik memperoleh apa yang sesuai dengan yang mereka inginkan.
e. Adanya kerja sama yang baik antara peserta didik dengan gurunya karena tidak terjadi perbedaan interpretasi.
f. Peserta didik akan merasa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.

Sistem pengelompokan ini memiliki beberapa kekurangan, yakni

a. Pengadministrasian yang sulit karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda.
b. Menyulitkan mutasi peserta didik ke sekolah lain karena adanya perbedaan sistem, misalnya peserta didik yang harus pindah ke sekolah lain yang menggunakan sistem tingkat.
c. Tidak efisien karena membutuhkan biaya, tenaga, dan ruang kelas yang banyak. Hal ini disebabkan atas dasar kelompok yang relatif lebih banyak.
d. Membutuhkan guru yang memiliki komitmen dan kecermatan tinggi sehingga ia mampu mengetahui karakteristik peserta didik secara individual.
e. Sulit mengharapkan tercapainya kompetensi yang diharapkan karena pada sistem ini segala sesuatunya bergantung kepada peserta didik.

2. Pengelompokan kelas rangkap (*Multigrade and multiage grouping*)
Multigrade dan *multiage grouping* adalah pengelompokan multi tingkat dan multi usia yang dapat terjadi pada sekolah-sekolah yang menggunakan sistem tingkat. Peserta didik yang berbeda tingkat dan usia akan dikelompokkan ke dalam tempat yang sama sehingga mereka harus berinteraksi dan belajar bersama-sama. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan sebagaimana berikut.

a. Mendorong peserta didik untuk dapat bersosialisasi dengan cepat dengan lingkungan sebayanya.
b. Peserta didik yang berada pada tingkat awal dan relatif usianya lebih muda dapat belajar banyak kepada peserta didik yang berada pada tingkat di atasnya.
c. Meningkatkan kepercayaan diri peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi pada tingkat yang lebih rendah dan usia yang lebih muda.
d. Mendorong kuatnya kompetisi peserta didik akibat adanya heterogenitas sehingga memacu mereka meningkatkan prestasinya.

Terlepas dari kelebihannya, sistem pengelompokan ini juga memiliki beberapa kekurangan berikut.

a. Peserta didik yang tingkatan dan usianya lebih rendah akan merasa dipaksakan menyesuaikan diri dengan peserta didik yang usia dan tingkatannya lebih tinggi.
b. Peserta didik yang lebih tinggi usia dan tingkatnya akan menjadi malas jika mendapati bahwa anggota kelompok lain berasal dari usia dan tingkat yang lebih rendah dengan kemampuannya yang tidak dapat membantu banyak bagi kelompoknya. Sebaliknya, jika ternyata kemampuannya lebih tinggi, maka mereka akan merasa tersaingi.

3. Pengelompokan kemajuan rangkap (*The duel progress plan grouping*)

The duel progress plan grouping adalah sistem pengelompokan kemajuan rangkap. Tujuannya untuk mengatasi perbedaan kemampuan individual di setiap umur dan tingkat. Masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Keuntungan sistem pengelompokan kemajuan rangkap adalah

a. Guru lebih mengenal peserta didiknya dan juga peserta didik semakin mengenal gurunya.
b. Layanan yang diberikan oleh guru benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.
c. Peserta didik yang tampak menonjol, bakat khususnya akan cepat maju karena secepat mungkin mendapatkan layanan dari gurunya.

Sedangkan kekurangan sistem pengelompokan kemajuan rangkap adalah

a. Peserta didik yang lebih rendah tingkatan dan usia akan merasa dipaksa menyesuaikan diri dengan peserta didik yang lebih tinggi tingkatan dan usianya.
b. Peserta didik yang lebih tinggi tingkatan dan usianya akan malas jka mendapati anggota kelompok lain tingkatan dan usia yang lebih rendah ternyata tidak dapat berbuat banyak untuk kelompoknya. Begitupun sebaliknya akan merasa tersaingi jika peserta didik yang lebih rendah tingkatan dan usianya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi.

4. Penempatan sekelompok siswa pada seorang guru (*Self contained classroom*)

   Self contained classroom adalah penempatan sekelompok peserta didik pada seorang guru. Keuntungan pengelompokan ini adalah:
   a. Guru akan mengenal peserta didik secara mendalam.
   b. Peserta didik akan lebih leluasa berpartisipasi dalam kelompoknya.
   c. Waktu yang digunakan relatif lebih fleksibel.
   d. Guru akan membantu kelompok yang menjadi tanggung jawabnya.
   e. Memungkinkan kompetisi yang sehat antara kelompok satu dengan yang lainnya.

   Sedangkan kekurangan sistem pengelompokan *self contained classroom* adalah
   a. Peserta didik hanya mendapatkan pengalaman dari seorang guru.
   b. Mengharuskan guru mengusai banyak bidang secara general.
   c. Guru terisolasi dengan teman sejawatnya karena lebih bayak berkelompok dengan peserta didik.
   d. Waktu guru lebih banyak dipergunakan untuk persiapan.

5. Pembelajaran beregu (*Team teaching*)

   Pembelajaran beregu adalah sistem pengelompokan peserta didik yang diajarkan oleh tim guru tertentu. Tim guru bertugas merancang pengajaran secara bersama-sama dengan anggota lainnya dan mengadakan pembagian yang jelas antara apa yang harus dikerjakan sendiri, dikerjakan anggota lain, dan dikerjakan bersama-sama secara tim. Dengan demikian, pengajaran menggunakan sistem ini akan mendatangkan perspektif yang lebih luas. Keuntungan sistem *team teaching* adalah

literasi nusantara

a. Guru menjadi ahli dalam bidangnya karena terus-menerus mengembangkan speasialisasinya bersama guru-guru lain yang terlibat dalam tim.
b. Tidak terjadi kekosongan guru karena jika salah satu guru berhalangan hadir, maka dapat diganti guru lain.

Adapun kekurangan sistem *team teaching* adalah
a. Pengajaran dapat gagal jika kerja sama antaranggota tim tidak berjalan dengan baik.
b. Banyak waktu yang digunakan untuk merencanakan kerja tim.
c. Memerlukan tempat dan ruang khusus.

6. Departementalisasi

Departementalisasi adalah sistem pengelompokan peserta didik, di mana guru hanya mengkhususkan diri pada satu mata pelajaran tertentu. Beberapa keuntungan departementalisasi adalah
a. Guru lebih kompeten mengajar karena ia mendalami hal-hal yang akan mereka ajarkan.
b. Peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dalam karena materi diberikan oleh guru yang ahli di bidangnya.

Sedangkan kekurangan sistem departementalisasi adalah
a. Berpeluang terjadinya jam kosong jika guru lain berhalangan hadir sebab mereka tidak dapat digantikan karena hanya terfokus pada satu mata pelajaran.
b. Menyebabkan guru malas belajar karena merasa ahli di bidangnya.
c. Guru menganggap bahwa keahliannya lebih penting dibanding keahlian orang lain.

7. Pengelompokan berdasarkan kemampuan (*ability grouping*)

Ability grouping adalah sistem pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Mereka yang memiliki kemampuan sama akan ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Jika sistem ini digunakan, maka kita akan memperoleh keuntungan berikut
a. Guru mudah menyesuaikan pengajarannya dengan kemampuan peserta didik.
b. Peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih tinggi tidak merasa perkembangannya terhambat oleh peserta didik yang berkemampuan rendah.
c. Peserta didik yang mempunyai kemampuan sama dapat saling mengisi dan membantu perkembangan kemampuan mereka.

d. Peserta didik berkemampuan rendah tidak merasa tertinggal dengan anggota kelompoknya.

Sementara itu, kelemahan sistem *ability grouping* adalah

a. Guru harus membuat persiapan yang berbeda-beda, ada rancangan pengajaran yang dikhususkan untuk siswa berkemampuan rendah dan tinggi.
b. Peserta didik merasa terganggu privasinya jika dimasukkan ke dalam kelompok inferior.
c. Peserta didik yang masuk ke dalam kelompok superior merasa dirinya lebih dan sombong.

Ny. Pakasi dalam Imron (1995: 86) mengelompokkan peserta didik berdasarkan prestasi belajarnya di kelas yang disebut dengan *achievement grouping*. Pengelompokan ini didasarkan pada prestasi belajarnya di dalam kelas. Peserta didik yang berprestasi tinggi akan dikelompokkan dengan peserta didik berprestasi tinggi pula, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, ada tiga macam pengelompokan, yaitu kelompok peserta didik yang cepat berpikir, yang sedang, dan yang lamban belajar.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

literasi nusantara

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini berupaya mendeskripsikan aktivitas guru dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran agar dapat mencapai KD yang telah dijabarkan dalam silabus. Namun, banyak guru yang mengaku tidak mengetahui cara membuat RPP. Padahal, RPP selalu dijadikan pegangan guru ketika mengajar. Maka, dapat disimpulkan bahwa guru yang tidak dapat membuat RPP, kemungkinan tidak mengetahui arah pembelajaran dan tidak dapat mencapai tujuan dengan maksimal.

Komponen RPP

Komponen-komponen dalam RPP telah diuraikan dalam Permendiknas No. 41 2007 yang isinya sebagai berikut.

1. Identitas mata pelajaran meliputi**:**
   a. satuan pendidikan;
   b. kelas;

c. semester;
d. program studi;
e. mata pelajaran atau tema pelajaran; dan
f. jumlah pertemuan.

2. Standar kompetensi
   Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
3. Kompetensi dasar
   Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi.
4. Indikator pencapaian kompetensi
   Perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5. Tujuan pembelajaran
   Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6. Materi ajar
   Memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
7. Alokasi waktu
   Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
8. Metode pembelajaran
   Metode pembelajaran digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

literasi nusantara

9. Kegiatan pembelajaran
   a. Pendahuluan
      Pendahuluan merupakan kegiatan awal atau pembuka dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
   b. Kegiatan inti
      Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, kolaborasi, dan konfirmasi.
   c. Penutup
      Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, serta umpan balik dan tindak lanjut.
10. Penilaian hasil belajar
    Prosedur serta instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang mengacu pada standar penilaian.
11. Sumber belajar
    Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

literasi nusantara

Langkah-Langkah Penyusunan RPP

Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan langkah-langkah yang telah diuraikan oleh Permendikbud No. 81 A 2013 tentang Pedoman Umum Pembelajaran yang meliputi: (1) mengkaji silabus, (2) mengidentifikasi materi pembelajaran, (3) menentukan tujuan, (4) mengembangkan kegiatan pembelajaran, (5) penjabaran jenis penilaian, (6) menentukan alokasi waktu, dan (7) menentukan sumber belajar. Namun secara umum, RPP disusun sesuai langkah-langkah berikut.

1. Mencantumkan identitas
   Identitas RPP mencakup: nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
   a. RPP boleh disusun untuk satu Kompetensi Dasar (KD)
   b. Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator dikutip dari silabus dan merupakan alur pikir yang saling terkait.
   c. Indikator merupakan ciri perilaku (bukti terukur) yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar.
   d. Penanda pencapaian kompetensi dasar ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
   e. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
   f. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.
   g. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
   h. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan (contoh: 2 x 40 menit).
2. Merumuskan tujuan pembelajaran
   Tujuan pembelajaran adalah *output* (hasil langsung) dari satu paket kegiatan pembelajaran. Jika pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, maka tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga setiap pertemuan dapat membuahkan hasil.
3. Menentukan materi pembelajaran
   Menentukan materi berfungsi untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran. Dalam hal ini, penentuan materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator.
4. Menentukan metode pembelajaran
   Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada bagian ini dicantumkan:
   a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, saintifik, dan sebagainya.

literasi nusantara

b. Metode yang digunakan, seperti ceramah, inkuiri, discovery, observasi, diskusi, *e-learning,* dan sebagainya.

5. Menetapkan kegiatan pembelajaran

Untuk mencapai kompetensi dasar, langkah-langkah yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah

a. Kegiatan pendahuluan

Kegiatan ini adalah langkah awal yang dilakukan setiap akan memulai proses pembelajaran untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik agar berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

b. Kegiatan inti

Kegiatan ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengonstruksi ilmu sesuai dengan skemata (*frame work*) masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator.

c. Kegiatan penutup

Kegiatan penutup adalah akhir dari aktivitas pembelajaran yang dikemas dengan membuat rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi hasil belajar peserta didik, serta tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk remidi atau pengayaan yang pengerjaannya dapat dilakukan di luar kelas atau di rumah.

literasi smart

Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih dan menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan.

6. Memilih sumber belajar

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar ini mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan ajar. Dalam RPP, sumber belajar ini dituliskan lebih operasional dan dinyatakan langsung tentang bahan ajar yang digunakan.

7. Menentukan media pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, misalnya media cetak (modul, LKS, dll), audio (siaran radio, lagu, dll),

audio visual (film, video, dll), *e-learning*, dan sebagainya

8. Menentukan penilaian
   Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi terkait hasil belajar setiap peserta didik untuk memutuskan tindakan belajar. Penentuan penilaian ini disesuaikan dengan instrumen yang digunakan selama proses belajar.

Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP

Permendiknas No. 41 2007 telah menguraikan prinsip-prinsip pengembangan RPP sebagai berikut.

1. Memperhatikan perbedaan peserta didik
   RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
   Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, kemandirian, dan semangat belajar.
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
   Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
   RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial.
5. Keterkaitan dan keterpaduan
   RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
   RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

literasi nusantara

literasi
nusantara

4
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Landasan Kurikulum 2013

Pemberlakuan kurikulum 2013 didasari oleh beberapa Peraturan Mendikbud sebagaimana berikut.

1. Permendikbud No. 54 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
2. Permendikbud No. 65 2013 tentang Standar Proses.
3. Permendikbud No. 66 2013 tentang Standar Penilaian.
4. Permendikbud No. 67 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SD-MI.
5. Permendikbud No. 68 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMP-MTs.
6. Permendikbud No. 69 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA.
7. Permendikbud No. 70 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-MAK.
8. Permendikbud No. 71 2013 tentang Buku Teks Pelajaran.

Kurikulum 2013 dan Kesiapan Guru dalam Mengajar

Perubahan dan pengembangan kurikulum selalu memunculkan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan yang mencoba mengimplementasikannya. Menurut Samsudi (2009), pengembangan dan pembaharuan kurikulum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan segala dimensinya. Demikian pula perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 merupakan proses dinamis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Kastawi,

Widodo dan Mulyaningrum, 2017). Pendidikan hendaknya mampu melahirkan lapisan masyarakat yang terdidik dan menjadi kekuatan yang merekatkan unit-unit sosial di dalam masyarakat (Irianto, 2011: 5).

Dalam hal ini, pemerintah berupaya melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan memberlakukan Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan KTSP. Kurikulum 2013 ini, menuntut para guru agar menerapkan pembelajaran berbasis tematik integratif (Wangid, Mustadi, Erviana, dan Arifin, 2014). Metode tematik integratif tersebut membuat siswa turut aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan. Tema-tema tersebut nantinya akan menjadi konsep dasar yang utuh sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar secara terpisah. Melalui konsep tersebut, peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan pendidikan yang terjadi untuk mencapai keberhasilan dalam keseluruhan proses belajarnya. Proses penyesuaian tersebut tentu memerlukan bantuan dari pendidik sebab jika mereka tidak mendapat bimbingan yang cukup, maka akan memunculkan kesulitan belajar (Lestari, Meter, dan Negara, 2015). Kurikulum ini menerapkan pembelajaran yang tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada aktivitas siswa (Sinambela, 2013). Selain itu menurut Sutjipto (2014), kurikulum 2013 tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan dan pengetahuan yang bermuara para kreativitas dan kompetensi siswa dalam memahami ilmu pengetahuan dan sains yang berpijak pada mengobservasi lingkungan, memilah, meneliti alam sekitar, dan berinovasi melahirkan hal-hal baru, tetapi juga menitikberatkan pada penanaman moralitas dan budi pekerti ke dalam diri mereka yang berbuah pada sikap akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat nantinya.

Perubahan kurikulum ini membuat guru harus mempersiapkan ulang metode, pendekatan, bahan ajar, dan kebutuhan belajar lainnya sesuai kurikulum baru. Tampaknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Misalnya di Selandia Baru, para guru sejarah harus bekerja keras untuk mempersiapkan materi baru ketika terjadi perubahan kebijakan terkait mata pelajaran sejarah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 (Kastawi dkk, 2017). Pentingnya pemahaman konsep bagi siswa dan masih banyaknya

literasi nusantara

kesulitan yang dihadapi para siswa membuat perlu untuk melakukan analisis lebih mendalam.

Diketahui bahwa sebagian guru belum siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 sebab kurang memahami hakikat kurikulum. Hal tersebut terjadi karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan kabupaten, kota, bahkan pemerintahan di level nasional tidak mendesain bahan pelatihan dengan baik. Beberapa guru menyatakan bahwa pelatihan diselenggarakan secara asal-asalan, misalnya waktu pelaksanaan pelatihan sering dipadatkan atau dilakukan hingga malam hari dan keesokannya (Machali, 1970).

Selanjutnya, implementasi Kurikulum 2013 ini juga kurang mendapat dukungan dari warga sekolah sebab mereka belum mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menyukseskan pengimplementasian kurikulum ini. Oleh karena itu, menurut mereka perlu dilakukan pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, dan tenaga administrasi mengenai Kurikulum 2013. (Machali, 1970). Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa Kurikulum 2013 diterapkan di semua jenjang pendidikan secara bertahap, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk itu. Terlihat mulai 2014, pemerintah daerah telah mengajukan dana untuk menyelenggarakan pelatihan guru dan pengadaan buku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada 2015 dan 2016, anggaran untuk implementasi Kurikulum 2013 semakin besar karena peserta yang akan dilatih dan pengadaan buku juga semakin banyak. Bahkan di beberapa kabupaten, anggaran pada 2015 dan 2016 telah dialokasikan untuk mendampingi guru-guru ketika mengajar di kelas dalam rangka mengevaluasi apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Kurikulum 2013 atau belum (Machali, 1970).

literasi nusantara

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 di lapangan, yaitu (1) penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Kurikulum 2013, (2) koordinasi yang baik dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengadaan sarana pembelajaran, pelatihan, serta perencanaan yang baik, dan (3) ketersediaan sarana pembelajaran lainnya, seperti LCD dan internet. Meski kurikulum 2013 telah diimplementasikan dan berjalan dengan efektif, tetapi tetap memunculkan beberapa kendala, seperti pendekatan tematik tidak sesuai dengan mata pelajaran, banyaknya penambahan materi tetapi alokasi

waktu sedikit, banyaknya kesalahan pada isi Kurikulum 2013, dan keterlambatan buku siswa dan buku guru (Machali, 1970).

Berbagai Masalah dalam Penerapan Kurikulum 2013 Beserta Solusinya

Masalah-Masalah yang Timbul saat Kurikulum 2013 Diimplementasikan

Implementasi Kurikulum 2013 menyisakan berbagai persoalan yang harus segera ditangani agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Persoalan-persoalan yang muncul selama pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah

1. Guru sebagai manajer di kelas belum memahami dengan benar implementasi kurikulum 2013 yang seharusnya. Meskipun para guru telah memperoleh banyak pelatihan, tetapi mereka belum mampu memahami dan menangkap informasi dengan baik.
2. Kurangnya buku panduan pelajaran dari pemerintah pusat, bahkan di beberapa sekolah menengah pertama yang menjadi pilot projek penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Tegal (dan mungkin di kabupaten lainnya di Indonesia), hanya mendapat dua buku panduan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak sekolah mengunduh buku panduan dari internet dan memperbanyaknya.
3. Buku pegangan siswa yang idealnya juga dimiliki dengan komposisi satu buku satu siswa juga belum disediakan dengan cukup. Kondisi tersebut memaksa sekolah untuk melakukan pengadaan buku dengan penggandaan yang tentunya membutuhkan biaya tambahan.
4. Terdapat beberapa daerah yang memaksakan diri dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Sebagai contoh Kota Tegal pada tahun pelajaran 2013/2014 secara serentak mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan misalnya mahalnya biaya pengadaan buku. Masalah ini menjadi lebih runyam manakala siswa diwajibkan untuk membeli buku sendiri (citra sekolah terkesan mahal).
5. Tidak ada kajian terhadap penerapan KTSP yang mendeskripsikan pentingnya lembaga pendidikan untuk memperbarui kurikulum sekolah ke Kurikulum 2013.
6. Dalam kurun waktu satu tahun, tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah diimple

literasi nusantara

mentasikan di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

7. Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah pada Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014 yakni enam hari sebelum pelantikan presiden baru. Poin ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 159 2014 Pasal 2 Ayat 2 bahwa evaluasi kurikulum untuk mendapatkan informasi mengenai: kesesuaian antara ide kurikulum dan desain kurikulum; kesesuaian antara desain kurikulum dan dokumen kurikulum; kesesuaian antara dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum; dan kesesuaian antara ide kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum.
8. Kenyataannya Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum.
9. Penyeragaman tema di seluruh kelas, metode, isi pembelajaran, dan buku yang bersifat wajib bertentangan dengan UU Sisdiknas.
    a. Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak saksama menyebabkan ketidakselarasan.
    b. Kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan sehingga menganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan serta beban administratif berlebihan bagi para guru.
    c. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa.
    d. Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di dalam dan luar sekolah.
    e. Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan, dan peredaran buku sehingga memicu munculnya berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan atau ketiadaan buku.
    f. Berganti-gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang berulang.

literasi nusantara

Solusi bagi Permasalahan yang Timbul

Semua orang tentu bisa menjadi guru, tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik memerlukan pelatihan dan pengalaman. Untuk itu menurut Suyanto dan Asep (2013: 7), seorang guru harus memiliki standar minimal: 1) intelektual yang baik, 2) mampu

memahami visi dan misi pendidikan nasional, 3) memilki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya secara efektif, 3) memahami konsep perkembangan psikologi anak, 4) mampu mengorganisir proses pembelajaran, dan 5) memiliki kreativitas dan seni mendidik.

Jadi, di samping harus memahami dirinya sendiri, siswa, dan masyarakat, maka guru pun harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berkenaan dengan fungsi pengajaran. Tentu saja kemampuan kepribadian, sikap, dan hubungan sosialnya dengan orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar merupakan syarat mutlak di samping kemampuan profesional tersebut. Pada kenyataannya karena adanya perbedaan kemampuan dan pengetahuan guru, belum semua guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengamati fenomena yang terjadi terkait dengan materi pelajarannya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Oleh karena itu, sangat perlu bagi masing-masing sekolah mengadakan kegiatan:

1. *Lesson study* atau *workshop* tentang cara mengajar yang dimaksudkan oleh Kurikulum 2013. Menurut Sudrajat (2008), *lesson study* merupakan salah satu upaya meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dengan berkolaborasi, guru mampu mengembangkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana membelajarkan siswa. Selain itu melalui *lesson study* guru memperoleh pengetahuan dari guru lainnya atau narasumber. Hal ini diperoleh melalui adanya umpan balik dari anggota *lesson study s*ehingga kemampuan guru semakin hari semakin bertambah, baik dengan mengaplikasikan contoh yang kemudian dikritisi ataupun dari memperhatikan contoh kemudian mengkritisi.
2. Pertemuan antara sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Pertemuan ini mengumpulkan semua perwakilan sekolah yang ditunjuk melaksanakan Kurikulum 2013 untuk mengevaluasi tahap awal penerapan pola pembelajaran baru dalam sebulan terakhir. Pertemuan ini penting sebab sebagian sekolah merasa mampu menerapkan kurikulum baru dengan baik, tetapi sebagian lainnya merasa kesulitan. Dengan adanya forum ini, akan terjalin tukar-menukar pengalaman tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 di masing-masing sekolah.

literasi nusantara

3. Melengkapi sarana dan prasarana serta media pembelajaran sebagai penunjang pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013.
4. Pelatihan dan pengenalan guru terhadap kemajuan ilmu dan teknologi karena tidak menutup kemungkinan masih ada guru yang belum memahami cara penggunaan media sebagai alat bantu untuk memudahkan peserta didik menyerap ilmu pengetahuan.

Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Sering kali kita temui orang-orang yang senang mengkritisi pekerjaan orang lain layaknya komentator sepak bola yang tugasnya mengomentari kekurangan dan peluang-peluang dalam setiap pertandingan. Sikap tersebut tentu harus dihindari oleh guru sebagai teladan di sekolah. Sebelum mengkritisi dan mengomentari orang lain, ada baiknya jika kita mengetahui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai seorang guru, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga evaluasi kinerja.

Tupoksi guru yang paling utama berkaitan dengan pembelajaran, yakni merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai atau memonitor hasil pembelajaran. Oleh karena itu, ada tiga tugas utama yang harus dilakukan setiap guru, baik guru senior maupun guru pemula, yakni

literasi

1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, kompetensi, dan karakter yang akan dibentuk serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran.
2. Pelaksanaan atau implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas

khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam fungsi manajerial, pelaksanaan proses pembelajaran selain tercakup fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi kepemimpinan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dubrin (1990) bahwa fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang memengaruhi pihak lain dalam upaya mencapai tujuan yang melibatkan berbagai proses antarpribadi, misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi pribadinya secara optimal.

3. Pengendalian atau disebut pula evaluasi bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

Pembelajaran dapat dikatakan efektif dan efisien apabila berhasil mencapai dan merealisasikan hasil yang diharapkan serta membentuk kompetensi dan karakter sesuai KI dan KD. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sistem pembelajaran sebagai keseluruhan proses untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif dan melakukan pengembangan program serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program, guru hendaknya tidak membatasi diri pada pembelajaran dalam arti sempit, tetapi harus menghubungkan program-program pembelajaran dengan seluruh kehidupan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dunia usaha serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pengembangan program juga harus dilakukan secara adaptif, fleksibel, dan situasional agar senantiasa dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Hal ini penting karena guru merupakan seorang manajer pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perubahan dan perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut sedikitnya ada empat langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan

literasi nusantara

perencanaan program, memilih dan melaksanakan program serta memonitor, dan mengevaluasi perubahan program.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi guru, maka diperlukan kompetensi. Artinya, tupoksi dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang oleh kompetensi yang memadai serta mengacu pada kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Dalam hal ini kompetensi guru menunjuk kepada performansi dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performansi merupakan perilaku nyata yang tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis, dan memikirkan serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah titik akhir dari suatu upaya, melainkan proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*life long learning process*).

literasi nusantara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sejalan dengan hal tersebut, Finch and Crunkilton (1992: 220) mengemukakan bahwa: "*Competencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciation that are deemed critical to successful employment*—Kalimat tersebut mengandung makna bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, nilai dan apresiasi yang diungkapkan secara kritis untuk keberhasilan kerja." Dengan demikian, kompetensi merupakan perpaduan antara sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang diterapkan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, emosional, dan spiritual yang secara kaffah membentuk standar profesi yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Penguasaan

materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler serta pemahaman manajemen pembelajaran. Hal ini menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah. Dengan menguasai materi pembelajaran guru dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan alternatif strategi dari berbagai sumber belajar yang mendukung pembentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD).

Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran. Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sekelompok individu yang memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan jumlahnya. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh para guru menjadi prasyarat dalam pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian.

literasi kemdikbud

Upaya memfasilitasi perkembangan setiap aspek kepribadian dalam pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada pembentukan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bertakwa, bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab. Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap, dan kemampuan mengaktualisasi diri serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka dan kritis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakukan pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya

sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertakwa serta sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan keempat standar kompetensi guru tersebut perlu didasarkan pada landasan konseptual, teoretik, dan peraturan perundangan yang berlaku; landasan empirik dan fenomena pendidikan yang ada, kondisi, strategi, dan hasil di lapangan serta kebutuhan stakeholders. Standar kompetensi guru merupakan jabaran tugas dan fungsi guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran serta mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan KI dan KD. Selanjutnya, standar kompetensi harus dijabarkan ke dalam indikator standar kompetensi: rumpun kompetensi, butir dan indikator kompetensi, serta pengalaman belajar dan asesmen sebagai tagihan konkret yang dapat diukur dan diamati untuk setiap indikator kompetensi.

Dalam perkembangannya pemerintah merumuskan empat kompetensi guru, yakni: 1) kompetensi profesional, 2) kompetensi pedagogik, 3) kompetensi kepribadian, dan 4) kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut meskipun secara teoretis konseptual dapat dikaji secara terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi dalam pelaksanaannya menyatu membentuk kepribadian guru yang satu sama lain saling terintegrasi membentuk pribadi guru. Seperti dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru, antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

literasi nusantara

Permasalahan Kurikulum di Indonesia

Banyaknya permasalahan kurikulum di Indonesia turut memengaruhi pelaksanaan pembelajaran. Berikut beberapa masalah kurikulum menurut sudut pandang penulis.

1. Kurikulum Indonesia relatif kompleks
   Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Tentu kompleksnya kurikulum akan berakibat bagi guru dan siswa. Bagi

peserta didik: mereka akan terbebani dengan banyaknya materi yang harus dikuasai, mereka berupaya memahami dan mengejar materi yang telah ditargetkan. Tuntutan tersebut membuat peserta didik tidak fokus dan kurang memahami semua materi yang diajarkan. Selain itu, pengetahuannya akan sangat terbatas dan kurang mengeluarkan potensinya serta daya saing antara peserta didik yang datu dengan yang lainnya akan berkurang. Sementara bagi guru: Tugasnya semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran; mereka akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan.

Kurikulum di Indonesia yang cenderung fokus pada kemampuan intelektual dan kurang mendukung perkembangan bakat setiap peserta didik. Namun, jika kita perhatikan, maka sistem pendidikan kita tidak jauh berbeda dengan negara lain. Hanya saja negara lain berhasil mengimplementasikan kurikulum dengan baik, sedangkan di Indonesia hanya sekadar aturan, contohnya kebijakan sekolah gratis tidak diterapkan dengan baik sehingga banyak anak yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan sebab biaya yang sangat mahal.

2. Kecenderungan berganti nama
   Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan, tetapi hanya sebatas perubahan nama. Tanpa mengubah esensi kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Bahkan pengubahan nama kurikulum mampu disajikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengubahan nama kurikulum tentu memerlukan dana yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan.
3. Kurangnya sumber prinsip pengembangan
   Kurikulum tentu dikembangkan berdasarkan sumber prinsip untuk menunjukkan asal mula lahirnya prinsip pengembangan kurikulum, seperti data empiris (pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif), data eksperimen (temuan hasil penelitian), cerita/legenda yang hidup di masyarakat (*folklore of curriculum*), dan akal sehat (*common sense*). Namun faktanya, data hasil penelitian (*hard data*) sangat bersifat terbatas. Ada banyak data yang bukan diperoleh dari hasil penelitian dan terbukti

efektif untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks di antaranya adat kebiasaan hidup di masyarakat (*folklore of curiculum*) dan ada pula hasil pemikiran umum atau akal sehat (*common sense*).

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan, tentu ada solusi yang dapat digunakan untuk memecahkannya seperti solusi berikut.

1. Mengubah paradigma dari pengajaran berbasis sistematik-materialistik menjadi religius. Solusi ini akan mengurangi kemerosotan moral, bahwa tidak ada lagi siswa cerdas yang tidak bermoral.
2. Mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.
3. Melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah-sekolah terpencil sehingga tidak ada lagi peserta didik yang terbelakang.
4. Menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin.
5. Membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

literasi
nusantara

literasi
nusantara

5
TAHAPAN MANAJEMEN KURIKULUM

Kurikulum yang dipertimbangkan dengan baik dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa dan disusun berdasarkan situasi serta kondisi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses kependidikan di lembaga. Segala hal yang harus diketahui dan diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik harus dijabarkan dalam kurikulum karena satuan pendidikan yang baik akan menjalankan kurikulum dengan tetap memperhatikan semua lapisan kependidikan. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Namun, hal yang selalu menjadi persoalan adalah bagaimana strategi yang harus dijalankan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Maka, guru didorong untuk terus menyempurnakan strategi tersebut. Pengelolaan kurikulum di sekolah harus dijalankan melalui beberapa tahapan. Nanang Fattah mengimplementasikan kurikulum dengan empat tahapan, yakni perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi.

Perencanaan

Pada tahap ini, kurikulum perlu dijabarkan hingga menjadi rencana pencapaian. Perencanaan merupakan proyeksi tentang apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dengan berbagai pertimbangan sistemik, terarah, dan disengaja. Tujuan perencanaan adalah mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Tentu perencanaan harus disusun

sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya sebab tahap ini adalah menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Pada dasarnya, perencanaan adalah proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut prediposisi mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Hal ini merupakan tindakan kognitif sesuai dengan permintaan perencanaan.

Tahap ini juga perlu dijabarkan menjadi Rencana Pembelajaran (RP). Guru melakukan persiapan yang komprehensif sebelum mengajar di kelas, mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode yang akan digunakan, media dan alat yang mendukung proses pembelajaran, buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang akan diterapkan. Kegiatan perencanaan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan merupakan penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam perencanaan kurikulum terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Menurut Teguh (2015), aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum adalah

1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas, berisi hal-hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan serta kebutuhan dasar manusia.
2. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif dengan mempertimbangkan dan mengoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif.
3. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik untuk membantu mereka menuju kehidupan yang kondusif.
4. Tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat.
5. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif.

literasi nusantara

6. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini para pendidik berkewajiban untuk memberitahukannya.
7. Dengan keahlian profesional, para pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini, masyarakat diperbolehkan memberikan saran, tetapi keputusan akhir ada pada pendidik.
8. Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan bersama-sama sebab unsur kurikulum yang beragam menuntut keahlian secara luas.
9. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Berkaitan dengan hal ini kurikulum harus terdiri atas integrasi berbagai pengalaman yang relevan.
10. Program sekolah harus dirancang untuk mengoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan.
11. Masing-masing sekolah mengembangkan dan memperluas struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum.
12. Perlunya penelitian tindakan dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum.
13. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum terutama kegiatan belajar mengajar yang spesifik.
14. Harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum juga meliputi analisis terhadap proses dan konten pembuatan kurikulum.
15. Berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi hendaknya merespons dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Untuk itu, perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.

Sedangkan asas yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum menurut Rusman (2009), yaitu

1. Objektivitas
   Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

literasi nusantara

2. Keterpaduan
   Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, seperti keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.
3. Manfaat
   Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Efisiensi dan efektivitas
   Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dalam mencapai tujuan serta hasil pendidikan.
5. Kesesuaian
   Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan IPTEK, dan perubahan atau perkembangan masyarakat.
6. Keseimbangan
   Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, dan antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan.
7. Kemudahan
   Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
8. Berkesinambungan
   Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
9. Pembakuan
   Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan sejak dari pusat sampai daerah.
10. Mutu
    Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

Perencanaan kurikulum memerlukan kerangka kerja umum agar tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Kerangka ini berisi semua interelasi yang terdapat dalam perencanaan kurikulum, seperti model, ide, dan harapan sebuah perencanaan kurikulum. Berdasarkan pemikiran dan teori Tyler (1950), Henrick (1950), Edward King (1950,

literasi nusantara

1957), dan Robert Harnack (1968), kerangka kerja perencanaan kurikulum dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Fondasi
   Pendidikan berdasarkan tiga daerah fondasi yang luas, yakni filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Sedangkan perencanaan kurikulum berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut.
2. Tujuan (*Goals*)
   Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan tiga daerah fondasi tersebut, tujuan umum (*goals*) menyajikan hal-hal yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah (nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan masyarakat luas). Rumusan tujuan merefleksikan tingkat atau daerah yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, tujuan tingkat nasional adalah memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal dan sebaliknya. Masalahnya perencanaan kurikulum yang spesifik tidak mempertimbangkan rumusan tujuan yang luas atau rumusan tujuan umum berkelanjutan.
3. *General objectivies*
   Tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa (dari anak-anak sampai dewasa) sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut.
4. *Decision Screen*
   Guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan lima daerah yang akan memengaruhi keputusan mereka, yakni
   a. karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum;
   b. refleksi prinsip-prinsip belajar;
   c. sumber-sumber umum penunjang;
   d. jenis pendekatan kurikulum (terpisah, terkorelasi, dan sebagainya); dan
   e. pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar-mengajar.
5. Komponen perencanaan kurikulum
   Komponen perencanaan kurikulum terdiri atas:
   a. perumusan tujuan belajar atau hasil tujuan yang digunakan;
   b. konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubungan

literasi nusantara

dengan tujuan;
c. kegiatan yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan;
d. sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan; dan
e. alat pengukuran untuk menentukan derajat pencapaian tujuan.

Secara umum, perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan (Taba dalam Saylor dkk, 1981). Dalam hal ini, siswa memiliki dua kemungkinan, yakni meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun ke dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus memperhatikan faktor tujuan, konten, kegiatan (aktivitas), sumber yang digunakan dan instrumen evaluasi (pengukuran).

1. Tujuan
   Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. Sumber dari tujuan ini adalah sumber empiris, filosofis, sumber mata pelajaran, konsep kurikulum, analisis situasional, dan tekanan pendidikan. Implikasi tujuan (*objective*) adalah (a) pengertian tentang arah (sasaran) bagi setiap orang yang tertarik dengan proses pendidikan, seperti siswa, guru, administrator, orang tua, penilik, pengawas, dan sebagainya; (b) basis perencanaan kurikulum yang rasional dan logis; serta (c) memberikan bisnis untuk penilaian siswa.
2. Konten
   Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiakan dengan mata pelajaran. Pemilihan isi menekankan pada pendekatan mata pelajaran (pengetahuan) atau proses (keterampilan). Untuk itu, kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan isi kurikulum ini adalah: (a) signifikansi ialah seberapa penting isi kurikulum pada suatu disiplin atau tema studi; (b) validitas yang berkaitan

literasi nusantara

dengan keotentikan dan keakuratan isi kurikulum tersebut; (c) relevansi sosial adalah keterkaitan isi kurikulum dengan nilai moral dan cita-cita, permasalahan sosial, isu kontroversial, dan sebagainya untuk menjadikan siswa anggota efektif dalam masyarakat, (d) *utility* atau kegunaan (daya guna) berkaitan dengan kegunaan isi kurikulum dalam mempersiapkan siswa menuju kehidupan dewasa; (e) *learnability* atau kemampuan untuk dipelajari berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami isi kurikulum; dan (f) minat yang berkaitan minat siswa terhadap isi kurikulum tersebut.

3. Aktivitas belajar

   Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan kepada peserta didik dalam situasi belajar-mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan peserta didik memperoleh muatan yang ditentukan sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum dapat tercapai. Berkaitan dengan aktivitas belajar, harus diperhatikan pula strategi efektif belajar-mengajar yang dikelompokkan sebagaimana berikut.

   a. Pengajaran ekspositori

      Pengajaran ekspositori atau penjelasan rinci melibatkan pengiriman informasi dalam arah tunggal dari suatu sumber ke peserta didik. Contoh pengajaran ini adalah ceramah, demonstrasi, tugas membaca dan presentasi audio visual.

   b. Pengajaran interaktif

      Pada hakikatnya pengajaran ini sama dengan pengajaran ekspositori. Namun, dalam pengajaran interaktif ada dorongan yang disengaja ketika terjadi interaksi antara guru dan peserta didik yang biasanya berbentuk pemberian pertanyaan. Dalam pendekatan ini, peserta didik lebih aktif dan keterampilan berpikir ditingkatkan melalui unsur interaktif.

   c. Pengajaran atau diskusi kelompok kecil

      Karakteristik pokok dari strategi ini melibatkan pembagian kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja relatif bebas untuk mencapai tujuan. Peran guru berubah dari pemberi pengetahuan menjadi koordinator aktivitas dan pengarah informasi.

literasi nusantara

d. Pengajaran inkuiri atau pemecahan masalah
   Ciri utama pembelajaran inkuiri adalah aktifnya peserta didik ketika menjawab pertanyaan dan menyelesaikan persoalan dari guru. Pembelajaran ini melibatkan peserta didik dengan aktivitas yang dilaksanakan secara bebas, berpasangan, atau dalam kelompok yang lebih besar.
e. Strategi belajar mengajar lainnya
   Strategi belajar lainnya adalah *cooperative learning*, *community service project*, *mastered learning*, dan *project approach*.

4. Sumber
   Sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, antara lain buku dan bahan tercetak, perangkat lunak komputer, film dan kaset video, kaset, televisi dan proyektor, CD ROOM interaktif, dan sebagainya masih banyak lagi.
5. Evaluasi
   Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terbuka. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Alat instrumen yang dapat digunakan pendidik dalam proses evaluasi adalah
   a. tes standar;
   b. tes buatan guru;
   c. sampel hasil karya;
   d. tes lisan;
   e. observasi sistematis;
   f. wawancara;
   g. kuesioner;
   h. daftar cek dan skala penilaian;
   i. kalkulator anekdotal serta; dan
   j. sesiogram dan pelaporan.

   Selain itu, dalam evaluasi kurikulum terdapat prosedur yang harus diikuti sebagaimana berikut.
   a. Penanda evaluasi sebagai pemecahan terhadap konteks ukur.
   b. Spesifikasi tugas yang menggambarkan cakupan evaluasi.
   c. Desain evaluasi sebagai penyusunan pelaksanaan untuk melaksanakan evaluasi.
   d. Pengumpulan data untuk memperoleh data, baik dari sumber data yang ada maupun menggunakan teknik yang

literasi nusantara

dirancang dalam tahapan desain.

e. Analisis data sebagai analisis, sintesis, dan interpretasi data seperti yang diatur dalam tahapan desain.
f. Penentuan akhir untuk mempersiapkan kesimpulan yang didasarkan pada hasil dan persiapan laporan.
g. Menghadirkan kesimpulan dan rekomendasi pada audiens.

Pengorganisasian

Menurut Ahmad (1998:114), pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara struktural dalam konteks manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademik. Kata 'organisasi' mengandung makna bahwa kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka dari atau terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin/diperintah oleh seorang pimpinan atau staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Kemudian, Nasution (1982: 135) menyatakan bahwa organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Sedangkan Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Burhan Nurgiyantoro (1988) mengatakan bahwa organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Adapun Soekarno K. mengungkapkan bahwa organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Lalu, organisasi kurikulum menurut Muhaimin (1991) adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan. Manullang mengatakan organisasi dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan. Pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama dengan efektif untuk pencapaian tujuan.

Suryobroto (1990: 71) mengartikan bahwa kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik di dalam kelas maupun luar sekolah. Sementara Soetopo (1982: 59) menyatakan bahwa kurikulum sebagai semua kegiatan yang

diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Lalu, Rumsan (2009: 60─61) memaknai organisasi kurikulum sebagai pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya mempermudah siswa ketika mempelajari materi dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan peserta didik dapat tercapai dengan efektif.

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta iptek. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan peserta didikan, sebab menentukan isi bahan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik serta peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam aplikasinya pada kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat menggairahkan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari agar tujuan peserta didik dapat tercapai (Syaodih, 1997: 82).

Organisasi kurikulum merupakan susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, organisasi kurikulum juga berhubungan dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Dengan demikian, organisasi kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi kurikulum, antara lain

1. Konsep merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala; konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati; konsep menentukan variabel mana yang kita inginkan untuk menentukan adanya hubungan empiris.
2. Generalisasi adalah kesimpulan dari kristalisasi suatu analisis.
3. Keterampilan ialah kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan.

4. Nilai-nilai merupakan norma atau kepercayaan yang diagungkan; nilai adalah sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku.

Mengorganisasikan unsur-unsur berarti memilih tujuan yang jelas dan objektif serta sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jika tujuan kurikulum berkaitan dengan masalah teknis dan kejuruan, maka keterampilan adalah unsur yang tepat untuk dipergunakan. Jika tujuan kurikulum berkaitan dengan domain moral dan etika sebagai fungsi yang integratif, maka nilai-nilai merupakan unsur organisasi yang tepat (Arifin, 2012: 94).

Adapun menurut Nasution dalam Nurdin dan Usman B. M. (2003: 44), jika dilihat dari organisasi kurikulum, maka ada tiga tipe kurikulum, yakni *separated subject curriculum, correlated curriculum,* dan *integrated curriculum.*

1. *Separeted subject curriculum*

   Tipe ini bahkan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, artinya antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah, terlepas, dan tidak memiliki kaitan sehingga ruang lingkup beberapa mata pelajaran menjadi sempit.

Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam praktik penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat *subject centered* (berpusat pada bahan pelajaran) daripada *child centered* (berpusat pada minat dan kebutuhan anak). Dengan demikian, jelas bahwa kurikulum bentuk terpisah

sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan.

Sejak lama, kurikulum ini telah diterapkan di sekolah kita hingga munculnya kurikulum 1968 dan 1975. Kurikulum *separated subject* memiliki ciri-ciri berikut (Nasution, 1989).

a. Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri.
b. Setiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu.
c. Hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya.
d. Tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para peserta didik.
e. Bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.
f. Pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan (*imposision*) dan menciptakan perbedaan individual di kalangan para siswa.
g. Guru berperan aktif dalam pelaksanaan sistem guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur belajar aktif di kalangan peserta didik.
h. Para siswa tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif.

literasi nusantara

Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari kurikulum ini, antara lain

a. Penyajian bahan pelajaran dapat disusun secara logis dan sistematis.
b. Organisasi kurikulum *separated subject* sangat sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan serta mudah dilaksanakan.
c. Mudah dievaluasi dan diuji.
d. Kurikulum dapat digunakan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
e. Pendidik atau guru sebagai pelaksana kurikulum dalam mempergunakannya lebih mudah.
f. Tidak sulit untuk diadakan berbagai perubahan.
g. Lebih tersusun secara sistematis.

Terlepas dari kelebihannya, kurikulum *separated subject* juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti di bawah ini.

a. Bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah menjadikannya tidak relevan dengan fakta di lapangan dan tidak mendidik anak dalam menghadapi situasi kehidupan mereka.
b. Tidak memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik secara faktual dalam kehidupan sehari-hari sebab materi pelajaran hanya berpedoman pada apa yang tertera dalam buku atau teks.
c. Kurang memperhatikan faktor kejiwaan peserta didik.
d. Tujuan kurikulum ini sangat terbatas dan kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani, perkembangan emosional, dan sosial peserta didik serta hanya memusatkan pada perkembangan intelektual.
e. Kurikulum kurang mengembangkan kemampuan berpikir karena mengutamakan penguasaan dan pengetahuan dengan cara hafalan.
f. Kurikulum cenderung menjadi statis dan tidak bersifat inovatif.

2. *Corelated Curriculum*

Corelated curriculum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri-ciri atau karakteristik setiap disiplin ilmu. Hubungan (korelasi) antarmata pelajaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain

a. Insidental

   Artinya secara kebetulan ada hubungan antarmata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Sebagai contoh bidang studi IPA (sains) juga menyinggung geografi, antropologi, dan sebagainya.
b. Hubungan yang erat

   Misalnya pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam berbagai bidang studi.
c. Batas mata pelajaran yang disatukan dan difungsikan dengan cara menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran atau disebut *broad field*.

   Corelated curriculum mengenal lima macam *broad field*, yakni

a. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah peleburan dari mata pelajaran ekonomi, koperasi, sejarah, geografi, akuntansi dan sejenisnya.

literasi nusantara

b. Bahasa merupakan peleburan dari mata pelajaran membaca, tata bahasa, menulis, mengarang, menyimak, sastra, apresiasi, dan pengetahuan bahasa.
c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah peleburan dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, astronomi, dan kesehatan.
d. Matematika ialah peleburan dari aljabar, aritmetika, geometri, dan statistika.
e. Kesenian adalah peleburan dari seni tari, seni musik, seni suara, seni lukis, seni pahat, dan seni drama.

Jika *broad field curriculum* digunakan, maka kita akan merasakan kelebihan-kelebihan berikut.

a. Menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa, artinya pelajaran yang disajikan disoroti dari berbagai bidang disiplin ilmu.
b. Menumbuhkan minat siswa terhadap adanya hubungan antara berbagai bidang studi.
c. Pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan menjelaskan dari berbagai bidang studi.
d. Adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan lebih fungsional.
e. Lebih mengutamakan pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan (*knowledge*) dan penguasaan fakta.

literasi nusantara

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, *broad field curriculum* juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (a) bahan yang disajikan tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan dan minat siswa, demikian pula masalah-masalah yang dikemukakan tidak berkenaan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa; (b) pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pelajaran; (c) urusan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis; dan (d) kebanyakan di antara para guru tidak mengetahui atau kurang menguasai antardisiplin ilmu sehingga dapat menghamburkan pemahaman siswa.

Untuk mengurangi kelemahan dengan adanya keterpisahan di antara berbagai mata pelajaran tersebut diusahakan agar mata pelajaran disusun dalam pola korelasi. Terdapat tiga jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran, yani (a) korelasi faktual, misalnya sejarah dan kesusastraan. Fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga

menambah kemungkinan menikmati bacaannya oleh siswa, (b) korelasi deskriptif, hubungan ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk dua atau lebih mata pelajaran. Misalnya psikologi dapat berkorelasi dengan sejarah atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam psikologi untuk menerangkan kejadian-kejadian sosial, dan (c) korelasi normatif, hampir sama dengan korelasi deskriptif. Namun, perbedaannya terletak pada prinsipnya yang bersifat moral sosial. Sejarah dan kesusastraan dapat dikorelasikan berdasarkan prinsip-prinsip moral sosial dan etika.

3. *Integrated curriculum*

Secara istilah integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih (Wedawaty, 1990: 26). Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Poerwadarminta (1997: 326) bahwa integrasi adalah penyatuan agar menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh. Dalam *integrated curriculum,* pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu, misalnya suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Pelajaran di sekolah membantu siswa menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah. Biasanya bentuk kurikulum semacam ini dilaksanakan melalui pelajaran unit yang setiap unitnya mempunyai tujuan dan dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk pemecahan masalah, anak diarahkan melakukan kegiatan yang saling berkaitan.

literasi nusantara

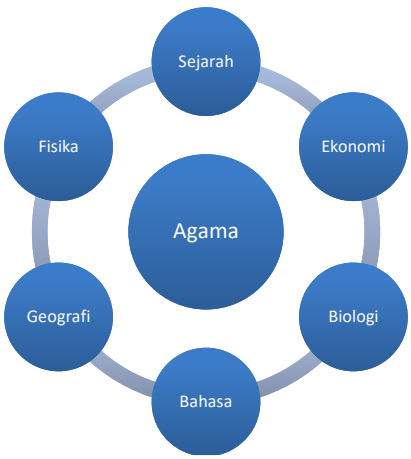

Pada skala praktis *integrated curriculum* memiliki beberapa kelebihan dan manfaat, antara lain

a. Segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat bertalian.
b. Sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar-mengajar.
c. Memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dan masyarakat.
d. Sesuai dengan ide demokrasi, di mana siswa dirangsang untuk berpikir mandiri, bekerja sendiri, memikul tanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok; dan
e. Penyajian bahan ajar disesuaikan dengan kesanggupan (kemampuan) individu, minat, dan kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok (Nurdin dan Usman B. M., 2003: 49).

Selain kelebihan sebagaimana dikemukakan di atas, *integrated curriculum* juga memiliki beberapa kelemahan, yakni

a. Guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini.
b. Organisasinya tidak logis dan kurang sistematis.
c. Terlalu memberatkan tugas-tugas guru karena bahan pelajaran yang mungkin berubah setiap tahun sehingga mengubah pokok-pokok permasalahan dan isi materi.
d. Kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum.
e. Siswa dianggap tidak mampu ikut serta menentukan kurikulum.
f. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menunjang pelaksanaan kurikulum tersebut (Nurdin dan Usman, B. M., 2003: 50).

literasi nusantara

Dalam pemilihan dan reorganisasi isi kurikulum diperlukan prosedur atau tata kerja tertentu yang meliputi:

1. Prosedur employee
   Guru memilih dan mengorganisasi isi kurikulum tersebut.
2. Prosedur buku pelajaran (*The textbook procedure*)
   Pemilihan isi kurikulum didasarkan pada materi yang terkandung dalam sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh panitia khusus.
3. Prosedur survei pendapat (*The survey of opinions procedure*)
   Pemilihan pengorganisasian atau reorganisasi kurikulum dengan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat dari berbagai pihak.

4. Prosedur studi kesalahan (*The study of errors procedure*)
   Mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, dan kelemahan dari pengalaman yang baru.
5. Prosedur mempelajari kurikulum lainnya (*The study of other curriculum procedure*)
   Mempelajari kurikulum sekolah lain untuk diterapkan dan menentukan isi kurikulum yang sesuai dengan tujuan sekolah yang ingin dicapai. Prosedur yang diterapkan tidak harus sama, tetapi perlu dievaluasi dan modifikasi.
6. Prosedur analisis kegiatan orang dewasa (*The analysis of adult activities procedure*)
   Mengadakan studi kegiatan untuk siswa, kemudian diidentifikasi hingga dapat disusun program kurikuler untuk diajarkan di sekolah. Contoh kegiatannya adalah a) kegiatan bahasa dan interkomunikasi sosial, b) kegiatan kesehatan, c) kegiatan sebagai warga negara, (d) kegiatan sosial umum, (e) kegiatan pemanfaatan waktu dan rekreasi, (f) kegiatan dalam rangka kesehatan mental, (g) kegiatan keagamaan, (h) kegiatan sebagai orang tua, dan (i) kegiatan non-vocational
7. Prosedur fungsi-fungsi sosial (*The social functions procedure*)
   Berbagai macam fungsi sosial yang ditemukan melalui survei, studi literatur, atau riset kemudian diklasifikasikan menjadi *area of living*. Menurut Douglass, *area of living* meliputi *citizenship, home living, leisure life, vocational efficiency, physical and mental health,* dan *continued learning*. Sedangkan menurut Stratemenyer *area of living* terdiri atas *home, community, leisure time, work,* dan *spiritual activities.*
8. Prosedur minat dan kebutuhan remaja (*The youth interest and needs procedure*)
   Dari prosedur sosial di atas kemudian diklasifikasikan menjadi *persistent life problems*. Adapun urutannya didasarkan pada latar belakang, kematangan, minat, dan kebutuhan para siswa secara kronologis dan logis serta sebagai persiapan untuk menempuh kehidupan dewasa. Jadi, prosedur ini tidak bersifat individualistik, tetapi interaksi antara individu anak (remaja) dengan lingkungannya.

literasi nusantara

Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai. Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004: 70) mengemukakan bahwa, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan." Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin dan Usman (2004). Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman (2004: 70) mengemukakan bahwa "Implementasi adalah sistem rekayasa."

Definisi di atas memperlihatkan bahwa kata 'implementasi' bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

literasi nusantara

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah proses atau aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program, atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan *pertama*, menggambarkan implementasi dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Artinya, proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru, dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan *kedua,* menekankan pada fase penyempurnaan. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada

berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya, atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan *ketiga,* memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum (Nurdin dan Usman, 2002). Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Implementasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Jika diibaratkan dengan rancangan bangunan (rumah) yang dibuat oleh seorang insinyur, maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat dan sangat tidak mungkin akan keluar atau tidak sesuai dengan rancangan. Namun, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan menimbulkan masalah besar.

Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat. Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang. Rancangan dan implementasi kurikulum adalah sistem yang membentuk garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) yang dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Meskipun tugas kepala sekolah dan guru dibedakan, tetapi dalam pelaksanaan administrasi selalu beriringan dan bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum (Hamalik, 2010: 173).

1. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah

   Pada tingkat sekolah, yang bertanggung jawab melaksanakan kurikulum adalah kepala sekolah. Ia wajib menyusun rencana

literasi nusantara

tahunan, jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan (Sudjana, 1996: 143)

a. Kepala sekolah sebagai pimpinan

Tanggung jawab kepala sekolah adalah memimpin sekolah, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain atau kelompok agar mereka berbuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai cara dilakukan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya seperti membujuk, mengajak, atau memengaruhi orang lain, atau dapat pula dengan cara lainnya. Cara-cara ini sering digunakan pemimpin dalam rangka memotivasi bawahannya agar bertindak ke arah tujuan yang diharapkan. Cara-cara ini juga digunakan kepala sekolah ketika memimpin para guru untuk mengaplikasikan kurikulum.

Pada umumnya seorang pemimpin (termasuk kepala sekolah) harus memiliki sifat/sikap/tingkah laku tertentu yang justru merupakan kelebihan dibandingkan orang lain/bawahannya yang dipimpin. Sifat-sifat yang dimaksud adalah

1) Mampu mengelola sekolah (*managerial skills*)

Kemampuan ini ditandai dengan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengelola pelaksanaan kurikulum, misalnya organisasi guru bidang studi, pembentukan regu-regu guru dan koordinator bidang studi, pemberian tugas pada guru, dan mendorong, mengawasi, serta menilai kegiatan guru dalam melaksanakan program sekolah sesuai tuntutan kurikulum yang ada.

2) Kemampuan profesional atau keahlian dalam jabatannya

Keahlian ini memungkinkan kepala sekolah untuk melaksanakan fungsi dan tugas administrasi yang dibebankan kepadanya. Sebagai kepala sekolah, ia juga sebagai guru yang harus memiliki kemampuan profesional kependidikan termasuk penguasaan dalam bidang program pendidikan keguruan.

3) Rendah hati dan sederhana

Sikap rendah hati berarti tidak pernah menyombongkan diri tentang kemampuan, pengetahuan, dan

kelebihan-kelebihannya dalam bidang Pendidikan. Sikap ini menuntut pemimpin atau kepala sekolah untuk lebih banyak mendengarkan, memikirkan, dan bertanya/mencari informasi, bukan memerintah atau menyuruh, kendatipun bertindak demikian dalam situasi tertentu tidak dilarang sepenuhnya.

b. Perilaku seorang administrator

Perilaku seorang administrator sangat berperan dalam hubungan dengan perencanaan program, pengorganisasian staf, pergerakan semua pihak yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, dan penilaian terhadap personal sekolah.

c. Penyusunan rencana tahunan

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kepemimpinannya. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang (rencana untuk 5 sampai 10 tahun) dan rencana jangka pendek (rencana tahunan atau bulanan). Kepala sekolah perlu membuat: (1) perencanaan bidang kesiswaan; (2) perencanaan bidang personal/tenaga kependidikan; (3) perencanaan bidang sarana kependidikan; (4) perencanaan bidang ketatausahaan sekolah; (5) perencanaan bidang pembiayaan/anggaran pendidikan; (6) perencanaan pembinaan organisasi sekolah; dan (7) perencanaan hubungan kemasyarakatan/komunikasi pendidikan.

literasi nusantara

d. Pembinaan organisasi sekolah

Pelaksanaan kurikulum membutuhkan dukungan organisasi sekolah yang kuat. Pelaksanaan kurikulum di sekolah yang tergolong mapan umumnya ditunjang oleh:

1) Guru bidang studi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.
2) Staf karyawan tata usaha yang cakap dan terampil.
3) Bagian pengadaan alat bantu mengajar.
4) Bagian perpustakaan, di mana sumber bacaan disediakan dan dioperasikan sesuai dengan tuntutan kurikulum.
5) Pengelolaan laboratorium tempat diadakannya percobaan dan praktik.
6) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina oleh dokter, perawat, dan psikiater.

7) Bagian bimbingan dan penyuluhan (BP) yang dibina oleh tenaga konselor ahli.
8) Bagian yang bertugas membina kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan, latihan, dan keterampilan peserta didik.
9) Organisasi Siswa (OSIS).
10) Organisasi orang tua murid.
11) Bagian kerohanian dan pembinaan masjid di sekolah.

Jika sekolah memiliki organisasi-organisasi sebagaimana di atas, maka sekolah tentu membutuhkan kemampuan organisasi yang memadai dari kepala sekolah agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Semua organisasi harus bekerja secara terpadu di bawah koordinasi yang baik dan senantiasa terarah ke pencapaian tujuan instruksional dan kurikuler di sekolah yang bersangkutan.

e. Koordinasi dalam pelaksanaan kurikulum

Koordinasi bertujuan agar terdapat kesatuan sikap, pikiran, dan tindakan para personal dan staf pada suborganisasi dalam organisasi sekolah untuk melaksanakan kurikulumnya. Pelaksanaan koordinasi sejalan dengan pelaksanaan fungsi administrasi, yakni

1) koordinasi dalam perencanaan;
2) koordinasi dalam pengorganisasian;
3) koordinasi pergerakan motivasi personal;
4) koordinasi dalam pengawasan dan supervisi;
5) koordinasi dalam anggaran biaya pendidikan; dan
6) koordinasi dalam program evaluasi.

Tindakan-tindakan koordinasi tersebut secara bersama-sama atau secara parsial diarahkan dalam pelaksanaan kurikulum untuk mencapai tujuan institusional sekolah. Koordinasi dalam pengorganisasian diperlukan agar setiap suborganisasi sekolah bergerak bersama-sama sesuai dengan tujuan, fungsi dan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing suborganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi dalam pergerakan motivasi ketenagaan diperlukan agar kepala sekolah dan kepala suborganisasi menyadari bahwa tanggung jawab menggerakkan bawahan supaya melakukan tindakan yang diharapkan. Koordinasi pengawasan dan supervisi pelaksanaan kurikulum dimaksudkan agar terjadi dan terbinanya perbaikan proses belajar mengajar.

Koordinasi dalam penggunaan anggaran pendidikan dimaksudkan agar penggunaan biaya yang telah disediakan untuk kegiatan kurikuler berjalan secara seimbang dan lancar sesuai anggaran masing-masing jenis/bidang kegiatan. Sementara koordinasi bidang evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi program terlaksana secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua guru.

f. Kegiatan memimpin rapat kurikuler

Rapat guru adalah media yang paling tepat untuk memusyawarahkan penyelenggaraan, hasil, dan berbagai masalah kurikuler di sekolah. Rapat dapat diselenggarakan pada awal tahun akademik, pertengahan tahun/semester, akhir tahun akademik atau dilaksanakan secara insidental menurut kebutuhan yang ada di sekolah yang bersangkutan. Penyelenggaraan rapat dapat dipimpin oleh kepala sekolah, kepala suborganisasi, atau ketua bidang studi, bergantung pada permasalahan yang dihadapi.

g. Sistem komunikasi dan pembinaan kurikulum

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi, baik di dalam maupun luar organisasi. Melalui komunikasi akan terjadi hubungan yang interaktif dari semua pihak yang pada akhirnya mengembangkan proses kerja sama yang baik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan administrasi kurikulum. Dengan demikian, pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai serangkaian kegiatan dalam proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang/pihak lain dalam rangka proses kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Komunikasi adalah sistem. Komunikasi berlangsung dalam proses menyeluruh yang di dalamnya terdapat *input*, proses, dan *output*. *Input* di dalam komunikasi adalah pesan/warta yang disampaikan sebagai proses penyampaian kegiatan itu sendiri yang selanjutnya terjadi perubahan tingkat pemahaman, sikap, dan tindakan tertentu yang terjadi pada diri sendiri, kepada siapa pesan itu disampaikan yang selanjutnya dianggap sebagai *output* (keluaran). Perubahan perilaku tersebut menyebabkan terjadinya tindakan yang dilakukan oleh bersangkutan sesuai dengan yang

literasi nusantara

diharapkan. Komponen-komponen seperti kepala sekolah, guru, siswa, alat, dan metode secara keseluruhan terpadu dalam sistem komunikasi. Dalam pelaksanaan kurikulum kepala sekolah perlu mengembangkan sistem komunikasi secara efektif agar semua pihak/personal yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum bertindak satu arah, satu pemikiran, satu sikap, dan satu keinginan mencapai tujuan-tujuan sekolah secara tepat guna dan berdaya guna.

2. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu: (1) pembagian tugas mengajar, (2) pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan (3) pembagian tugas bimbingan belajar. Pembagian tugas ini dilakukan melalui musyawarah guru yang dipimpin kepala sekolah. Keputusan tugas tersebut selanjutnya dituangkan dalam jadwal pelajaran untuk satu semester atau satu tahun akademik.

Pembagian tugas bagi guru pada prinsipnya harus mempertimbangkan hal-hal berikut.

a. Tugas-tugas yang ditetapkan kepada guru hendaknya disesuaikan dengan kemampuan individual, spesialisasi, pengalaman, dan minat yang bersangkutan.
b. Bagi sekolah yang menerapkan sistem guru kelas, maka pembagian tugas disesuaikan dengan jumlah kelas. Contohnya jika ada 6 kelas, maka juga ada 6 guru yang menjabat sebagai guru kelas dan satu kepala sekolah. Setiap guru bertanggung jawab mengajar sejumlah bidang pengajaran di kelas yang dipegangnya.
c. Bagi sekolah yang menerapkan sistem guru bidang studi, maka pembagian guru disesuaikan dengan keahlian dan jam pelajaran yang telah ditetapkan. Setiap guru bertugas mengajar satu bidang studi di semua kelas.
d. Bagi guru yang memiliki keahlian khusus ditugaskan untuk membimbing kegiatan kurikuler lainnya dan atau program ekstrakurikuler, seperti guru seni, musik, olahraga, keterampilan, dan sebagainya.
e. Sejumlah sekolah di daerah atau di pedesaan masih kekurangan guru atau jumlah guru tidak sesuai dengan jumlah bidang studi. Masalah tersebut ditanggulangi dengan

literasi nusantara

memberikan tugas-tugas tambahan kepada beberapa guru, misalnya mengajar beberapa bidang studi atau mengajar beberapa kelas (Sudjana, 1996: 148).

Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

a. Karakteristik kurikulum mencakup ruang lingkup ide baru dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.
b. Strategi implementasi adalah trik yang digunakan dalam menerapkan kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
c. Karakteristik pengguna kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum terhadap peserta didik (Mulyasa, 2009: 73).

Menurut Lislie Bishop (1968), implementasi kurikulum membutuhkan restrukturisasi dan penggantian. Dengan kata lain, implementasi kurikulum membutuhkan reorganisasi dan penyesuaian kebiasaan individu, cara berperilaku, program, tempat belajar, jadwal dan kurikulum yang ada. Pemimpin kurikulum dapat memicu perubahan perilaku stafnya, tetapi tergantung kualitas perencanaan awal dan ketepatan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. Saat ini, perkembangan waktu implementasi kurikulum telah menjadi perhatian utama pendidikan, selain itu telah banyak biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan proyek kurikulum tetapi masih banyak yang tidak berhasil.

Saat mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, kita perlu mempertimbangkan pendapat para pendidik sebab mereka beranggapan bahwa implementasi kurikulum hanyalah langkah lain dari perencanaan kurikulum dan guru bisa dengan lebih mudah melanjutkan tahap perencanaan tersebut menjadi tahap pelaksanaan. Setelah meninjau beberapa proyek inovatif, Fullan dan Pomfret (1975) mengungkapkan bahwa dalam pengamatan mereka implementasi inovasi yang efektif membutuhkan waktu, interaksi dan kontak pribadi, penataran, dan lain-lain. Mereka juga menyebutkan bahwa guru harus mengetahui dengan jelas tujuan, sifat, dan manfaat dari sebuah inovasi/perubahan kurikulum.

literasi nusantara

Kenneth Leithwood (1969) menganggap pelaksanaan kurikulum merupakan proses pengurangan perbedaan antara praktik yang ada dengan yang disarankan oleh inovator/agen perubahan. Pelaksanaan kurikulum memengaruhi perubahan perilaku secara bertahap sehingga seseorang membutuhkan waktu untuk menyetujui perubahan. Maka, yang harus kita ingat adalah pelaksanaan kurikulum membutuhkan waktu karena melibatkan upaya mengubah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Implementasi adalah proses interaksi antara orang-orang yang menciptakan program dan yang menyampaikannya. Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini.

a. Hubungan pelaksanaan untuk perencanaan
   Keberhasilan pelaksanaan kurikulum merupakan hasil dari perencanaan yang cermat. Menurut Edgar Morphet dkk, agar proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi efektif dan bermakna, maka hubungan keduanya haruslah dipertimbangkan dengan cermat. Perencanaan yang efektif harus berhubungan dengan perubahan yang diinginkan dan mengidentifikasi apa yang dapat dilaksanakan. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang menitikberatkan pada tiga faktor yang saling mendukung, yaitu seseorang, program, dan organisasi/lembaga. Seseorang berpendapat bahwa satu faktor dapat memfasilitasi pelaksanaan kurikulum, tetapi idealnya ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kurikulum. Faktor-faktor tersebut harus saling terintegrasi agar dapat mewujudkan implementasi kurikulum yang baik. Salah satu faktor kegagalan proyek kurikulum di tahun 1960-an karena gagal mengambil akarnya bahwa perubahan kurikulum (inovator) hanya berpusat pada perubahan program, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan guru dan organisasi sekolah.
b. Inkrementalisme
   Dunia guru tidak memungkinkan menerima perubahan yang cukup banyak. Both Fullan dan Goodglad juga mengatakan bahwa rutinitas sehari-hari guru adalah menyajikan pelajaran sehingga guru hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan rekannya. Selain itu, Seymour Sarason (1984) juga mengomentari bahwa isolasi/pengasingan guru dalam sekolah memiliki dampak negatif terhadap

perubahan. Menurutnya, sekolah membuat guru merasa profesional, bertanggung jawab sendiri, dan memecahkan persoalan sendiri sehingga guru melihat perubahan dalam program sebagai kegiatan individu.

Keadaan tersebut berdampak pada psikologis guru, ia merasa tidak menyukai administrator dan agen perubahan yang dianggap tidak peduli dengan penderitaan guru. Dalam hal ini, Lortie menyatakan bahwa banyak faktor yang memengaruhi guru menerima suatu perubahan: (1) guru memiliki ketahanan untuk berubah karena mereka percaya bahwa lingkungan kerjanya tidak pernah mengizinkan untuk menunjukkan apa yang benar-benar bisa mereka lakukan. Banyak perubahan yang ternyata tidak mengatasi berbagai permasalahan. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip yang memandu perubahan perilaku orang dewasa. Prinsip ini menggambarkan pelaksanaan kurikulum memfasilitasi keterlibatan aktif para guru untuk adanya pengalaman belajar, mendorong keterbukaan dan kepercayaan, serta memberikan umpan balik sehingga peserta menyadari bahwa kontribusi dan bakat mereka dihargai, (2) guru memerlukan waktu untuk: mencoba program baru yang akan dilaksanakan, merefleksikan tujuan-tujuan baru, dan pengalaman belajar serta mencoba tugas baru, dan (3) guru membutuhkan waktu untuk menentukan strategi bagi program baru dan diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

literasi nusantara

Idealnya proses pelaksanaan kurikulum memberikan waktu pada guru untuk mencoba kurikulum baru tersebut. Loucks dan Lieberman mengemukakan bahwa guru dapat melalui tingkatan penggunaan kurikulum baru, yaitu: (1) guru perlu waktu menyesuaikan diri dengan bahan dan tindakan yang dibutuhkan untuk kurikulum baru, dan (2) seiring dengan waktu guru menerima kurikulum baru dan berinisiatif memodifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan pandangan filsafat mereka sendiri. Dengan demikian, agar implementasi kurikulum berjalan dengan sukses, maka dibutuhkan waktu bagi guru untuk "membeli" kurikulum baru dan untuk menjadi terampil dalam menyampaikan program baru tersebut.

c. Komunikasi

Kemunculan program baru yang sedang dirancang memerlukan adanya saluran komunikasi terbuka agar program tersebut tidak muncul secara mengejutkan. Implementasi kurikulum akan berhasil dengan adanya diskusi antara guru, kepala sekolah, dengan pekerja kurikulum lainnya. Diskusi ini akan mempermudah memperkenalkan program baru dan proses pengiriman pesan/informasi. Seorang pemimpin perlu mengomunikasikan asumsi yang mendasari program baru, nilai-nilai, dan sudut pandang program baru kepada stafnya. Jika program baru adalah perubahan besar dari program sebelumnya, maka pemimpin kurikulum dapat mengomunikasikannya melalui pertemuan, lokakarya, demonstrasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kunci keberhasilan komunikasi adalah dari individu itu sendiri.

Philip Phenix menyatakan hambatan nyata untuk komunikasi bukan dari teknis pelaksanaannya, tetapi dari manusia itu sendiri. Dengan demikian, pemimpin kurikulum harus menciptakan iklim yang kondusif agar terjadi komunikasi efektif antara staf pendidikan dengan masyarakat (perorangan dan komunikasi massa). Mereka diperbolehkan menyampaikan pandangannya dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi menyampaikan pesan pada pelaksanaan kegiatan kurikulum.

literasi nusantara

d. Kerja sama

Agar perubahan kurikulum berhasil dan dilembagakan, maka semua orang yang terlibat harus bekerja sama. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan meningkat jika guru berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Charles Silberman mengungkapkan bahwa pada reformasi 1950-an, guru-guru keluar dari proses pendidikan. Para inovator menginginkan guru membuat *handout* (ringkasan) materi. Guru merasa program tersebut hanyalah perubahan yang tidak bisa mereka kendalikan sehingga sulit untuk dilaksanakan. Perubahan akan efektif jika guru berkomitmen dan menganggap perubahan itu dapat mengatasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi.

Dalam menciptakan perubahan, perancang kurikulum perlu memperhatikan kebutuhan, komitmen, dan keteram-

pilan guru serta bagaimana melibatkan guru dalam pelaksanaannya karena sebenarnya mereka ingin terlibat dalam perubahan dan keputusan yang mencerminkan filosofi mereka dan orientasi kurikulum untuk pendidikan. Di sisi lain, ada yang ingin melibatkan siswa dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dengan mempertimbangkan ide-ide siswa serta menguji dan memodifikasi program baru. Selain itu, ada kelompok minoritas yang menginginkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, untuk memastikan pandangan mereka terwakili dan anak-anak mereka tidak didiskriminasi dalam pelaksanaan program baru.

e. Dukungan

Dalam pelaksanaan kurikulum juga dibutuhkan dukungan biaya/keuangan. Perancang kurikulum perlu memberikan dukungan program baru/modifikasi program yang mereka anjurkan agar pelaksanaan program segera dilaksanakan. Para pendidik membutuhkan waktu untuk pelatihan (membahas kebutuhan guru) dan menyesuaikan diri dengan program baru. Program pelatihan yang efektif harus fleksibel untuk merespons perubahan kebutuhan guru/staf. Selain itu, pelatihan ini juga sebagai wadah untuk menanggapi kekhawatiran guru/staf dan menilai ketercapaian tujuan.

literasi nusantara

Pengembangan dan pelaksanaan program baru membutuhkan dukungan keuangan. Artinya, tanpa dukungan keuangan, pengiriman atau penyampaian program baru ke seluruh kabupaten tidak akan terlaksana. Jika sekolah membuat program baru menggunakan dana pemerintah, maka mereka harus menemukan cara untuk mendukung program tersebut yang pernah dilaksanakan dengan dana atau anggaran rutin sekolah. Selain itu, dana juga dibutuhkan untuk melengkapi bahan dan peralatan agar melembagakan program baru. Untuk itu, kerja sama semua pihak di sekolah dan rekan kerja menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Melalui kerja sama ini, guru dapat berbagi ide, memecahkan masalah, dan membuat bahan ajar secara kolaboratif (berkelompok).

Dalam penerapan kurikulum, praktisi kurikulum harus memilih model implementasi yang tepat dan cocok dengan situasi, kondisi sosial, maupun psikologis masyarakat. Menurut

Ornstein dan Hunkins (2009), terdapat empat model implementasi kurikulum sebagai berikut.

a. *Overcoming resistance to change model*
   Menurut Neal Gross dalam Ornstein dan Hunkins, (2009: 259), keberhasilan dan kegagalan suatu perubahan dalam organisasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin untuk mendorong stafnya menghadapi perubahan. Maka, seorang pemimpin harus bisa membuat staf atau anggotanya tahan terhadap perubahan atau tantangan dengan cara memberikan kesempatan kepada para administrator dan guru. Jadi dalam model implementasi ORC guru dan administrator memiliki peluang serta kesempatan yang sama dalam menghadapi perubahan ataupun tantangan.

   Ketua pengembang kurikulum yang menggunakan model implementasi ORC harus mengenal dan menjadi peka terhadap stafnya. Pemimpin harus mengerti bahwa yang harus diubah terlebih dahulu adalah individu itu sendiri sebelum organisasinya. Berdasarkan penelitian inovasi kurikulum, Gene Hall dan Susan Loucks dalam Ornstein & Hunkins (2009) membagi implementasi ORC menjadi empat tahapan yaitu: *Tahap pertama* adalah *unrelated concerns* (keprihatinan atau kecemasan terkait). Pada tahap ini, guru belum melihat hubungan antara diri mereka dengan perubahan yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu membendung perubahan tersebut. *Tahap kedua* adalah *personal concerns* (sadar diri). Pada tahap ini individu memberikan reaksi terhadap temuan baru yang berhubungan dengan situasi dirinya. *Tahak ketiga* ialah *task-related concerns* (sadar akan tugas terkait). Kesadaran tersebut berhubungan dengan pemanfaatan temuan baru di dalam kelas secara nyata. *Tahap keempat* merupakan *impact-related concerns* (kesadaran akan akibat terkait). Pada tahap ini guru sadar bagaimana inovasi dapat memengaruhi siswa, teman kerja, dan kelompok atau komunitas.

b. *Organizational-development model* (OD)
   Pada tahun 1970 an, Richard Schmuck dan Matthew Miles mengatakan banyak pendekatan terhadap perbaikan pendidikan yang gagal karena para pemimpin berasumsi bahwa adopsi merupakan proses yang rasional dan terlalu bergantung pada penemuan bidang teknis. Masalah-masalah

literasi sahara

tersebut membuatnya mengusulkan model o*rganizational-development model* yang merupakan upaya jangka panjang untuk memperbaiki pemecahan masalah suatu organisasi dan memperbaharui proses, khususnya melalui diagnosis dan manajemen secara kolaboratif. Penekanan Model OD terletak pada budaya kerja dalam organisasi dan kerja sebagai tim.

c. *Concern-based adoption model* (CBA)
Model ini terkait dengan model OD. Namun, mereka yang menggunakan pendekatan CBA meyakini bahwa semua perubahan berawal dari semua individu. Tidak seperti Model OD, pendekatan CBA hanya menguatkan adopsi implementasi kurikulum, tidak pada pengembangan dan rancangan kurikulum. Jadi, dapat dikatakan bahwa sebelumnya pendidik dan guru sudah memilih dan menciptakan kurikulum sebelumnya. Langkah-langkah perhatian yang diberikan guru terkait menerapkan inovasi adalah: (1) kesadaran inovasi, (2) kesadaran informasi mengukur, (3) perhatian untuk diri, (4) berhubungan dengan untuk mengajar, (5) berhubungan dengan untuk para siswa

d. Sistem model
Jika model OD dan CBA fokus pada individu atau orang, maka model sistem fokus pada sekolah. Perubahan yang direncanakan dalam sekolah seharusnya dipandang sebagai *win-win* atau semua harus menang tanpa ada yang merasa kalah. Dalam mengimplementasikan perubahan ada potensi konflik di antara individu dan kelompok, termasuk departemen. Konflik harus diatasi supaya setiap orang menang, baik itu siswa, guru, ketua jurusan, maupun kepala sekolah. Namun agar kurikulum berhasil dilaksanakan, maka diperlukan tenaga, waktu, dan kesabaran. Implementasi harus dianggap sebagai upaya jangka panjang yang memerlukan keterlibatan dan kerja sama antara manusia dan departemennya. Jadi, model implementasi kurikulum yang dilakukan oleh Ornstein dan Hunkins fokus pada manajemen yaitu interaksi antarmanusia dalam organisasi yang diatur oleh sistem yang membatasi setiap individu dalam bertindak.

literasi nusantara

Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris: *evaluation*; dalam bahasa Arab: *al-Taqdir*; dalam bahasa Indonesia: 'penilaian'. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa Arab: *al-Qimah*; dalam bahasa Indonesia: 'nilai'. Kemudian, dari segi istilah dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (1977) sebagaimana dikutip Sudijono (2012: 1) bahwa *evaluation refer to the act or process to determining the value of something*. Maka, definisi evaluasi mengandung pengertian tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Gronlund dalam Rusman (2009: 93), evaluasi adalah proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan peserta didik. Sementara itu, Hopkins dan Antes mengemukakan bahwa evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi peserta didik, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan peserta didik dan ketepatan keputusan tentang gambaran peserta didik dan efektivitas program.

Sedangkan Tyler (1949) berpendapat bahwa evaluasi fokus pada upaya menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar yang kemudian diukur menggunakan tes. Tujuan evaluasi menurut Tyler yaitu untuk menentukan perubahan yang terjadi baik secara statistik maupun edukatif. Sedangkan Morrison berpendapat bahwa evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, ada tiga faktor utama yaitu: (1) pertimbangan; (2) deskripsi objek penilaian; dan (3) kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan (Rusman, 2009: 93).

Proses belajar mengajar di dalam kelas merupakan tempat untuk mengimplementasikan dan menguji kurikulum. Dalam proses belajar mengajar semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan pengajar diuji dalam bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Menurut Mars dalam Rusman (2009: 74—75), terdapat lima elemen yang memengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat guru, peserta didik, orang tua, dan dukungan dari dalam diri. Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan kreativitas peserta didik lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar.

Guba dan Lincoln (1985) menekankan definisi evaluasi sebagai "*A process for describing an evaluand and judging its merit and worth.*" Disimpulkan bahwa evaluasi adalah tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat keputusan (Arifin, 2011: 265). Dalam evaluasi pengukuran tidak lagi merupakan bagian integral ataupun suatu langkah yang harus ditempuh. Pengukuran hanya merupakan salah satu langkah yang mungkin dipergunakan dalam kegiatan evaluasi, sedangkan penilaian dan evaluasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau satu aspek seperti prestasi belajar siswa. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan secara internal yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam suatu kegiatan seperti guru menilai prestasi belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran.

Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan alat (instrumen) pengukuran. Pengukuran menggambarkan hal-hal yang bersifat kuantitatif, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi juga berdasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara. Dalam konteks sistem kurikulum, istilah yang digunakan adalah evaluasi kurikulum. Dengan demikian, evaluasi kurikulum adalah tindakan penilaian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum, sedangkan penilaian hasil belajar adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat keputusan.

literasi nusantara

Peranan evaluasi dalam kurikulum pendidikan minimal berkenaan hal-hal berikut.

1. Evaluasi sebagai moral judgement
   Konsep utama dalam evaluasi adalah nilai. Hasil dari evaluasi berisi nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Pernyataan ini mengandung dua pengertian: pertama, evaluasi berisi skala nilai moral sehingga objek evaluasi dapat dinilai; kedua, evaluasi berisi perangkat kriteria praktis sehingga berdasarkan kriteria-kriteria tersebut suatu hasil dapat dinilai.
2. Evaluasi dan penentuan keputusan
   Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum selalu mempertimbangkan guru, murid, kepala sekolah, orang tua, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Pada prinsipnya setiap individu akan membuat keputusan sesuai posisinya. Besar atau kecilnya peranan keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya dan masalah yang dihadapinya pada suatu saat.
3. Evaluasi dan konsensus nilai
   Dalam berbagai situasi pendidikan dan kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penilaian dan evaluasi. Para partisipan dalam evaluasi pendidikan terdiri atas orang tua, murid, guru, pengembang kurikulum, administrator, ahli politik, ahli ekonomi, penerbit, arsitek, dan sebagainya.

literasi nusantara

Menurut Zainal Arifin (2009), fungsi evaluasi dapat dilihat dari kebutuhan peserta didik dan guru sebagaimana uraian berikut.

1. Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heteronomi yakni membutuhkan pendapat orang dewasa sebagai pedoman untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu.
2. Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya, bahkan peseta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat.
3. Secara didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing

serta membantu guru untuk memperbaiki kurikulum.

4. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui status peserta didik di antara teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai.
5. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap (fisik dan non-fisik), maka program pendidikan dapat dilakukan.
6. Evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas.
7. Secara administratif, evaluasi berfungsi memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik itu sendiri.

Objek evaluasi harus berhubungan dengan kegiatan nyata dan telah terjadi karena tidak mungkin seseoang melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran, kecuali ia melakukan penelitian. Objek evaluasi harus bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu sendiri agar apa yang dievaluasi relevan dengan apa yang diharapkan. Objek evaluasi kurikulum dapat dilihat dari berbagai segi: (a) dimensi-dimensi kurikulum mencakup dimensi rencana, kegiatan dan hasil, (b) komponen-komponen kurikulum mencakup tujuan, isi, proses (metode, media, dan sumber lingkungan), dan evaluasi (formatif dan sumatif), dan (c) tahap-tahap pengembangan kurikulum mencakup tahap perencanaan (silabus dan RPP), pelaksanaan (sekolah dan di luar sekolah), monitoring, dan evaluasi.

Menurut Arifin (2011: 263), untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka evaluasi kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut.

1. Kontinuitas, artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena kurikulum adalah proses yang berkelanjutan.
2. Komprehensif, artinya objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi.
3. Adil dan objektif, artinya proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil yaitu keseimbangan antara teori dan praktik, keseimbangan proses dan hasil, serta keseimbangan dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri.

4. Kooperatif, artinya kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk dengan peserta didik itu sendiri.

Arifin (2011: 264) menyatakan bahwa jenis-jenis evaluasi sebagai berikut.

1. Evaluasi perencanaan dan pengembangan
   Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah memberikan tahap awal dalam penyusunan kurikulum. Persoalan yang disoroti menyangkut kelayakan dan kurikulum. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi kurikulum serta keberhasilannya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebelum kurikulum disusun dan dikembangkan.
2. Evaluasi monitoring
   Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Evaluasi dampak
   Evaluasi dampak bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan kurikulum.
4. Evaluasi efisiensi-ekonomis
   Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama.
5. Evaluasi program komprehensif
   Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak serta tingkat keefektifan dan efisiensi.

Sedangkan Menurut Oemar Hamalik (2008), desain evaluasi kurikulum meliputi komponen-komponen berikut.

1. Penetapan garis besar penilaian
   a. Identifikasi tingkat perbuatan keputusan.
   b. Menetapkan situasi keputusan bagi masing-masing tingkat dan ketentuan: locus, fokusnya, waktu, dan susunan alternatif.

literasi nusantara

c. Merumuskan kriteria bagi setiap situasi dengan cara memerinci variabel-variabel pengukuran dan standar dalam mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan.
d. Merumuskan kebijaksanaan untuk pelaksanaan evaluasi.

2. Pengumpulan informasi
   a. Memerinci sumber-sumber informasi.
   b. Memerinci instrumen dan metode pengumpulan informasi.
   c. Memerinci prosedur sampel.
   d. Memerinci kondisi-kondisi dan jadwal pengumpulan informasi.
3. Organisasi informasi
   a. Memerinci format informasi.
   b. Memerinci alat untuk koding, penyusunan, penyimpanan, dan retrieving informasi.
4. Analisis informasi
   a. Memerinci prosedur analisis.
   b. Memerinci alat untuk melaksanakan analisis.
5. Laporan informasi
   a. Menentukan penerima laporan.
   b. Memerinci alat untuk menyampaikan informasi.
   c. Memerinci format laporan.
   d. Menetapkan jadwal pelaporan informasi.

literasi

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya. Pada intinya evaluasi kurikulum penting untuk membantu menyajikan bahan informasi dan mengetahui kelemahan kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan. Selain itu, penting untuk menilai kurikulum, apakah kurikulum masih tetap dilaksanakan atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Hamalik (1990) ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, yakni

1. Kepala sekolah berkepentingan karena ia juga bertugas sebagai administrator dan supervisor. Ia bertanggung jawab menyeleng-

garakan evaluasi program sekolah dalam rangka pelaksanaan kurikulum sekolah secara keseluruhan.

2. Guru bidang studi berkepentingan untuk menilai efektivitas kurikulum terhadap keberhasilan maupun kegagalan belajar peserta didik.
3. Pengelola pendidikan tingkat daerah (kabupaten maupun propinsi) berkepentingan menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah tingkat daerah masing-masing.
4. Administrasi tingkat pusat yakni kementerian pendidikan memiliki kepentingan dalam melaksanakan evaluasi guna menilai relevansi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan-kebijakan umum yang telah mereka gariskan.

literasi
nusantara

6
ANALISIS DAN IDENTIFIKASI SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN SATUAN PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen kurikulum karena mereka adalah bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Beberapa ahli mengartikan sumber daya manusia sebagaimana uraian berikut.

1. Soni Sumarsono (2003: 4)
   Sumber daya manusia (*human resources*) menurut Sonny memiliki dua arti yang berbeda: *pertama*, sumber daya manusia merupakan usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang; *kedua*, manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Dengan kata lain, kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. M. T. E. Hariandja (2002: 2)
   Sumber daya manusia adalah salah satu faktor paling utama pada perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola

dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat.

3. Hasibuan (2003: 244)
   Sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan dalam memenuhi keinginannya. Dengan kata lain, SDM merupakan kemampuan setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya manusia yang berkualitas, hal tersebut tidak akan berarti apa-apa sebab daya pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Dalam hal ini, kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat *Intellegence Quotient* (IQ) dan *Emotional Quality* (EQ).
4. CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development)
   Menurut CIPD dalam Mullins (2005), sumber daya manusia adalah strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang bertujuan mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal, termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi.
5. Mathis dan Jackson (2006: 3)
   Sumber daya manusia merupakan rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam satuan pendidikan adalah kepala sekolah, pendidik (guru), tenaga kependidikan (TU), dan peserta didik (siswa).

1. Kepala sekolah
   Kepala sekolah berasal dari dua kata yakni "kepala" yang berarti ketua atau pemimpin dalam organisasi atau lembaga dan "sekolah" berarti lembaga yang menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah atau lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan Wahjosumidjo (2005: 83)

literasi nusantara

mendefinisikan kepala sekolah sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, tempat diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dengan peserta didik sebagai penerima pelajaran. Maka, definisi kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, tempat diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dengan murid yang menerima pelajaran. Dengan ini, kepala sekolah dapat disebut pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Pada tingkat operasional, kepala sekolah adalah seseorang di garis terdepan yang bertugas mengoordinasikan upaya peningkatan peserta didik. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan, bertanggung jawab mengoordinasikan upaya bersama, dan mencapai tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpin. Selain kepala sekolah, guru juga dipandang sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dan faktor lain seperti lingkungan yang memengaruhi proses belajar mengajar peserta didik.

Menurut Mulyasa (2007: 24), kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, sekaligus sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi kepala sekolah, jabatan kepala sekolah dapat dikatakan sebagai jenjang karier dari jabatan fungsional guru. Apabila guru memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah dan telah memenuhi persyaratan atau tes tertentu, maka guru tersebut dapat memperoleh jabatan kepala sekolah.

Agar sekolah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka kepala sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pelaksanaan, pengorganisasian pengendalian, evaluasi, dan inovasi. Kepala sekolah yang baik diharapkan akan membentuk pelaksanaan peserta didik yang baik pula. Jika peserta didik di sekolah baik, maka akan menghasilkan prestasi yang baik pula baik dari peserta didik maupun gurunya. Mulyasa

literasi nusantara

(2007: 25) juga berpendapat bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses peserta didik. Pada dasarnya pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru.

Namun demikian, dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sekolah, peran serta dari para orang tua dan siswa juga turut mendukung keberhasilan itu. Selain itu, keberhasilan pengelolaan sekolah juga harus didukung oleh sikap, pola, dan kemampuan kepala sekolah dalam memimpin lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi lahirnya iklim kerja dan hubungan antarmanusia yang harmonis dan kondusif. Hal ini berarti bahwa seluruh komponen pendidikan di sekolah harus dikembangkan secara terpadu dalam rangka meningkatkan relevansi atau kesesuaian dengan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Maksudnya di sekolah, kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Dengan demikian, kepala sekolah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

literasi nusantara

Tugas Kepala Sekolah sebagai Pemimpin

Tidak semua kepala sekolah mengerti maksud kepemimpinan, kualitas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemimpin pendidikan. Setiap orang yang memberikan sumbangan bagi perumusan dan pencapaian tujuan bersama adalah pemimpin, tetapi individu yang mampu memberi sumbangan lebih besar terhadap perumusan tujuan dan terhimpunnya kelompok di dalam kerja sama, dianggap sebagai pemimpin yang sebenarnya. Seseorang yang memegang jabatan kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan. Menurut Dirawat (1986: 80), tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang, yakni

a. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi diklasifikasikan menjadi enam sebagaimana berikut.
    1) Pengelolaan pengajaran
       Pengelolaan pengajaran ini merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan ini, antara lain

a) pemimpin pendidikan hendaknya menguasai garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi dan kelas;
b) menyusun program sekolah untuk satu tahun;
c) menyusun jadwal pelajaran;
d) mengoordinasi aktivitas penyusunan model satuan pengajaran;
e) mengatur kegiatan penilaian;
f) melaksanakan norma-norma kenaikan kelas;
g) mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid;
h) mengoordinasi kegiatan bimbingan sekolah;
i) mengoordinasi program non-kurikuler;
j) merencanakan pengadaan; dan
k) memelihara dan mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat-alat pelajaran.

2) Pengelolaan kepegawaian

Aktivitas yang termasuk dalam bidang ini adalah menyelenggarakan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan penyeleksian, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, serta masalah penerapan kode etik jabatan.

3) Pengelolaan kesiswaan

Kegiatan yang biasa dilakukan adalah perencanaan dan penyelenggaraan siswa baru, pembagian siswa atas tingkat-tingkat, kelas-kelas, atau kelompok-kelompok (*grouping*), perpindahan dan keluar masuknya siswa (mutasi), penyelenggaraan pelayanan khusus (*special services*), mengatur penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran, penyelenggaraan testing dan evaluasi, mempersiapkan laporan tentang kedisiplinan siswa, pengaturan organisasi siswa, absensi siswa, dan sebagainya.

4) Pengelolaan gedung dan halaman

Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat

literasi nusantara

material sekolah, keindahan serta kebersihan umum, usaha melengkapi berbagai sarana, seperti gedung (ruangan sekolah), lapangan tempat bermain, kebun dan halaman sekolah, meubel sekolah, alat-alat pelajaran klasikal dan alat peraga, perpustakaan, alat-alat permainan dan rekreasi, fasilitas pemeliharaan sekolah, perlengkapan bagi penyelenggaraan khusus, transportasi sekolah, dan alat-alat komunikasi.

5) Pengelolaan keuangan
Bidang ini menyangkut masalah: gaji guru dan staf sekolah; penyelenggaraan otorisasi sekolah; uang sekolah dan uang alat-alat peserta didik; usaha penyediaan biaya bagi penyelenggaraan pertemuan dan perayaan serta keramaian.

6) Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat
Bidang pengelolaan ini berfungsi untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua siswa dan untuk menciptakan kerja sama antara sekolah, rumah, dengan lembaga-lembaga sosial.

b. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi
Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian terhadap persoalan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran, perbaikan program, dan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Secara rinci, tugas kepala sekolah dalam bidang ini adalah:

1) Membimbing para guru agar memahami tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran degan tujuan.
2) Membimbing para guru agar memahami permasalahan dan kebutuhan peserta didik.
3) Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas kepada setiap guru sesuai minat, kemampuan, bakat, dan selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkannya.
4) Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan

Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum,

literasi nusantara

administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi *school plant*, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah.

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan menciptakan rasa saling memahami antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga, saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat dan pentingnya peranan masing-masing, dan kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia pun harus mampu menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal. Kepala sekolah dapat menerima tanggung jawab tersebut, tetapi ia belum tentu mengerti bagaimana ia dapat menyumbang ke arah perbaikan program pengajaran.

literasi nusantara

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah di bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. Menurut Purwanto (2004: 65), kepala sekolah memiliki 10 macam peranan yang dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Sebagai pelaksana (*executive*)
   Pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya juga program atau rencana yang telah ditetapkan bersama.
b. Sebagai perencana (*planner*)
   Kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun rencana sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan

telah dipertimbangkan, diperhitungkan, dan memiliki tujuan.

c. Sebagai seorang ahli (*expert*)
   Kepala sekolah harus memiliki keahlian, terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinannya.
d. Mengawasi hubungan antara anggota kelompok (*contoller of internal relationship*)
   Kepala sekolah bertugas menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan meminimalisir agar tidak terjadi perselisihan.
e. Mewakili kelompok (*group representative*)
   Kepala sekolah harus menyadari bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya.
f. Bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman
   Kepala sekolah harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan memberikan sumbangan terhadap kelompoknya.
g. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator dan mediator)
   Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara anggota-anggotanya, seorang kepala sekolah harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih, atau mementingkan salah satu anggotanya.
h. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya
   Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua perbuatan anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya.
i. Sebagai pencipta
   Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakan.
j. Bertindak sebagai ayah (*father figure*)
   Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anaknya.

Berkaitan dengan uraian peran-peran pemimpin tersebut, Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa pemimpin yang baik harus menjalankan peranan "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani.*"

2. Tenaga pendidik (guru)
   Beberapa ahli mengartikan guru sebagaimana penjelasan berikut.
   a. Poerwadarminta (1996)
      Guru adalah seseorang yang pekerjaannya adalah mengajar. Maka dalam pengertian ini hanya menyebutkan salah satu sisi yakni guru disamakan dengan pengajar, tidak termasuk sebagai pendidik dan pelatih.
   b. Zakiyah Darajat
      Guru merupakan pendidik profesional karena telah menerima dan memikul beban dari orang tua siswa untuk ikut mendidik anak-anaknya. Namun, orang tua harus tetap menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya sebab guru hanya mendidik anak-anak mereka di sekolah.
   c. Noor Jamaluddin (1978: 1)
      Guru merupakan pendidik yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan kepada peserta didik, baik bimbingan jasmani maupun rohani agar ia mencapai kedewasaannya dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Khalifah di muka bumi, makhluk sosial, dan individu yang sanggup berdiri sendiri.
   d. Ahmadi (1977: 109)
      Pendidik berperan sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
   e. E. Mulyasa (2003: 53)
      Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen peserta didik yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
   f. Dri Atmaka (2004: 17)
      Pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik, baik dalam perkembangan jasmani maupun rohani.
   g. Purwanto (1997: 138)
      Orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di dalam lingkungan sekolah adalah guru.
   h. Surya (2002: 5)
      Guru sebagai pendidik profesional selayaknya mempunyai citra baik di masyarakat sebab guru itu ditiru atau diturut dan dicontoh.

literasi nusantara

i. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
Guru dan dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

j. Hadari Nawawi
Guru adalah seseorang yang mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah (kelas). Sedangkan definisi yang lebih khusus, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab membantu anak-anak mencapai kedewasaan. Maka, guru tidak hanya memberi materi di depan kelas, tetapi juga aktif mengarahkan perkembangan peserta didik.

k. Earl V. Pullias and James D. Young
"*The teacher teaches in the centuries-old sense of teaching. He helps the developing student to learn things he does not know and to understand what he learns*—Dalam waktu berabad-abad, guru memberikan pengajaran, ia membantu mengembangkan siswa untuk belajar sesuatu yang tidak diketahui dan untuk memahami apa yang dipelajari."

l. Dr. Ahmad Tafsir
Guru (pendidik) ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam pandangan Islam, tugas guru adalah mendidik (berarti tugas yang amat luas). Sebagian dilakukan dengan cara mengajar, sebagian lagi dilakukan dengan memberikan dorongan, memberi contoh (suri tauladan), menghukum, dan lain-lain.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 14 2005 memaparkan lima syarat untuk menjadi guru, yakni

a. Memiliki kualifikasi akademik
Artinya, ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki guru harus sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Adapun ijazah yang dimaksud adalah ijazah S-1 atau D-IV sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi fokus keahliannya.

b. Memiliki kompetensi
Guru harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

literasi nusantara

Kompetensi guru tersebut meliputi, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

c. Memiliki sertifikat pendidik.
   Guru harus memiliki sertifikat pendidik yang ditandatangani oleh perguruan tinggi sebagai bukti formal telah memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi.
d. Sehat jasmani dan rohani
   Guru harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
e. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
   Guru diwajibkan ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara demokratis.

Pakar pendidikan di Barat, seperti Pullias dan Young (1988), Manan (1990) dan Yelon serta Weinstein (1997) telah melakukan penelitian tentang peran guru. Adapun peran-peran yang dimaksud adalah

a. Guru sebagai pendidik
   Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh dan panutan bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut, seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitasnya agar tingkah laku anak tidak

menyimpang dengan norma-norma yang ada.

b. Guru sebagai pengajar

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Maka, hal-hal yang harus dilakukan guru terhadap peserta didik adalah membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, menyintesis, bertanya, merespons, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode peserta didikan, dan memberikan nada perasaan. Agar peserta didik memiliki kekuatan yang maksimal, maka guru harus berupaya mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

c. Guru sebagai pembimbing

Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dan tentu ia bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

d. Guru sebagai pengelola peserta didik

Guru harus mampu menguasai berbagai metode dan selalu memperbarui, menambah pengetahuan, dan keterampilannya agar sesuai dengan perkembangan zaman.

e. Guru sebagai model dan teladan

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggapnya sebagai guru. Dalam budaya kita, ada kecenderungan yang menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan dari peserta didik dan orang-orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Oleh karena itu, guru harus

literasi nusantara

selalu memperhatikan sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup secara umum. Perilaku guru sangat memengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik pun harus berani mengembangkan gaya hidupnya. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya serta menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya.

f. Guru sebagai anggota masyarakat
Dalam anggota masyarakat, guru berperan sebagai komunikator yang diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Guru dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. Selain itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti olah raga, keagamaan, dan kepemudaan. Keluwesan bergaul memang menjadi hal penting yang harus dimiliki guru, sebab jika tidak, guru akan kurang diterima masyarakat.

g. Guru sebagai administrator
Guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, guru dituntut bekerja dengan administrasi yang teratur. Segala pelaksanaan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar perlu diadministrasikan dengan baik sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan bukti dokumen bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

h. Guru sebagai penasehat
Bagi peserta didik, guru adalah penasihat, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat. Namun, peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental.

literasi nusantara

i. Guru sebagai pembaharu (inovator)
Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik yang belajar sekarang secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan muda yang juga penerjemah, pengalaman guru harus menjadi pribadi yang terdidik.

j. Guru sebagai pendorong kreativitas
Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam peserta didik dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri-ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Akibat dari fungsi ini guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik sehingga mereka beranggapan bahwa gurunya memang kreatif dan tidak melakukan aktivitas rutinannya saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru saat ini lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya.

k. Guru sebagai emansipator
Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan "budak" stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan sering kali membebaskan peserta didik dari *self image* yang tidak menyenangkan, kebodohan, dari perasaan tertolak, dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moril dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.

literasi nusantara

l. Guru sebagai evaluator
Evaluasi atau penilaian merupakan aspek peserta didik yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, seperti tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

m. Guru sebagai kulminator
Guru adalah seseorang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi yakni tahap yang memungkinkan setiap peserta didik dapat mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan evaluator. Sejatinya, guru adalah pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu serta mampu mentransfer kebisaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik.

Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Ia harus menyadari bahwa di dalam kehidupan masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh.

3. Tenaga kependidikan (TU)
Tata usaha merupakan bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Informasi tata usaha sekolah ini sebagai basis pelayanan dan bahan pengambilan keputusan sekolah. Semakin lengkap dan akurat data yang terhimpun, maka pemberian pelayanan semakin mudah dan pengambilan keputusan pun semakin tepat. Ditinjau dari asal usul kata, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu '*ad*' yang berarti 'intensif' dan '*ministrare*' berarti melayani, membantu, dan memenuhi, atau menyediakan (Husaini Usman, 2006). Menurut The Lian Gie (2000, tenaga tata usaha memiliki tiga peranan pokok, yaitu
a. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.

c. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peranan tenaga administrasi sekolah hanya sebagai administrator karena ketiga peranan yang diungkapkan adalah melayani, menyediakan, dan membantu yang serupa dengan administrasi. Selanjutnya The Lian Gie (1974: 176) juga menambahkan beberapa pengertian administrasi tata usaha, yakni a) menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan; b) mencatat adalah kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan; c) mengolah ialah aktivitas mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna; d) menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan; e) mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain; dan f) menyimpan ialah menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman.

Pengalaman dan sertifikat pendidikan sangat menentukan ranah kerja tata usaha sebab mereka akan bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Namun, di Indonesia, staf TU harus bisa bekerja di semua bidang yang ditugaskan kepala sekolah dan kepala TU. Mereka bertugas dalam berbagai bidang, baik bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru atau bekerja sendiri. Tugas TU meliputi membantu proses belajar mengajar, menyelesaikan urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan dan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat.

Dalam hal ini, Mill dan Standingford (1982) menyebutkan delapan tugas tenaga administrasi, yakni a) menulis surat; b) membaca; c) menyalin (menggandakan); d) menghitung; e) memeriksa; f) memilah (menggolongkan dan menyatukan); g) menyimpan dan menyusun indeks, dan h) melakukan komunikasi (lisan dan tertulis). Sementara menurut Nansen School, Birm, UK, (2001), fungsi staf TU adalah menangani urusan administrasi yang terbagi menjadi empat, yakni a) *school assistant*; b) *clerical assistant*; c) *finance assistant*; dan d) *general assistant.* Sedangkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 260

dan 261 1996, tugas pokok kepala tata usaha adalah: a) menyusun program kerja tata usaha sekolah; b) pengelolaan keuangan sekolah; c) pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa; d) pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah; e) penyusunan administrasi perlengkapan sekolah; f) penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah; g) mengoordinasikan dan melaksanakan 7 K; dan h) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta pengurusan ketatausahaan secara berkala.

Adapun menurut pandangan Soebroto (1972: 49), kegiatan tata usaha sekolah terdiri dari:

a. Administrasi kepegawaian
   Buku *Pedoman Administrasi Kepegawaian* menguraikan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, tugas, dan tanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan dan peningkatan tata usaha kepegawaian di sekolah. Sebagai perlengkapan tata laksana kepegawaian disediakan format-format untuk menata pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperlukan. Penggunaan format ini sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan pegawai/guru berkelangsungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dalam hal tersebut perlu disiapkan dan disediakan.
b. File Guru dan pegawai (Dokumen guru dan pegawai)
   File guru dan pegawai merupakan kumpulan data atau berkas masing-masing guru dan pegawai, seperti SK pengangkatan pertama hingga terakhir, SK berkala, Karpeg, Taspen, ijazah, dan lain-lain. File guru dan pegawai ini bertujuan memudahkan untuk mencari data dan arsip-arsip data guru serta pegawai.
c. Buku induk guru dan pegawai
   Buku ini berisi data-data guru dan pegawai. Manfaat buku ini adalah mengetahui jumlah guru yang ada dan urutan yang keberapa mulai berada di instansi tersebut dan lain-lain.
d. Buku kendali
   Buku ini berisi jadwal kenaikan pangkat dan gaji berkala bagi guru dan pegawai. Manfaatnya untuk mengetahui kapan guru atau pegawai akan naik pangkat dan kenaikan berkala.

literasi nusantara

e. Buku DP3
   Buku DP3 berisi sekumpulan nilai atas prestasi kerja yang dilakukan. Manfaat buku DP3 adalah untuk syarat kenaikan pangkat dan lain-lain.
f. Buku DUK
   Buku DUK merupakan daftar urutan pangkat guru dan pegawai. Adanya buku DUK adalah untuk mengetahui urutan pangkat tertinggi hingga terendah.
g. Buku catatan
   Buku ini berisi kejadian yang dilakukan masing-masing guru dan pegawai.
h. Buku cuti
   Buku cuti berisi data-data guru dan pegawai yang mengajukan cuti, seperti cuti melahirkan, cuti besar, dan lain-lain.
i. Buku mutasi
   Buku mutasi berisi catatan guru dan pegawai yang mutasi masuk atau mutasi keluar. Manfaat dari buku ini untuk mengetahui berapa guru dan pegawai yang berasal dari luar sekolah dan lain-lain.
j. Buku data sertifikat pelatihan/seminar guru dan pegawai
   Buku ini berisi data masing-masing guru dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan/seminar. Manfaat dari buku ini untuk mengetahui berapa banyak dan macam pelatihan yang telah diikuti oleh guru dan pegawai.
k. Rencana pengembangan SDM
   Program tersebut dibuat masing-masing sekolah yang tertuang dalam RAPBS.
l. Analisis kebutuhan guru
   Analisis kebutuhan guru bertujuan untuk mengetahui jumlah guru yang sesuai dengan bidang studi dan jumlah guru yang kurang sesuai sehingga diketahui jumlah guru yang dibutuhkan (perhitungan menggunakan rumus kebutuhan guru).

4. Peserta didik

   Siswa atau peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan karena tanpa adanya peserta didik, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Peserta didik juga sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan

literasi nusantara

ingin mencapainya secara optimal. Menurut Undang-Undang No. 20 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses peserta didik yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya Sudarwan Danim (2010: 1) mengatakan bahwa, "Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal." Peserta didik dapat belajar tanpa guru, sebaliknya, guru tidak dapat belajar tanpa kehadiran peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Sudarwan Danim (2010: 2) juga menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial terkait hakikat peserta didik, yaitu

a. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.
b. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama.
c. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri bukan sekadar miniatur orang dewasa.
d. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi baik jasmani maupun rohani meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan.
e. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi peserta didik sejati sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
f. Peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
g. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya.
h. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya.
i. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.

literasi nusantara

j. Peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki berbagai keunggulan, tetapi mungkin tidak bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya.

Di samping itu, Oemar Hamalik (2004: 99) juga menjelaskan bahwa, "Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran." Sedangkan Samsul Nizar (2002: 47) menjelaskan bahwa, "Peserta didik merupakan orang yang dikembangkan." Abu Ahmadi (1991: 251) juga menjelaskan bahwa, "Peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai pribadi atau individu." Lalu, Hery Noer Aly (1999: 113) menganggap peserta didik sebagai manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dan pengasihan orang tuanya, bukan pula anak-anak dalam usia sekolah.

Adapun Toto Suharto (2006: 123) mengartikan peserta didik sebagai makhluk Allah yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang belum tercapai taraf kematangan baik fisik, mental, intelektual, maupun psikologinya. Oleh karena itu, ia senantiasa memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju kedewasaan. Abdul Mujib (2006: 103) yang berpijak pada paradigma "belajar sepanjang masa" berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik. Ia juga mengatakan bahwa peserta didik cakupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak hanya dalam pendidikan formal, seperti sekolah, madrasah, dan sebagainya, tetapi mencakup pendidikan non-formal, seperti pendidikan di masyarakat, majelis taklim, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Lain halnya dengan Ahmad Tafsir (2006: 164—165) yang berpendapat bahwa istilah untuk peserta didik adalah murid bukan pelajar, anak didik, atau peserta didik. Pemakaian istilah murid dalam pendidikan mengandung kesungguhan belajar,

litera nusantara

memuliakan guru, dan keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar adalah wajib, dalam perbuatan mengajar dan belajar terdapat keberkahan tersendiri. Pendidikan yang dilakukan oleh murid dianggap mengandung muatan profan dan transendental. Lebih lanjut, sebutan murid lebih umum sama halnya dengan penyebutan anak didik dan peserta didik. Istilah murid memiliki ciri khas tersendiri dalam ajaran Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh kalangan sufi. Dalam tasawuf, istilah murid mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Hal ini berarti, hubungan antara guru dan murid adalah hubungan searah yang artinya pengajaran berlangsung dari subjek (guru) ke objek (murid). Sementara dalam ilmu pendidikan disebut pengajaran yang berpusat pada guru.

Murid dalam pengertian pendidikan umum adalah setiap kelompok atau sekelompok individu yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Murid dalam pengertian pendidikan secara khusus adalah anak yang belum dewasa yang menjadi tanggung jawab pendidik (Barnadib, 1989: 1). Sementara Abuddin Nata (2005: 131) mengatakan dari segi kedudukannya, anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dalam pandangan lebih modern anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, tetapi harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan karena melibatkan mereka ketika memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar.

literasi nusantara

Abdullah Nashih Ulwan dalam (Rahardjo, 1999: 59) mengatakan peserta didik adalah objek pendidikan. Ia merupakan pihak yang harus dididik, dibina, dan dilatih untuk mempersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya serta berakhlak mulia. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa keberhasilan dalam merealisasikan tujuan pendidikan secara optimal, faktor anak didik harus menjadi perhatian. Dalam hal ini peserta didik perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak mengalami banyak hambatan dalam menerima ajaran tauhid dan nilai-nilai kemuliaan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik bertindak sebagai pelaku, pencari, penerima, dan penyimpan serta untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan seorang pendidik/guru.

Tirtaraharja dalam Uyoh Sadullah (2010: 20) mengemukakan empat karakteristik siswa, yaitu

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik.
b. Individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar.
c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual.
d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya dan memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan.

Syamsul Nizar sebagaimana dikutip oleh Ramayulis (2006: 77) mendeskripsikan enam kriteria peserta didik sebagai berikut.

a. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi ia memiliki dunianya sendiri. Ia juga memiliki metode belajar mengajar tersendiri, tidak boleh dieksploitasi oleh orang dewasa dengan memaksakan anak didik untuk mengikuti metode belajar mengajar orang dewasa sehingga peserta didik kehilangan dunianya.
b. Peserta didik memiliki masa atau periodisasi perkembangan dan pertumbuhannya. Menurut Abraham Maslow, ada lima hierarki kebutuhan yang digolongkan menjadi dua: *pertama*, kebutuhan taraf dasar (*basic needs*) yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman, dan terjamin, cinta dan ikut memiliki (sosial) dan harga diri; *kedua*, meta kebutuhan (*meta needs*) meliputi aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya.
c. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor endogen (fitrah), seperti jasmani, intelegensi, sosial, bakat, dan minat serta faktor eksogen (lingkungan) dipengaruhi oleh pergaulan dan pengajaran yang didapatkan di lingkungan ia berada.

literasi nusantara

d. Peserta didik merupakan dua unsur utama, yakni jasmani (daya fisik) dan rohani (daya akal, hati nurani, dan nafsu).
e. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis. Artinya, meskipun terdiri dari banyak segi, peserta didik merupakan satu kesatuan jiwa raga (cipta, rasa, dan karsa).
f. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis (fleksibel).

Sumber Daya Fisik (Sarana Prasarana)

Beebagai alat penggerak pendidikan dan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di lembaga-lembaga tertentu. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Permendikbud No. 24 2007 menyebutkan sarana adalah perlengkapan peserta didik yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Adapun Nurchim (2016: 181) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabotan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, dan media pendidikan. Sedangkan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan departemen pendidikan dan kebudayaan, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Ada pula Wahyuningrum (2004: 5) berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah "Segala fasilitas yang diperlukan dalam proses peserta didik yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai."

Prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses peserta didik, seperti ruang teori, perpustakaan, ruang praktik

keterampilan, dan laboratorium; *kedua*, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak langsung digunakan untuk proses peserta didik tetapi sangat menunjang terjadinya proses pendidikan, seperti ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, jalan menuju sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Depdiknas (2008: 37) telah membedakan antara sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (Barnawi dkk, 2012: 47─48)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah segala perangkat peralatan bahan dan perabot yang dapat dipindah-pindah dan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sementara prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok, yaitu

1. Alat pelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses peserta didik, misalnya buku, alat tulis, penggaris, alat, dan bahan praktikum.
2. Alat peraga adalah semua alat bantu proses pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada anak didik baik yang bersifat abstrak maupun konkret misalnya gambar.
3. Media peserta didik adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses pendidikan. Media ini dibagi menjadi tiga, yaitu audio (*tape recorder*, radio, lab bahasa, dan sebagainya), visual (poster, bagan, gambar, kartun, dan sebagainya), dan audio visual (film, VCD, dan sebagainya).

E. Mulyasa (2003: 49) berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, taman sekolah dapat digunakan untuk pengajaran biologi, halaman sekolah untuk lapangan olah raga sehingga komponen tersebut tergolong sarana pendidikan. Sementara definisi sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi,

literasi nusantara

alat-alat, dan media pengajaran. Kemudian tim dosen jurusan administrasi pendidikan FIP IKIP Malang (1989: 135) menguraikan bahwa sarana pendidikan adalah semua peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contohnya gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan lain-lain. Lalu, Kasan (2000: 91) juga memaparkan bahwa sarana pendidikan adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan sarana pendidikan di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan adalah himpunan sarana yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Himpunan sarana ini menurut Danim (1994: 101—102) dikelompokkan menjadi empat. *Pertama*, sebagai sarana akademik, tenaga pengajar merupakan sarana yang perlu mendapat perhatian dan harus dikelola secara manusiawi. *Kedua*, sarana fisik tergantung bidang studinya. Satu bidang studi memerlukan jumlah dan variasi sarana yang berbeda dengan bidang studi lainnya seperti laboratorium jurusan. *Ketiga*, sarana administrasi merupakan sarana penunjang. Dalam penyelenggaraan pendidikan sistem kredit semester, maka dukungan administrasi yang kuat, cepat, dan tepat sangatlah penting. Hingga saat ini, perhatian sekolah terhadap administrasi masih kecil sehingga perlu diperbaiki guna mendukung keberhasilan sistem kredit semester. *Keempat*, sarana waktu adalah yang paling unik sebab ia abstrak dan paling sulit diatur atau tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, terjadinya penyelenggaraan pendidikan memerlukan bertemunya program, sarana, dan input pada suatu waktu. Karenanya suatu acara pendidikan yang tepat penyelenggaraannya bila diukur dengan waktu yang sudah hilang tidak akan dapat diulangi, melainkan hanya dapat dicarikan waktu pengganti. Dengan demikian, kesimpulannya, sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.

Secara umum, menurut pendapat ahli lain, sarana pendidikan terdiri atas tiga kelompok, yakni 1) bangunan dan perabot sekolah; 2) alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium; dan 3) media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio, visual, dan audio visual. Apabila dilihat dari jenisnya, saranan dan prasarana pendidikan dibedakan menjadi fasilitas fisik dan non-fisik (Gunawan, 1996:115). Fasilitas fisik atau material adalah

literasi nusantara

segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, media, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas non-fisik adalah benda hidup yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan usaha, seperti manusia, jasa, dan uang. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1990: 82), fasilitas atau sarana secara garis besar dapat dibedakan atas dua jenis, yakni

1. Fasilitas fisik (material) adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan dan mempunyai peranan untuk memudahkan serta melancarkan usaha, contohnya kendaraan, alat tulis-menulis, alat komunikasi, alat penampil atau praktik, dan sebagainya.
2. Fasilitas uang yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang, contohnya penyewaan kendaraan dan berekreasi.

Menurut Karwati (2014: 17), macam-macam sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah demi kelancaran serta keberhasilan kegiatan proses pendidikan adalah:

1. Ruang kelas yang merupakan tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
2. Ruang perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa sehingga mereka dapat menambah pengetahuan.
3. Ruang laboratorium (tempat praktik) adalah tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan masalah atau konsep pengetahuan.
4. Ruang keterampilan adalah tempat siswa untuk melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
5. Ruang kesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan seni.
6. Fasilitas olah raga adalah empat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.

Sumber Daya Keuangan

Sumber keuangan sekolah berupa dana yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Jones mengemukakan

financial planning is called budgeting merupakan kegiatan mengoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan (Mulyasa, 2011: 171). Sumber pembiayaan sekolah, terutama sekolah negeri berasal: dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin yakni gaji dan biaya operasional sekolah serta perawatan fasilitas; dana dari masyarakat, baik dari orang tua siswa dan sumbangan masyarakat luas atau perusahaan. Perlu diingat bahwa dana sangat berkaitan dengan kepercayaan, oleh karena itu jika sekolah ingin mendapatkan dukungan dana dari masyarakat, maka program yang dibuat sekolah harus menarik dan berjalan dengan baik serta bermanfaat. Dengan kata lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana (Fattah, 2012: 42─43).

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah fiskal, input sekolah terdiri dari karakteristik gedung, ketersediaan fasilitas belajar, kualitas dan kuantitas peralatan, strategi pengajaran, dan lainnya. Untuk dapat mewujudkan input-input tersebut, sekolah tentunya membutuhkan dana untuk melakukan pembiayaan. Biaya satuan di tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan setiap peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

literasi nusantara

Sedangkan menurut Supandi (1985), biaya pendidikan terdiri dari jenis-jenis berikut. *Pertama*, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mencakup gaji guru dan administrator, petugas bimbingan dan penyuluhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, material, tanah, dan bangunan. Sedangkan biaya tidak langsung mencakup semua ongkos dan pengeluaran yang secara tidak langsung untuk kegiatan proses pendidikan, seperti penghapusan dan keausan bangunan, pajak yang harus dibayar, dan insentif bagi pegawai. *Kedua,* biaya pribadi dan sosial. Biaya pribadi pendidikan adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, alat tulis, biaya transportasi, dan pemondokan. Sementara biaya sosial pendidikan ialah biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat, seperti hasil pemungutan pajak, sumbangan, atau hibah dari masyarakat. *Ketiga,* biaya moneter dan non-moneter. Biaya moneter adalah biaya yang berbentuk atau dapat dihitung

berdasarkan nilai keuangan. Sedangkan biaya non-moneter yaitu biaya yang tidak bersifat keuangan, antara lain pendapatan hilang atau kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan (mendapatkan uang) karena mengikuti kegiatan proses pendidikan. Jenis biaya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan, keperluan, dan undang-undang yang berlaku. Secara garis besar, biaya pendidikan dari pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni biaya rutin dan biaya pembangunan. Adapun menurut Nanang Fattah (2012: 46), sumber yang digunakan bagi alokasi pembiayaan pendidikan sebagaimana uraian berikut.

1. Dana Sumber APBN
   Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, sumber pendanaan pendidikan Indonesia ditanggulangi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dari alokasi dana sebesar 20% dari APBN dan APBD. Dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi pembangunan dan pembiayaan rutin. APBN adalah anggaran yang diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya pengeluaran dana merupakan tanggung jawab Presiden, tetapi beliau mendelegasikan tugas tersebut kepada menteri keuangan dan pendelegasian terus ke bawah sampai akhirnya dana tersebut diterima oleh kepala sekolah.

   Cara mengajukan anggaran rutin dilakukan melalui pengisian Usulan Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) yakni program tahunan sekolah yang terinci. Dalam UKOR yang telah disahkan oleh pemerintah akan menjadi daftar isian kegiatan yang berlaku sebagai surat keputusan otoritas. Selanjutnya, anggaran pembangunan diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat proyek. Dana tersebut bersifat tidak rutin, tetapi didasarkan atas kebutuhan yang mendesak.
2. Dana dari APBD
   Dana APBD dapat berasal dari daerah tingkat I maupun tingkat II. Biasanya dana tersebut bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana ini dapat digunakan untuk pendanaan rutin dan pendanaan pembangunan, tetapi tetap bergantung pada kebutuhan sekolah. Contoh pembiayaan rutin adalah membayar gaji tenaga honorer atau guru bantu, sedangkan pembiayaan pembangunan dapat direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olah raga, dan sejenisnya (Kompri, 2014: 326).

literasi

3. Dana dari wali murid
   Sekolah mempunyai badan perkumpulan bagi orang tua murid yang bernama komite sekolah. Lembaga ini berperan sebagai penyandang dana bagi sekolah dalam penyelenggaraan program-programnya. Namun belakangan ini, dana mulai dibatasi oleh kebijakan pemerintah terutama untuk sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang tujuannya untuk mendukung program pemerintah mengenai wajib belajar di tingkat dasar. Namun di balik kebijakan-kebijakan itu, pemerintah tidak mempunyai kekuasaan untuk menanggung semua pendanaan program-program di lembaga pendidikan. Mulyasa (2011: 177) memberikan contoh dana yang berasal dari orang tua murid, di antaranya: (a) Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP), (b) Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), (c) biaya pendaftaran murid baru, (d) biaya ujian akhir, (e) iuran ekstrakurikuler, (f) iuran perpustakaan, dan (g) bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.
4. Dana dari Sumber Lain
   Dana dari sumber lain sifatnya tidak mengikat dan partisipatif sukarela, seperti dana dari para alumni, infak dan sedekah dari para dermawan, sumbangan dari badan-badan usaha atau sejenisnya serta unit usaha sekolah, seperti kantin dan koperasi sekolah, dan penyewaan gedung serta fasilitas milik sekolah dan bunga tabungan sekolah.

literasi nusantara

Terkait dengan beberapa sumber dana pendidikan di atas, strategi sekolah dalam menggali dana pendidikan sangat diperlukan karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang tepat dalam lingkungan sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah strategi tersebut, Mulyasa (2011: 173) dapat merealisasikannya melalui penyelenggaraan kegiatan berikut.

1. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana.
2. Mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan.
3. Menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa pada awal tahun ajaran, musyawarah dengan dewan guru dan karyawan sekolah untuk mengembangkan unit usaha sekolah, menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta didik dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

Mujamil (2008: 150—151) menyatakan bahwa untuk menggerakkan sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, antara lain

1. mengajukan proposal bantuan finansial ke departemen agama maupun departemen pendidikan nasional;
2. mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah;
3. mengedarkan surat permohonan bantuan kepada wali siswa;
4. mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan;
5. mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha;
6. mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan uang;
7. memberdayakan waqaf, hibah, atau infaq; dan
8. memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan untuk membantu pencarian dana.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan, yaitu anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah, dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu (1) untuk pelaksanaan pelajaran, (2) untuk tata usaha sekolah, (3) untuk pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, (4) untuk kesejahteraan pegawai, (5) untuk administrasi pembinaan teknis edukatif, dan (6) pendataan. Sedangkan bentuk-bentuk desain anggaran meliputi:

1. Anggaran butir per butir (*Line item budget*)
   Anggaran ini merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah dibuat, misalnya gaji, upah, dan honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir serta perlengkapan, sarana, dan material dengan butir tersendiri.
2. Anggaran program (*Program budget sistem*)
   Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Biaya per butir dihitung berdasarkan jenis butir (item) yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program

biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya jika anggaran butir per butir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen dan komponen lain yang termasuk program percobaan mencangkup alat-alat IPA, bahan-bahan kimia, IPA, dan sebagainya menjadi satu paket.

3. Anggaran berdasarkan hasil (*Performance budget*)
   Anggaran ini menekankan hasil performansi, bukan perincian dari alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk bahan kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.
4. Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning programming budgeting sistem*/PPBS/SP4)
   Sistem ini adalah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, dan kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

literasi nusantara

Di samping sebagai alat perencanaan, anggaran juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga dan menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sarana yang telah ditetapkan. Selain itu, anggaran juga dapat mengantisipasi keborosan-keborosan dan dapat dijadikan alat untuk memengaruhi dan memotivasi pimpinan, manajer, atau karyawan agar bertindak efisien dalam mencapai sarana-sarana lembaga. Fungsi lain anggaran adalah sebagai alat penaksiran, alat otorisasi pengeluaran dana, dan alat efisiensi yang merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian keuangan.

literasi
nusantara

7
EVALUASI MANAJEMEN KURIKULUM

Pengertian

Penggunaan kata "evaluasi" sering dijumpai dalam kegiatan peserta didik untuk mengetahui hasil belajar atau dalam manajemen sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada dasarnya, evaluasi merupakan bagian dari proses pengawasan yang dilaksanakan para manajer atau pimpinan organisasi. Sebagai bagian fungsi manajemen, maka pengawasan organisasi mengacu pada proses yang sistematis dari pengaturan aktivitas organisasi untuk membuat mereka konsisten dengan pengharapan yang tersusun dalam rencana, target, dan standar kinerja (Richard L. Daft, 2008: 378).

Evaluasi adalah proses pemantauan untuk memastikan derajat pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui proses perencanaan dalam satu organisasi. Organisasi pendidikan secara makro adalah Departemen atau Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan secara messo pengaturan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara mikro pengaturan kurikulum pendidikan dilakukan oleh sekolah, madrasah, atau pesantren, termasuk perguruan tinggi.

Proses pembuatan keputusan sebagaimana dilakukan dalam perencanaan tidak sempurna jika tidak dilakukan terhadap evaluasi proses atau evaluasi hasil terhadap kegiatan sebagai pelaksanaan program. Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai atau jika yang diharapkan tidak terwujud atau terjadi dalam kenyataan menjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu diperlukan satu tindakan

perbaikan yang harus dilakukan. Dalam konteks ini evaluasi adalah bentuk pengawasan manajerial. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan data untuk mengukur hasil kinerja dan membandingkan dengan sasaran yang ditetapkan. Jika hasil yang dicapai kurang dari apa yang diinginkan, maka perlu waktu untuk menilai ulang dan kembali kepada langkah sebelumnya/awal. Di sinilah pengambilan keputusan berjalan dan berproses terus-menerus menjadi dinamis dalam proses manajemen. Evaluasi adalah suatu yang mudah bila pada tahap sasaran yang jelas, target terukur, dan terjadwal ketika menyusunnya (Schermerhorn, 2010: 165).

Menurut Teguh Triwiyanto (2015: 183), evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Masukan adalah segala sesuatu sumber dan/atau daya yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan hasil pendidikan; proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengolah masukan pendidikan, seperti peserta didik, pengembangan tenaga kependidikan, dan kurikulum; *output* adalah salah satu jenis hasil pendidikan ketika peserta didik belum sampai pada klasifikasi hasil pendidikan. Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan rencana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam program atau kegiatan. Tegasnya, evaluasi adalah penyediaan informasi untuk kepentingan memfasilitasi pembuatan keputusan dalam berbagai langkah pengembangan kurikulum. Informasi berkaitan dengan program sebagai kesatuan utuh atau hanya berkenaan dengan beberapa komponen. Evaluasi juga mengaplikasikan pemilihan kriteria, sekumpulan data, dan analisis (Rusman, 2009: 98)

Para ahli mendefinisikan evaluasi kurikulum dengan beragam pengertian: Sukmadinata mengungkapkan bahwa evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum; Tyler yang dikutip oleh Wahyudin mengartikan evaluasi sebagai, "*The process for determining the degree to which these change in behavior are actually taking place*—evaluasi fokus pada upaya menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (behavior)"; Dinn Wahyudin (2014: 27) mengatakan bahwa evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu;

literasi nusantara

Nasution dalam Sukiman (2015: 194) mendefinisikan evaluasi kurikulum merupakan hal yang kompleks karena banyaknya aspek yang harus dievaluasi, banyaknya orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Di samping itu, evaluasi kurikulum juga berhubungan dengan definisi kurikulum yang diberikan, apakah berupa bahan pelajaran menurut disiplin ilmu ataukah dalam arti yang luas meliputi pengalaman anak di dalam maupun di luar kelas.

Istilah evaluasi biasanya merujuk pada proses membuat penilaian, menetapkan nilai, atau memutuskan yang baik (Richard L. Arends, 2004: 218). Selain itu evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program atau kegiatan. Efisiensi adalah pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai hasil yang optimal; efektivitas adalah keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya; manfaat adalah nilai atau hasil lebih yang diperoleh dari hasil pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah dilakukan; dampak adalah hasil atau keuntungan sebagai akibat dari program atau kegiatan yang dilaksanakan (Teguh Triwiyanto, 2015: 183).

Keberadaan kurikulum sebagai kumpulan konseptual tentang tujuan, materi, metode, media dan evaluasi proses serta hasil menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran, khususnya pedoman untuk membelajarkan anak didik sehingga potensi mereka berkembang secara maksimal. Oleh sebab itu, kurikulum dari waktu ke waktu menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Karena dalam manajemen pendidikan, bidang kurikulum merupakan bagian integral dari manajerial yang harus mendapat peninjauan terus-menerus dan sejalan dengan dinamika perkembangan zaman. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (*feed back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum (Zainal Arifin, 2012: 263)

Pemantauan dan penilaian kurikulum merupakan salah satu fungsi manajemen kurikulum sebagai tugas yang harus dikerjakan manajer mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator sistem pendidikan nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan dalam ruang lingkup kewilayahan pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non-formal (Oemar Hamalik, 2008: 217)

literasi nusantara

Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan para pemegang kebijakan pendidikan, para perencana, dan pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Selain itu, juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Sukmadinata (2013: 172) juga berpendapat bahwa evaluasi kurikulum sukar dirumuskan secara tegas sebab dipengaruhi faktor berikut.

1. Evaluasi kurikulum berkenan dengan fenomena yang terus berubah.
2. Objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan.
3. Evaluasi kurikulum merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah.

Menurut S. Hamid Hasan yang dikutip oleh Rusman (2010: 91), evaluasi kurikulum dan pendidikan memiliki karakteristik yang tidak dapat terpisahkan. Karakteristik itu lahir dari berbagai definisi untuk istilah teknis yang sama. Demikian dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Hal tersebut disebabkan filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi. Sementara itu menurut Morrison, evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ada tiga faktor utama, yaitu: 1) pertimbangan; 2) deskripsi objek penilaian; dan 3) kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sukmadinata (2013: 172), evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang berdiri sendiri. Ada pihak lain yang berpendapat bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan, di sisi lain ada pula pihak yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan (hubungan sebab akibat) yang sangat erat. Perubahan dalam kurikulum tentu berpengaruh pada pelaksanaan kurikulum. Hubungan antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organi dan prosesnya berlangsung secara evolusioner. Pandangan-pandangan lama yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman secara berangsur-angsur diganti dengan pandangan baru yang lebih sesuai.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses menilai keberhasilan dari program yang

literasi nusantara

dilaksanakan, apakah sudah mencapai tujuan atau belum dalam rangka memberikan masukan dan membuat keputusan untuk perbaikan program yang dilaksanakan lebih lanjut. Dengan begitu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan oleh semua level manajemen kementerian pendidikan nasional, termasuk pusat kurikulum nasional sebagai unit pelaksana teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Tim pengembang kurikulum pada tingkat satuan pendidikan melaksanakan pengembangan kurikulum dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas relevansi dan program pendidikan nasional pada semua jenjang pendidikan, tidak terkecuali satuan pendidikan yang dikembangkan dan dalam tanggung jawab Kementerian Agama RI.

Tujuan

Kurikulum adalah kumpulan konsep yang dihasilkan manusia berdasarkan pikiran, pengalaman, peradaban, sejarah, dan nilai-nilai maupun dokumen tentang rencana, pelaksanaan, dan evaluasi peserta didik di dalam maupun di luar kelas (perpustakaan, laboratorium, atau praktik lapangan, observasi, studi proyek, dan lain-lain). Hasil pelaksanaan kurikulum yang diwujudkan dalam proses pembelajaran dan evaluasi peserta didik tidak dapat langsung diketahui, kecuali dilakukan evaluasi oleh evaluator baik pejabat bidang pendidikan maupun kepala sekolah, pengawas, dan guru.

Evaluasi yang baik dilakukan secara komprehensif mencakup semua langkah kegiatan dan komponen kurikulum, menilai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang, hingga para pelaksana kurikulum. Dalam hal ini, ada beberapa model evaluasi kurikulum yang dikembangkan para ahli kurikulum. *Pertama*, model diskrepansi (*discrepancy model*) yakni menilai *discrepancy* atau kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. *Kedua*, Stake mengembangkan model kontingensi-kontingensi (*contingency-congruence model*) yang juga membandingkan apa yang diharapkan dengan yang dilaksanakan, tetapi selanjutnya para pelaksana kurikulum membuat rancangan untuk mendekatkan harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga cocok atau sesuai dengan kegiatan belajar siswa. *Ketiga*, Stufflebeam mengembangkan model *context, input, process,* dan *product* (CIPP) yang mengevaluasi seluruh komponen kurikulum, mulai dari tujuan yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat; input atau masukan

yaitu siswa sebagai subjek yang belajar dan guru sebagai subjek yang mengajar, desain kurikulum sebagai rancangan pembelajaran, media, dan sarana-prasarana sebagai alat bantu pengajaran; proses atau aktivitas siswa belajar dengan arahan, bantuan, dan dorongan dari guru, produk atau hasil, baik yang dapat dilihat dalam jangka pendek pada akhir pendidikan atau hasil jangka panjang setelah belajar atau belajar pada jenjang yang lebih tinggi (Mohammad Ali dkk, 2007: 457).

Tujuan evaluasi adalah mengukur capaian kegiatan yakni sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan. Arikunto sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Triwiyanto (2015: 183) menyatakan bahwa agar pengukuran tujuan dapat diketahui secara cermat dan teliti hingga diketahui bagian mana yang dapat diimplementasikan dan yang tidak dapat diimplementasikan beserta penyebabnya sehingga tujuan evaluasi tersebut perlu dirinci. Untuk dapat mengadakan rincian terhadap tujuan evaluasi, evaluator dituntut mampu mengenali komponen-komponen kegiatan.

Jika evaluasi telah dilakukan, maka kita akan mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan melalui kurikulum telah dicapai. Dalam konteks ini evaluasi yang dikembangkan berdasarkan pandangan filosofis fenomenologi yang melahirkan pendekatan kualitatif dalam evaluasi kurikulum bertujuan untuk menekankan cita-cita demokratis karena segenap anggota masyarakat dan *stakeholders* lain memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dari evaluasi. Dengan kata lain, evaluasi bukan milik sekelompok orang yang dinamakan pengambil keputusan, tetapi dimiliki setiap orang yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap kurikulum.

Evaluasi kurikulum menjadi proses penting untuk menentukan hasil yang dicapai. Keberadaan evaluasi dapat menjadi proses untuk meninjau ulang kemajuan pendidikan dan melakukan inovasi serta gagasan baru untuk mengembangkan kurikulum selanjutnya. Posisi hasil evaluasi kurikulum tidak dapat diabaikan hingga dilakukan evaluasi selanjutnya. Oleh karena itu, harus ada tindak lanjut dari para evaluator, perancang kurikulum, bahkan guru sebagai tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah dan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan kata lain, hasil evaluasi merupakan balikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Fungsi utama evaluasi adalah diagnosis, prediksi, seleksi, dan penetapan peringkat atau nilai dari tugas atau kegiatan yang telah dikerjakan para praktisi pendidikan.

literasi nusantara

Di sisi lain, evaluasi kurikulum dipahami sebagai upaya penyempurnaan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai kriteria dan indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program (Wahyudin, 2014: 148).

Evaluasi kurikulum menjadi tugas para manajer, perencana, pengembang dan pengawas pendidikan. Menurut Hamid Hasan (2010: 58) tujuan evaluasi kurikulum adalah

1. Menyediakan infromasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambil keputusan.
2. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam lingkungan tertentu.
3. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum.
4. Memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan pelaksanaan kurikulum.

Proses

Sebagai suatu sistem, keberadaan kurikulum dalam dunia pendidikan diyakini bermanfaat bagi perubahan perilaku anak didik jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan para manajer pendidikan pada: tingkat makro (menteri pendidikan, dirjen pendidikan dasar dan menengah, para direktur); tingkat messo (gubernur, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, kabupaten/kota), maupun tingkat mikro (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan guru-guru) di dalam sistem persekolahan. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan bertanggung jawab terhadap pencapaian keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan.

Program penilaian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka penilaian kurikulum sebagai alat pengelola dan evaluator. Program penilaian kurikulum memuat (Hamalik, 2008: 217):

1. penentuan tujuan program penilaian;
2. penilaian terhadap instrumen penilaian;
3. pengadministrasian penilaian;
4. pengolahan data;

5. penganalisisan penafsiran;
6. pendayagunaan hasil penilaian; dan
7. pencatatan serta pelaporan.

Menurut Hamid Hasan (2010: 160), proses yang dapat dilalui evaluator dalam melaksanakan evaluasi kurikulum adalah:

1. Kajian terhadap evaluan
   Tahap ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan evaluator terhadap kurikulum atau bentuk kurikulum yang menjadi evaluannya. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum. Dalam hal ini, evaluator harus mempelajari secara mendalam latar belakang munculnya kurikulum, landasan filosofis dan teoretis kurikulum, ide kurikulum, model kurikulum yang digunakan untuk dokumen kurikulum, proses pengembangan dokumen kurikulum, proses implementasi kurikulum, dan evaluasi hasil belajar.
2. Pengembangan proposal evaluasi
   Berdasarkan kajian yang dilakukan pada langkah pertama, kemudian evaluator mengembangkan proposalnya. Untuk itu, evaluator memutuskan pendekatan dan jenis evaluasi yang akan dilakukan serta memastikan apakah yang akan digunakan adalah evaluasi kuantitatif atas kualitatif.
3. Pertemuan dan diskusi
   Hasil diskusi dengan pengguna jasa akan menentukan apakah proposal yang diajukan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika evaluator berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi, maka proposal yang diajukan mungkin akan disetujui dan pekerjaan evaluasi akan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika pada pertemuan tersebut evaluator tersebut tidak berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi, maka proposal tersebut tidak akan terlaksana. Artinya, tidak ada pekerjaan evaluasi yang dilakukan berdasarkan proposal tersebut.
4. Revisi proposal
   Revisi proposal adalah tahap tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengguna jasa evaluasi dengan evaluator. Apabila dalam pertemuan dan pembicaraan berbagai komponen harus direvisi, maka evaluator wajib merevisi kurikulum tersebut. Kemudian, hasil revisi harus diperlihatkan kembali kepada pengguna jasa evaluasi hingga disetujui.

literasi nusantara

5. Rekruitmen personalia
   Kegiatan ini dapat dilakukan ketika proposal disusun.
6. Pengurusan persyaratan administrasi
   Setiap kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum memerlukan berbagai formalitas administrasi. Evaluator harus mendapatkan persetujuan dari pengguna kurikulum, pimpinan sekolah atau atasannya, dan mungkin juga dari pejabat yang terkait dengan keamanan sosial politik.
7. Pengorganisasian pelaksanaan
   Tahap ini merupakan kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Semakin luas objek yang dievaluasi, maka semakin banyak pula jumlah evaluator yang dibutuhkan dan akan semakin rumit pula pekerjaan manajemen yang harus dilakukan.
8. Analisis data
   Analisis data merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Ketika model yang digunakan adalah model kuantitatif, maka data utama yang digunakan pun data kuantitatif, begitu pun dengan model kualitatif. Lalu, data-data diolah menggunakan perangkat lunak yang telah ditetapkan. Analisis data adalah pekerjaan profesional dan harus dilakukan oleh evaluator utama beserta tim. Pekerjaan ini merupakan bentuk tanggung jawab profesional dan memerlukan wawasan serta pemahaman terhadap evaluan untuk menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Penulisan laporan
   Tahapan ini harus dikerjakan oleh evaluator dan timnya. Terdapat dua bentuk laporan yang dapat digunakan, yakni a) laporan eksekutif merupakan model laporan yang ditulis dan dikembangkan untuk dibaca para eksekutif yang memiliki waktu terbatas; dan 2) laporan lengkap adalah model laporan yang dikembangkan untuk dibaca orang-orang yang memiliki banyak waktu luang.
10. Pembahasan laporan dengan pengguna jasa
    Pembahasan ini diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Jika pengguna jasa memerlukan tambahan informasi yang memang tercantum dalam kontrak, maka evaluator wajib melengkapinya.

literasi nusantara

11. Penulisan laporan akhir
    Laporan akhir adalah hasil dari revisi yang harus dilakukan evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Jika dalam pembahasan tersebut pihak pengguna sudah tidak mengajukan revisi, maka laporan awal dapat langsung dijadikan laporan akhir. Namun, jika dari hasil pembahasan diperlukan berbagai revisi, maka evaluator harus menulis laporan akhir berdasarkan revisi tersebut.

Dalam konteks ini, evaluasi kurikulum yang dilaksanakan akan menghasilkan tindak lanjut dengan melakukan pembentukan ulang dan pelaksanaan ulang kurikulum. Proses yang ditempuh mensyaratkan pengaturan ulang dan penyesuaian kebiasaan pribadi cara guru mengajar, cara bekerja, penekanan program, ruang kelas untuk peserta didik, dan penjadwalan program kurikulum. Artinya, para penduduk berusaha mengganti dari program sekarang dengan program baru dengan memodifikasi program baru yang dapat mencapai apa yang diinginkan dengan temuan bahwa ada penolakan besar atas kurikulum sebelumnya.

Meskipun pengalaman para pemimpin pendidikan dalam aktivitas kurikulum telah diwujudkan bahwa implementasi adalah aspek pengembangan kurikulum, tetapi hanya 10 atau 17 tahun belakangan persoalan pelaksanaan menjadi kepedulian utama pendidik. Apabila evaluasi pelaksanaan diperlukan pertimbangan berbagai asumsi pendidikan dalam pelaksanaannya, banyak asumsi bahwa pelaksanaan/kurikulum adalah hal yang sederhana dari langkah lain. Dalam konteks ini evaluasi kurikulum menjadi tahap penentuan apakah program kurikulum masih dapat dipertahankan secara argumentatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi maupun tujuan kurikulum, dan tujuan mata pelajaran sebagai langkah progresif dalam mencapai kompetensi dan profil lulusan setiap satuan pendidikan nasional.

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan mencermati capaian tujuan kurikulum yang ditetapkan melalui prinsip-prinsip di bawah ini.

1. Prinsip relevansi artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip ini berkaitan dengan: relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik; relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan; dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.

2. Prinsip efektivitas belajar peserta didik artinya sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.
3. Prinsip efisiensi artinya perbandingan antara hasil yang dicapai (*output)* dan usaha yang telah dikeluarkan (*input*). Prinsip ini dapat ditinjau dari waktu, tenaga, peralatan, dan biaya.
4. Prinsip kesinambungan artinya saling terkait antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah harus mempertimbangkan: (a) bahan pelajaran pada tingkat sekolah selanjutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya; dan (b) bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah lebih rendah tidak perlu diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Sedangkan kesinambungan antara berbagai bidang studi harus memperhatikan urutan penyajian dan terjalin dengan baik.
5. Prinsip fleksibilitas artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak (tidak kaku). Menurut Rusman (2010: 94), fleksibilitas ini mencakup fleksibilitas peserta didik dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas pendidikan dalam mengembangkan program peserta didik.

Dalam konsep yang luas, evaluasi kurikulum merupakan proses komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Evaluasi pada hakikatnya merupakan proses membuat keputusan suatu nilai dari suatu objek. Keputusan evaluasi (*value judgement*) tidak hanya didasarkan pada pengukuran (*quantitative description),* tetapi dapat pula berdasarkan hasil pengamatan (*qualitative description*). Baik pengukuran yang didasarkan hasil pengukuran (*measurement*) maupun bukan pengukuran (*non-measurement*) pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang program/kurikulum yang dievaluasi.

Permendikbud 159 Tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan perimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui pendekatan, strategi, dan model evaluasi kurikulum sesuai dengan tujuan atau sasaran evaluasi. Pendekatan evaluasi kurikulum merupakan cara pandang dalam mengevaluasi kurikulum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan penilaian ahli berdasarkan kriteria sesuai model yang diterapkan untuk memperoleh informasi

dan data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen yang telah divalidasi sesuai model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Selain pendekatan, evaluasi kurikulum juga dilakukan dengan menggunakan strategi dan model tertentu. Strategi evaluasi kurikulum dilakukan secara deduktif atau induktif dengan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid. Sementara itu, model evaluasi kurikulum merupakan kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan peserta didik. Model evaluasi kurikulum yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, antara lain evaluasi bebas tujuan, analisis kesesuaian atau kesenjangan, studi, kasus, iluminatif, dan responsif. Dalam pendekatan kuantitatif model evaluasi kurikulum yang digunakan, antara lain evaluasi bebas tujuan, pendekatan sistem, dan penilaian akuntabilitas.

Fungsi

Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Tujuan evaluasi kurikulum adalah mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara ide dengan desain kurikulum, antara desain dengan dokumen kurikulum, antara dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum, dan antara ide, hasil, dan dampak kurikulum.

Ide kurikulum merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoretis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang digunakan sebagai landasan, kerangka, dan pengembangan kurikulum. Rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan peserta didik disebut dengan desain kurikulum yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dokumen kurikulum adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi:

1. dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
2. dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;
3. pedoman implementasi kurikulum;

4. buku teks pelajaran;
5. buku panduan guru; dan
6. dokumen kurikulum lainnya.

Agar mencapai tujuan yang nyata, maka ide, desain, dan dokumen yang telah ditentukan harus diimplementasikan. Dalam hal ini implementasi kurikulum merupakan proses realisasi desain kurikulum yang diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Implementasi dari ide, desain, dan dokumen diharapkan dapat menghasilkan perubahan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai capaian peserta didik yang diwujudkan dalam bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, implementasi ide kurikulum juga diharapkan berdampak pada perubahan sikap masyarakat sekitar.

Evaluasi kurikulum dilakukan terhadap pengembangan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulum yang mencakup hal-hal berikut.

1. Pengembangan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara substansi dokumen kurikulum dengan desain kurikulum.
2. Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara implementasi kurikulum dan dokumen kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum mencakup:
    a. Evaluasi implementasi kurikulum terbatas yaitu evaluasi terhadap muatan atau mata pelajaran untuk tingkat kelas atau untuk satuan pendidikan tertentu.
    b. Evaluasi implementasi kurikulum penuh yaitu evaluasi terhadap muatan peserta didik atau mata pelajaran untuk seluruh tingkat kelas atau seluruh satuan pendidikan.
3. Evaluasi terhadap hasil kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara capaian peserta didik dengan kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan.
4. Evaluasi dampak kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi pemerolehan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terhadap perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian agama, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, kantor kementerian agama kabupaten/kota, komite satuan pendidikan/dewan pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum terdapat beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Evaluasi reflektif dilakukan pada saat pengembangan dokumen kurikulum. Tujuannya untuk pengambilan keputusan perbaikan proses pengembangan dokumen kurikulum.
2. Evaluasi formatif dilakukan setelah implementasi kurikulum secara terbatas atau penuh. Tujuannya untuk pengambilan keputusan perbaikan implementasi kurikulum.
3. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi kurikulum secara penuh paling sedikit lima tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk pengambilan keputusan penyempurnaan kurikulum.

Ulfatin (2014: 335) berpendapat bahwa evaluasi kurikulum 2013 juga perlu dilakukan perbaikan. Tiga bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam evaluasi kurikulum adalah: *pertama*, makna kurikulum bisa bervariasi mulai kurikulum (K13) yang dipandang secara programatik sehingga mampu menjelaskan seberapa luas program-program yang menjadi tanggung jawab sekolah; *kedua,* organisasi kurikulum 2013 sudah mencerminkan keterpaduan komponen-komponen kurikulum, tetapi hanya tampak pada submata pelajaran dalam struktur kurikulum, belum pada keseluruhan kegiatan, termasuk ekstrakulikuler. Selain itu, rumusan standar kompetensi lulusan masih tampak parsial yang menggambarkan satuan domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta mendeskripsikan rumusan kompetensi lulusan berada pada tingkat domain standar kebutuhan perkembangan anak secara teoretis pendidikan.

Penilaian kurikulum harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh serta proporsional sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Sementara penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktik, analisis keterampilan, dan analisis tugas serta penilaian oleh peserta didik itu sendiri. Adapun penilaian aspek sikap dapat dilakukan dengan daftar isian sikap (pengamatan pribadi) dari diri sendiri dan daftar isian sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti.

Peraturan Pemerintah No. 32 2013 tentang Penataan standar Nasional Pendidikan mengemukakan beberapa ketentuan penilaian/ evaluasi kurikulum sebagai berikut.

1. Evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
2. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
3. Evaluasi muatan nasional dan lokal dilakukan oleh pemerintah.
4. Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
5. Evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
6. Evaluasi muatan nasional, lokal, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat.
7. Evaluasi kurikulum digunakan untuk penyempurnaan kurikulum.

Untuk mendapatkan data yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang penilaian kurikulum dapat dilakukan dengan menilai rancangan kurikulum dan pengembangan kurikulum di kelas. Rancangan kurikulum harus diarahkan dan diprioritaskan terhadap program peserta didik dan layanan sebagai kerangka kerja untuk perencanaan kelas. Ketika menyusun rancangan kurikulum, maka guru harus dilibatkan secara langsung dalam proses dialog. Inilah garis besar yang menjadi poin-poin referensi di masa depan yang dapat dibandingkan kemajuannya dengan kriteria dari kurikulum yang paling baik.

1. Keputusan evaluasi seharusnya dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan, seperti sekolah, orang tua, administrator, anggota masyarakat, dan mungkin orang-orang dari perguruan tinggi setempat. Jika dalam kelompok tersebut tidak ada yang terlatih dalam hal evaluasi, maka langkah pertama adalah mengadakan pelatihan.
2. Beberapa pertanyaan terkait evaluasi yang perlu dijawab adalah: (a) Siapa yang harus dan tidak harus dilibatkan dalam perancangan kurikulum? (b) Masalah dan isu apa yang perlu dijadikan sasaran? (standar, tujuan, asumsi, organisasi kunci, atau ilustrasi skenario) (c) Bagaimanakah kelompok membagi tugas dengan anggota sekolah dan masyarakat dalam menganalisis

rancangan, rancangan alternatif, standar kompetensi nasional dan lokal, serta kaitannya dengan pemuda sekarang dan masa depan? (d) Bagaimana rancangan draft yang dipadukan dengan anggota sekolah lain dan masyarakat? (e) Apakah asumsi, konsep, dan kesan tentang peserta didik, belajar, pengetahuan, peserta didikan, kurikulum, dan persekolahan dipertimbangkan dalam analisis rancangan dan praktik kurikulum, proposal, dan pernyataan rancangan kurikulum akhir? (f) Apakah asumsi dan prinsip yang berkaitan dengan kesimpulan dari peserta didik tertentu yang perlu dipertimbangkan dan digunakan? (g) Dalam cara apakah peserta didik dan guru berhubungan? (h) Dalam cara dan untuk apa persamaan, keadilan, dan pelayanan terhadap seluruh peserta didik dipertimbangkan? (i) Bagaimanakah pandangan alternatif yang menyenangkan dan konflik dipecahkan serta untuk apakah partisipan merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan bijaksana? (j) Kapankah perhatian direpresentasikan?

3. Pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan rancangan kelompok, termasuk observasi dan rekaman dari setiap pertemuan. Menganalisis data mentah, termasuk mengidentifikasi isu-isu rancangan khusus mencakup: (a) platform: standar kompetensi, tujuan, asumsi, inklusi, kenyamanan, kekuasaan, rasa percaya diri peserta didik, dan civik agensi; (b) pengorganisasian kurikulum: jenis pengorganisasian, kapasitas untuk peserta didik, kemenarikan, kapasitas materi, dan sebagainya; (c) isi: perspektif materi kurikulum yang dikembangkan; (d) penjabaran organisasi terhadap kegiatan yang berlebihan, cakupan, dan urutan; (5) bahan-bahan: peralatan seperti komputer dan perangkat lunaknya atau peralatan laboratorium, misalnya untuk matematika dan sains.

Kriteria yang digunakan untuk menafsirkan dan memutuskan data merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kualitas. Kriteria untuk menafsirkan dan memutuskan data mencakup: kejelasan bahasa dan pikiran, cakupan yang komprehensif, kelayakan, koherensi, efisiensi, kenyamanan, keaslian, keterlibatan, efektivitas, keinklusifan, dan kesamaan. Sehubungan dengan itu, pengolah data, pembuat keputusan, dan pengguna keputusan tentang evaluasi sebuah rancangan kurikulum memerlukan beberapa orang yang harus dilibatkan dalam menganalisis data.

literasi nusantara

Tujuan utama pelibatan anggota sekolah dalam perancangan kurikulum adalah menciptakan kondisi umum terhadap perencanaan kurikulum. Sebab perbedaan antara perancangan dengan perencanaan tidak terlalu mencolok dalam pengembangan kurikulum, banyak pertimbangan dalam perancangan kurikulum juga digunakan untuk mengevaluasi perencanaan kurikulum. Tantangannya bahwa pemecahan masalah dan pemikiran guru sering merupakan kegiatan pribadi, padahal semua itu akan memengaruhi pengembangan kurikulum; mengapa mereka menekankan informasi atau bahan tertentu, atau bagaimana mereka memandang peserta didiknya dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap rancangan kurikulum.

Beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai rancangan kurikulum adalah

1. Aktor utama dalam evaluasi adalah guru, tetapi kepala sekolah, supervisor, dan konsultan juga memiliki kepentingan dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, mereka perlu memahami hubungan antara perancangan, perencanaan guru, dan kondisi kelas secara khusus.
2. Pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut: (a) bagaimanakah guru menafsirkan tujuan, rasional, dan konsep kunci terhadap rancangan kurikulum? (b) bagaimanakah guru menafsirkan minat dan kesiapan peserta didik dalam memahami materi dan membentuk kompetensi? (c) apakah guru merasa nyaman dengan kompetensi dasar, materi standar, dan strategi belajar yang digunakan?
3. Analisis dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan: (1) melakukan analisis isi terhadap jurnal untuk mengidentifikasi ide-ide yang dipertimbangkan dan kriteria yang digunakan; dan (2) mewawancarai guru tentang alasannya memilih menjadi guru dan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran.
4. Kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas guru dalam perencanaan kurikulum sama dengan kriteria yang disarankan dalam perancangan kurikulum.
5. Pengolah data, pembuat keputusan, dan pengguna keputusan bertugas mengumpulkan data. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus melibatkan guru karena informasi yang dihasilkan adalah untuk guru dalam menilai peserta didik yang dilakukannya (Mulyasa, 2014: 135—141).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum melibatkan banyak komponen sumber daya manusia dalam

literasi nusantara

pelaksanaan kurikulum. Perencana dan pengembangan kurikulum atau Pusat Kurikulum Nasional sebagai unit manajerial yang melakukan evaluasi kurikulum adalah dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, kabupaten dan kota, serta pihak sekolah. Upaya memastikan keberhasilan kurikulum dalam praktik pembelajaran juga berarti ada evaluasi proses (formatif) dan hasil (sumatif). Oleh karena itu, proses evaluasi kurikulum dalam rangka perbaikan atau pengembangan kurikulum diperlukan data atau informasi untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka perbaikan.

literasi nusantara

8
TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER SERTA PERSONIL SATUAN PENDIDIKAN DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

Manajemen Kurikulum

Secara etimologis, kata 'manajemen' (*management*) diartikan sebagai pimpinan, direksi, dan pengurus. Kata tersebut diambil dari kata kerja '*manage*' dalam bahasa Prancis yang artinya tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa Latin berasal dari kata '*managiere*' yang terdiri dari dua kata, yakni '*manus*' berarti tangan dan '*agree*' berarti melakukan atau melaksanakan (Mannulang, 1976).

Dikutip oleh Mannulang dari George R Terry, mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Manajemen diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Nanang Fattah mengutip Luther Gulick menyatakan bahwa manajemen dipandang sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Sementara dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer dan para profesional dituntun oleh kode etik (Nanng Fattah, 2001).

Adapun beberapa ahli juga mendefinisikan manajemen, di antaranya: Umar Hamalik (2010) menguraikan manajemen adalah

proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia dan sumber-sumber lainnya menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya; Nanang Fattah yang mengutip pernyataan Mary Parker Follet mengatakan bahwa manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang—*The art getting things done through people*; Manulang mengutip pendapat Oey Liang Lee menyebutkan bahwa, "*Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.*"

Kurikulum berasal dari bahasa Latin '*curriculae*', artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh siswa untuk memperoleh ijazah (Oemar Hamalik, 2005). Sementara pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan adalah lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Menurut Rusman (2012), kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

literasi nusantara

Pengertian lain dari kurikulum adalah program pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai aktivitas belajar sehingga perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Makna semantik kurikulum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tradisional, modern, dan masa kini. Secara tradisional, kurikulum adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau bidang studi; secara modern, kurikulum merupakan semua pengalaman aktual yang diiliki siswa di bawah pengaruh sekolah; di masa kini, kurikulum diartikan sebagai strategi yang digunakan untuk mengadaptasi pewarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah (Sulistyorini, 2009).

Definisi kurikulum menurut para ahli yang dikutip oleh Rusman dari Saylor, Alexander, dan Lewis (1974), kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Sementara dari Harold B. Alberty (1965), kurikulum dipandang sebagai kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah—*All*

the activities that are provided of the students by the school (Sholeh Hidayat, 2013). Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, dan seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di sekolah atau madrasah. Apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu: 1) sebagai rencana pengajaran, 2) sebagai rencana belajar murid, 3) sebagai pengalaman beajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah (Sholeh Hidayat, 2013).

Manajemen kurikulum dianggap sebagai sistem pengelolaan kurikulum yang kooperitif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012). Manajemen kurikulum adalah pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar (dalam istilah sekarang adalah peserta didikan) agar dapat mencapai hasil maksimal. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan peserta didik dengan menitikberatkan pada usaha dan meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar (Mohammad Mustari, 2014).

literasi nusantara

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum terintegritas dengan peseta didik dan lingkungan lembaga. Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Studi manajemen pengembangan kurikulum erat kaitannya dengan studi administrasi pendidikan, di mana fungsi supervisinya telah tercakup di dalamnya.

Prinsip manajemen kurikulum pendidikan Islam dibangun atas dasar pemikiran yang islami, bertolak dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah Islam. Berdasarkan pendapat Sulistyo Rini yang dikutip dari Abdurrahman an-Nahlawi, prinsip manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah: 1) sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan fitrah manusia, 2) hendaknya mengacu kepada pencapaian tujuan akhir pendidikan islam, 3) kurikulum disusun secara bertahap mengikuti periodisasi perkembangan peserta didik, 4) kurikulum hendaknya memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, administrasi, dan pendidikan khususnya, 5) kurikulum hendaknya terstruktur dan terorganisir secara integral, 6) kurikulum hendaknya realistis, artinya kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan berbagai kemudahan yang dimiliki setiap negara yang melaksanakannya, 7) metode pendidikan yang merupakan salah satu komponen kurikulum hendaknya dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi lokal, 8) efektif untuk mencapai tingkah laku dan emosi yang positif, 9) memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik fisik, emosional ataupun intelektualnya, 10) kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek tingkah laku alamiah Islam.

Kesepuluh prinsip tersebut mencakup hal-hal yang secara teknik disebutkan dalam landasan kurikulum, yakni filosofis dan landasan sosial serta prinsip-prinsip umum, seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan efektivitas. Kemudian, ada lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum: *pertama*, prinsip produktivitas merupakan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum seperti mempertimbangkan bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai tujuan kurikulum yang harus menjadi sasaran manajemen; *kedua*, prinsip demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang tepat dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum; *ketiga*, prinsip kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat; *keempat*, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai

literasi nusantara

tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum mampu memberikan hasil yang berdaya guna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat; *kelima*, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan prinsip ini.

Bagi sekolah, kurikulum memiliki minimal dua fungsi, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari (Dinn Wahyudin, 2014). Fungsi manajemen kurikulum dan peserta didik adalah: 1) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber, maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif; 2) meningkatakan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil dan kemampuan yang maksimal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas guna mencapai tujuan kurikulum; 3) meningkatkan relevansi dan efektivitas peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar; 4) meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan peserta didikan dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu agar mampu motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar; 5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses peserta didik selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembalajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindari. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan proses peserta didikan yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum; 6) meningkatakan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

Menurut Sofan Amir sebagaimana dikemukakan dalam bukunya, ada lima tujuan manajemen kurikulum, yakni menyelaraskan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 2) memperhatikan karakteistik sosial budayamasyarakat setempat

literasi nusantara

dan menjunjung kelestarian, keragaman budaya, dan karakter bangsa, 3) memungkinkan pengembangan potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional spiritual, dan karakteristik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan, 4) meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dan memperhatikan norma agama yang berlaku dilingkungan sekolah, 5) agar peserta didik adil mendorong tumbuhkembangnya kesetaran gender (Dinn Wahyudin, 2014).

Menurut Ramayulis, komponen-komponen kurikulum meliputi: 1) tujuan yang ingin dicapai, mulai dari tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, hingga tujuan sementara; 2) isi kurikulum berupa materi yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus, lalu pengaplikasiannya dicantumkan pula dalam satuan peserta didik dan rencana peserta didikan; 3) media (sarana dan prasarana) peserta didik; 4) media sebagai sarana perantara dalam peserta didik untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik; 5) strategi merujuk pada pendekatan, metode, dan teknik mengajar yang digunakan. Strategi termasuk komponen penunjang lainnya, seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dsb; 6) proses pembalajaran. Komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses peserta didik akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum; 7) evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui cara pencapaian tujuan; dan 8) pengembangan manajemen kurikulum.

Adapun ruang lingkup studi pengembangan manajemen kurikulum adalah:

1. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum
   Dalam manajemen, perencanaan kurikulum dan pengembangan selanjutnya penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan faktor-faktor dasar, peran berbagai pihak, dan metedologi pengembangan itu sendiri sehingga merupakan proses keseluruhan kegiatan dan pengembangan kurikulum.
2. Manajemen pelaksanaan kurikulum
   Bidang ini erat kaitannya dengan keterlaksanaan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan dan latihan. Peran administrator (kepala sekolah) dan guru mendapat sorotan lebih tajam, dalam artian administratif.
3. Supervisi pelaksanaan kurikulum
4. Bidang ini membahas lebih mendasar dan meluas sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan personal sekolah

yang mendapat tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kurikulum dan dengan cara bagaimana mereka seharusnya dipersiapkan agar mampu bertindak sebagai supervisor.

5. Pemantauan dan penilaian kurikulum
   Peranan dan fungsinya sangat penting dalam rangka pengembangan, pelaksanaan, supervisi, dan perbaikan kurikulum.
6. Perbaikan kurikulum
   Bidang ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih sebab erat kaitannya dengan upaya membina relevansi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan perkembangan masyarakat secara menyeluruh.
7. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
8. Masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum dan model kepemimpinan yang serasi dengan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam manajemen pendidikan Islam, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur wulan, dan bulanan. Adapun program mingguan atau satuan pelajaran juga wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar.

literasi nusantara

Menurut Hasan yang dikutip oleh Dinn Wahyudin, konsep pengembangan kurikulum dalam arti sempit meliputi tiga fase. *Pertama*, kontruksi kurikulum diawali dengan kemantapan ide kurikulum di mana para pengembang merumuskan jawaban terhadap masalah pendidikan bangsa. Setelah ide kurikulum dianggap cukup matang dan memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan yang ada, selanjutnya para pengembang mengidentifikasi dan mengkaji model kurikulum yang paling sesuai. *Kedua*, implementasi kurikulum dengan melibatkan banyak pihak termasuk para guru dan kelompok administrator pendidikan (kepala sekolah, pengawas, dan pejabat pendidikan lainnya). Jika pada fase ini semua pihak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kurikulum dapat dikatakan berhasil. *Ketiga*, evaluasi kurikulum merupakan proses yang membantu memberikan informasi kepada pengembang apakah yang mereka rancang sebagai ide kurikulum sudah valid sebagai jawaban terhadap masalah.

Tugas Pokok dan Fungsi Manajer serta Personilnya

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer dan personil, maka pihak-pihak yang berkepentingan perlu mahami tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi manajemen kurikulum sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kepala sekolah

   Kepala sekolah merupakan manajer di sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Untuk menjalankan efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama para guru harus menjabarkan isi kurikulum lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur wulan, dan bulanan. Adapun program mingguan ataupun program satuan pelajaran wajib dikembangkan guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Rohiat, 2008: 41).

   Menurut Triwiyanto (2015: 71), tugas kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum dan peserta didik pada kompetensi manajerial adalah

   a. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang meliputi kebutuhan pendidik, pembagian tugas mengajar, kelengkapan alat dan bahan pelajaran, serta semua kegiatan sekolah.
   b. Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan di sekolah.
   c. Menyelenggarakan evaluasi bagi siswa dan ujian sekolah.
   d. Melakukan supervisi terhadap proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan konseling, ekstrakulikuler dan intrakulikuler, ketatausahaan sekolah, dan kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi lain.
   e. Menyusun penjabaran kalender pendidikan dan mengelola evaluasi peserta didik.
   f. Senantiasa meningkatkan stabilitas dan mutu pendidikan.
   g. Merencanakan, mengoordinasi, dan mengawasi proses peserta didik tambahan (ekstra).

h. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan akademik pendidik menuju profesionalitas.
i. Memantau kualitas pelaksanaan proses peserta didik di kelas.
j. Melaksanakan supervisi.
k. Mendokumentasikan laporan kegiatan evaluasi (ulangan umum dan ujian akhir).
l. Memantau pembuatan rencana pengajaran pendidik.
m. Membina dan memeriksa penyusunan satuan pelajaran, daya serap siswa, deposit soal, program remedial, dan soal pengayaan.

Selain itu, kepala sekolah memiliki fungsi supervisi kurikulum yakni semua usaha yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerak motivasi, nasihat, dan pengarahan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar. Kepala sekolah juga harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian agar kegiatan pendidikan terarah pada tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah peserta didik melakukan perbuatan menyimpang dan lebih berhati-hari dalam melaksanakan pekerjaannya.

Supervisor kurikulum memiliki lima fungsi: *pertama*, fungsi edukatif sebagai usaha untuk menciptakan tenaga pengajar yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya; *kedua*, fungsi kurikuler berkenaan dengan pelaksanaan, pengajaran, dan peningkatan situasi belajar-mengajar sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Tujuannya untuk membantu guru yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kurikulum sekolah; *ketiga,* fungsi pembimbingan adalah memberikan bantuan kepada guru agar mampu mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tanggung jawab kependidikannya; *keempat*, fungsi administratif berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi dalam rangka kependidikan dan pengajaran sekolah; *kelima*, fungsi pengabdian berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah, seperti membantu guru dan siswa serta menyelenggarakan sistem sekolah secara menyeluruh.

Kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta dapat memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program

supervisi kurikulum, pengembangan program, supervisi untuk kegiatan ekstrakulikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian (Rohiat, 2008: 183).

2. Wakil kepala sekolah

   Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah adalah: a) menyusun program kerja bidang kurikulum; b) memberdayakan guru agar mampu menyediakan dokumen kurikulum; c) mengoordinasikan penyusunan dan revisi kurikulum tingkat satuan pendidikan; d) memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi dasar setiap mata pelajaran; e) membantu kepala sekolah dalam pembagian tugas mengajar guru; f) menyusun peraturan akademik; g) menyusun kalender pendidikan; h) membuat jadwal peserta didik; i) memfasilitasi guru untuk menyusun administrasi peserta didik setiap mata pelajaran; j) memfasilitasi guru untuk memilih buku sumber yang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran; k) memfasilitasi guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses pengajaran; l) mengidentifikasi kebutuhan bagi pengembangan kurikulum lokal; m) mengoordinasi pelaksanaan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian, dan ujian nasional; n) mengoordinasi pengolahan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian, dan ujian nasional; o) menetapkan kriteria naik/tidak kelas dan kriteria kelulusan; p) mengatur jadwal penerimaan buku laporan penilaian hasil belajar dan ijazah; q) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum; dan r) membuat laporan pelaksanaan kurikulum secara berkala kepada kepala sekolah.

3. Komite sekolah

   Komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Definisi lainnya, komite sekolah juga merupakan pemandirian satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan mereka masing-masing khususnya masalah pembiayaan pendidikan, tanpa bergantung pada pembiayaan yang disediakan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan lembaga pendidikan dalam upaya menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas (Kompri, 2014: 360).

literasi nusantara

Menurut Kompri (2014: 368), fungsi komite sekolah antara lain

a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
b. Mendukung (*supporting agency*) kerja sama sekolah dalam masyarakat, baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
c. Mengontrol (*controlling agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/legislatif) dengan masyarakat.
e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
g. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan

4. Bagian perpustakaan

literasi nusantara

Perpustakaan adalah pelengkap dari proses pendidikan yang menyediakan berbagai buku terkait materi ajar yang disampaikan kurikulum. Fungsi perpustakaan adalah tempat penyimpanan dan memelihara koleksi kepustakaan berupa buka dan hasil riset. Secara rinci, fungsi perpustakaan diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Fungsi edukatif
   Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai buku fiksi maupun non-fiksi. Tujuannya agar peserta didik mampu belajar secara mandiri.
b. Fungsi informatif
   Informasi yang dibutuhkan dapat dicari di dalam buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan.
c. Fungsi tanggung jawab administratif
   Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah. Setiap peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh pustakawan. Peserta didik yang masuk

harus menunjukan kartu anggota perpustakaan, tidak boleh menganggu temannya yang sedang belajar, jika peserta didik terlambat mengembalikan buku, maka ia dikenakan denda, dan jika peserta didik menghilangkan buku, maka ia harus menggantinya dengan buku baru. Aturan-aturan tersebut dibuat agar peserta didik mematuhi administrasi perpustakaan.

d. Fungsi riset
   Perpustakaan menyediakan berbagai bahan pustaka agar pemustaka dapat melakukan riset dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
e. Fungsi rekreatif
   Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk mengisi waktu luang. Para peserta didik dapat membaca buku cerita, novel, roman, surat kabar, dan sebagainya.

Seseorang yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan perpustakaan disebut pustakawan. Ia merupakan orang yang menentukan keberhasilan pelayanan di perpustakaan. Tugas pokok pustakawan, yaitu

a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi buku;
b. mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;
c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka;
d. menghimpun alat seleksi bahan pustaka;
e. merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan;
f. melakukan pelayanan perpustakaan; dan
g. menelaah pengembangan.

5. Guru

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 14 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kedudukan guru sebagai agen peserta didik ialah fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pendidikan, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan (Karwati, 2014: 61)

Menurut Karwati (2014: 61—65), guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam proses peserta didik. Fungsi guru meliputi:

a. Pendiagnosa perilaku peserta didik
   Guru harus mampu memahami dan memberikan solusi atas segala kesulitan yang dihadapi peserta didik ketika belajar. Oleh karena itu, guru dituntut agar memahami kepribadian peserta didiknya.
b. Penyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
   Rencana pembelajaran yang baik harus didukung dengan perencanaan yang baik agar dapat meminimalisir risiko peserta didik yang buruk dan tidak terarah.
c. Pelaksana proses peserta didikan
   Guru harus mampu melaksanakan proses peserta didikan dengan baik karena kualitas proses akan menentukan hasil akhir yang akan dicapai peserta didik.
d. Pelaksana administrator sekolah
   Peran guru sebagai administrator berfungsi membantu kepala sekolah dan tata usaha sebab guru juga diharuskan mengetahui kepentingan administratif peserta didik, bukan hanya kepentingan akademiknya.
e. Penyebar komunikasi dan komunikator
   Fungsi ini berkaitan dengan proses penyampaian informasi oleh guru baik kepada dirinya sendiri, peserta didik, pemimpin sekolah, wali murid, maupun masyarakat.
f. Pengemban potensi pesrta didik
   Guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran agar dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki peseta didik.
g. Pengembang kurikulum
   Di sekolah, guru merupakan ujung tombak yang mengimplementasikan kurikulum sehingga ia adalah jembatan antara kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah dan pelaksana ditingkat sekolah. Peran strategis tersebut menuntut guru untuk mampu mengembangkan kurikulum ditingkat sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah dan kondisi peserta didik.

literasi nusantara

Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut *level of performance* (level kinerja). Guru yang memiliki kinerja tinggi adalah seseorang yang memiliki produktivitas kerja sama dengan atau di atas standar, sebaliknya guru yang memiliki level kinerja rendah adalah seseorang yang pasif (Karwati, 2014: 66)

6. Administrator sekolah

Garapan administrasi sekolah jika dilihat dari sudut pandang yang sempit adalah: *pertama*, administrasi tata laksana sekolah, seperti laporan anggaran, rencana anggaran, dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS), surat menyurat, administrasi pegawai, dan lain sebagainya; *kedua*, administrasi guru dan pegawai sekolah; *ketiga*, supervisi pendidikan; *keempat,* pelaksanaan dan pembinaan kurikulum.

Tugas pokok petugas administrasi sekolah adalah: a) melayani pelaksaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi; b) menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan; dan c) membantu kelancaran perkembangan organisasi. Tanpa adanya administrasi sekolah yang baik, maka upaya kegiatan peningkatan mutu bidang pendidik akan gagal.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kinerja, maka berbagai kegiatan administrasi di sekolah perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

a. Prinsip efisiensi

   Administrator sekolah akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasillitas yang ada secara efisien;

b. Prinsip pengelolaan

   Administrator akan memperoleh hasil yang efektif dan efisien jika memulai garapan manajemennya dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan.

c. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan

   Jika administrator cenderung memprioritaskan perhatiannya pada pekerjaan operatif, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai.

d. Prinsip kepemimpinan yang efektif

   Administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila memilih gaya kepemimpinan yang efektif yakni memperhatikan

hubungan antarmanusia dan pelaksanaan serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

7. Laboran

Tugas laboran adalah membantu aktivitas peserta didik di laboratorium, menyediakan fasilitas yang digunakan untuk praktikum atau penelitian, membuat dan menyusun daftar alat-alat laboratorium, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala, dan inventarisasi serta pengadministrasian alat-alat laboratorium.

Jenis-jenis laboran terdiri atas: a) teknisi orang berperan untuk beroperasinya peralatan laboratorium, misalnya listrik, air, komputer, dan perbengkelan, dan b) analisis orang yang mempuyai keahlian untuk melalukan analisis di bidang tertentu. Laboran teknisi maupun analisis yang handal sangat dibutuhkan di laboratorium. Oleh karena itu, mereka harus memiliki keahlian atau kompetensi di bidangnya.

literasi
nusantara

literasi
nusantara

9
INOVASI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM

Inovasi Manajemen Kurikulum

Inovasi atau pembaharuan dalam bidang pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi (yang baru) atau *discovery* (mengubah yg lama) yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sebagai konsekuensinya, pelaksana di sekolah harus mengelola kurikulum dengan baik agar hasil peserta didikannya lebih efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka memerlukan manajemen yang baik. Manajemen kurikulum ini dimaksudkan supaya proses pendidikan yang akan berlangsung di sekolah dapat terarah dan terkoordinasi dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, masyarakat telah mengalami perubahan pada setiap aspek kehidupan. Perubahan dalam bidang pendidikan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Dalam hal ini, perkembangan pendidikan berkaitan dengan kurikulum. Sebagaimana dengan perkembangannya, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Namun dalam praktiknya, sering kali kurikulum dijadikan objek penderita, artinya ketidakberhasilan pendidikan diakibatkan karena kurikulum yang berubah-ubah.

Strategi mempertahankan struktur kurikulum tanpa perubahan serta inovasi akan berdampak pada ketidakberhasilan mutu serta kualitas pendidikan yang baik, sebab mengondisikan kurikulum dalam posisi status *quo* menyebabkan pendidikan tertinggal dan generasi bangsa tidak dapat mengejar kemajuan yang diperoleh melalui perubahan. Dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun kurikulum merupakan unsur penting. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya pengelola pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Mengingat pentingnya kurikulum, maka ia perlu dipahami oleh semua pelaksana pendidikan. Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa pihak yang memandang kurikulum hanya sebatas rencana peserta didik yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik guna mencapai tingkatan tertentu. Jika pernyataan demikian tetap diperhatikan, maka dinamika proses belajar mengajar serta kreativitas guru dan siswa akan berhenti. Mereka akan berhenti pada sasaran materi yang dicanangkan pada buku kurikulum tanpa memperhatikan aspek lain yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan pandangan modern menganggap kurikulum lebih dari sekadar rencana peserta didikan. Kurikulum dianggap sebagai sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum merupakan komponen penting dari sistem pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka inovasi kurikulum yang merupakan gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum terdahulu selalu dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak hanya terbatas masalah pendidikan, tetapi juga masalah-masalah yang memengaruhi kelancaran proses pendidikan.

Menurut para ahli sebagaimana diungkapkan dalam kamus dapat dialihbahasakan bahwa *innovation* dipahami sebagai 'penggantian cara-cara yang lama dengan cara baru', sedangkan *innovator* adalah 'pembawa cara-cara baru'. Demikian pendapat Miraza Cs (1972: 183) yang dikemukakan oleh Asy'ari (t.t.:70) dalam Muhammad Rusli Karim, *pembaharuan*, *perubahan baru*, berarti inovasi. Karena itu istilah *innovator* dipahami sebagai 'penemu cara baru', atau 'pembaharu'. Istilah inovasi, perubahan, dan pembaharuan sering kali digunakan silih berganti untuk menjelaskan inovasi. Berdasarkan studi Center for Educational Research and Innovation tahun 1973 sudah didefinisikan bahwa inovasi menunjukkan sesuatu tindakan yang baru dalam organisasi dan kehidupan manusia. Dalam hal ini, inovasi sebagai usaha yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan

literasi nusantara

praktik dalam mencapai tujuan dan selanjutnya dinyatakan pembaharuan yakni inovasi dari sistem dalam skala yang luas (Junius Mauegha,1982: 89). Kemudian, dijelaskan bahwa inovasi (*innovation*) adalah upaya memperkenalkan berbagai hal baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan (Wijawa Cece dkk, 1992). Secara singkat inovasi dimaksudkan sebagai pembaharuan, baik berupa idea atau gagasan, kelakuan, atau benda sebagaimana dinyatakan bahwa, "*An innovation is here defined as any thought, behavior, or thing that is new because it is qualitatively different from existing forces*" (Barnett, 1953). Sesungguhnya kata kunci dalam inovasi adalah 'perubahan'. Ide, gagasan, dan pemikiran untuk perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua bidang kehidupan untuk menjadi lebih baik sebagai makna utama inovasi.

Perubahan dapat terjadi secara kebetulan dan tidak sistematis, tetapi agar perubahan dapat disebut sebagai inovasi, maka harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan yang kuat. Di sinilah kata 'perencanaan' digunakan. Artinya, para perancang perubahan harus tahu apa yang ingin diubah, mengapa, dan bagaimana cara mengubahnya. Dengan kata lain, para pembaharu harus mengetahui ke mana arah yang akan dituju atau pembaharu harus memiliki sasaran yang sudah ditetapkan secara jelas. Namun, tidak berarti bahwa manusia dituntut secara mutlak untuk merencanakan setiap langkah dalam perubahan itu sebelumnya.

literasi nusantara

Pada dasarnya inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan. Inovasi pendidikan adalah perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan (Sa'ud, 2011). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Wijaya, 1998: 28). Sedangkan pembaharuan pendidikan adalah perubahan mendasar di dalam pendidikan terkait

sasaran maupun kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan merupakan tindakan yang bersifat politis, berdasarkan landasan ideologis. Jadi pembaharuan akan memengaruhi banyak disiplin, antara lain sistem tenaga kerja, pemeliharaan kesehatan, penggunaan waktu terluang, dan kemungkinan sistem perekonomian (Mauegha,1982: 91).

Inovasi pendidikan harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Apabila masyarakat belum menghendaki sistem pendidikan yang diinginkan, maka tidak mungkin perubahan atau inovasi dapat pendidikan terjadi. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua model inovasi baru. *Pertama*, *top-down model* adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu berbagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan seperti inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kedua, bottom-up model* adalah inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses penyelenggaraan dan hasil pendidikan.

Dalam pendidikan, apabila strategi menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi, maka pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model yang demikian lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil dari perubahan itu sendiri. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi yang dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berkali-kali agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta, pelaksananya dapat tercapai.

Manajemen kurikulum dimaksudkan supaya proses pendidikan yang akan berlangsung di sekolah dapat terarah dan terkoordinasi dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan kurikulum sangat dipentingkan tinjauan-tinjauan teoretis dan praktis agar kurikulum yang dikelola dapat selalu sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan pribadi subjek didik itu sendiri (*individual differences*).

literasi nusantara

Implementasi Manajemen Kurilukum

Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas kurikulum tertulis (*written curriculum*). Dengan kata lain, implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan peserta didikan. Mars dikutip oleh Mulyasa (2006: 247) mengemukakan tiga faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Dari berbagai faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor lain. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh faktor guru sebab bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum (peserta didikan) tidak akan memuaskan.

Menurut Kusnandar (2007: 236), garis besar implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan peserta didik, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif sebab mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Kemudian, penerapan atau implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Sedangkan evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil peserta didikan, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang-orang yang berurusan dengan dunia pendidikan, tetapi semua lapisan masyarakat, seperti politikus, pengusaha, wali murid, dan masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Kusnandar juga mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan adalah potensi dan pengembangan peserta didik sebab ia adalah subjek pembelajaran.

Pengembangan program kurikulum meliputi: 1) pengembangan program tahunan yang merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Program ini dikembangkan guru mata pelajaran yang bersangkutan; 2) program semester; 3) program pertengahan semester; 4) program mingguan dan harian; 5) program pengayaan dan remedial; dan 6) program bimbingan dan konseling. Sedangkan evaluasi hasil belajar dalam implementasi kurikulum saat ini dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program.

1. Penilaian kelas
   Penilaian kelas diperoleh melalui ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilaksanakan setiap peserta didik menyelesaikan satu kompetensi tertentu. Ulangan tersebut berisi seperangkat soal dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang dibahas.
2. Tes kemampuan dasar
   Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung guna memperbaiki program remedial. Tes kemampuan dasar ini dilakukan setiap tahun akhir kelas III.
3. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi
   Setiap akhir semester dan setiap tahun, guru menyelenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik. Sedangkan untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.
4. *Benchmarking*
   Benchmarking merupakan standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai keunggulan yang memuaskan.
5. Penilaian program
   Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Setiap guru harus memahami tujuan penilaian kelas dengan baik agar fungsi yang telah disebutkan terlaksana. Jika dalam penilaian kelas siswa jauh dari pencapaian tujuan instruksional, maka diharapkan guru segera mencari pemecahan masalahnya.

Konsep implementasi kurikulum berkaitan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK dan KTSP) yang berorientasi pada pengembangan kepribadian (kurikulum humanistik), kehidupan, dan pekerjaan (rekontuksi sosial dan teknologi). Kurikulum humanistik dapat diberlakukan pada awal pendidikan dasar, di mana sejumlah kemampuan dasar untuk keperluan pengembangan pribadi, seperti kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan keberanian

literasi nusantara

mengeluarkan ide atau gagasan, serta bekerja sama perlu ditonjolkan. Pada jenjang menengah, peserta didik belajar berdasarkan disiplin ilmu (subjek akademik) dengan tetap bersandar pada kehidupan dan lingkungan masyarakat sebagai sumber kurikulum (rekontruksi sosial dan teknologi).

Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Komunikasi peserta didik yang multi arah harus dikembangkan sehingga ia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Pengembangan tersebut sebaiknya ditekankan pada aktivitas mencari pemahaman objek, menganalisis, dan merekonstruksi sehingga pengetahuan baru dalam diri peseta didik akan terbentuk. Menurut Nana Syaodih S. (2001), untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan dan keberhasilannya sangat bergantung pada guru. Sumber daya pendidikan yang lain seperti sarana prasarana biaya, organisasi, dan lingkungan juga merupakan kunci keberhasilan pendidikan.

Kemampuan guru dalam implementasi kurikulum yang harus dikuasai adalah: 1) pemahaman esensi dari tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum; 2) kemampuan untuk menjabarkan tujuan kurikulum menjadi lebih spesifik; dan 3) kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus saat proses pembelajaran. Mungkin, kemampuan-kemampuan tersebut telah dikuasai para guru dan dosen, tetapi sering kali hanya sebagian. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui diskusi, simulasi, *peer group* atau MGMP/KKG, lokakarya, pelatihan, dan penataran intern dengan mendatangkan narasumber.

literasi nusantara

Kendala yang dihadapkan dalam implementasi kurikulum berkenaan dengan: (1) masih lemahnya diagnosis kebutuhan baik pada skala makro maupun mikro sehingga implementasi kurikulum tidak sesuai yang diharapkan; (2) perumusan kompetensi pada tahapan mikro sering dikacaukan dengan instruksional yang dikembangkan; (3) pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan; dan (4) evaluasi sering kali tidak sesuai dengan tujuan instruksional yang dikembangkan. Untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi, maka perlu diupayakan hal-hal berikut: 1) dalam mendiagnosisi kebutuhan sebagiannya masyarakat, baik dewan sekolah maupun komite sekolah dilibatkan sejak awal; 2) dalam implementasi kurikulum, guru mempunyai kewenangan penuh dalam menerapkan strategi peserta didikan; dan 3) struktur materi diorganisasikan mulai dari perencanan pengajaran dalam bentuk jam pelajaran hingga evaluasi.

literasi
nusantara

10
PERANAN DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN KURIKULUM

literasi nusantara

Peranan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyimpanan dan pengiriman data semakin mudah dan baik kualitasnya. Baik perorangan, institusi, maupun pemerintah ikut melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, bahkan dalam dunia pendidikan. Apalagi dengan adanya program *school net*, jardiknas, dan sebagainya, maka seluruh komponen lembaga pendidikan dituntut menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan teknologi.

Teknologi informasi memberikan kemudahan proses peserta didikan sebab semakin tingginya kebutuhan informasi ilmu pengetahuan yang tidak semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Demikian pula pada saat melakukan pertukaran data dan informasi dengan sekolah lain, sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan pemerintah daerah dan pusat, dan lain-lain yang membutuhkan teknologi.

Setelah dunia pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka banyak hal yang dapat diubah, baik dari kepentingan guru maupun peserta didik, seperti memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, dan tepat

waktu) untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Lalu, informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Arti teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan, membantu menyediakan komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah peserta didik dengan ruang kelas, guru, dan administrator sekolah dengan internet, dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk: kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani; dan untuk profesi, seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerja sama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan yang lainnya dapat terhubung tanpa mengenal batas, jarak, waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi memacu cara baru dalam kehidupan, dari awal hingga akhir atau dikenal dengan *e-life*. Artinya, kehidupan ini dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, mengerti dan memahami lebih mendalam tentang teknologi dan menggunakan teknologi untuk menunjang pendidikan.

literasi nusantara

Implementasi Teknologi Informasi

Sejarah IT dan internet tidak dapat dilepaskan dari bidang pendidikan. Di Amerika, internet mulai tumbuh di lingkungan akademis (NSFNET) sebagaimana diceritakan dalam buku *Nerds 2.0.1.* Demikian pula di Indonesia juga mulai tumbuh di lingkungan akademis (di UI dan ITB), meskipun internet banyak diceritakan muncul dari dunia bisnis. Internet memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber yang sulit dibuka. Sejak dulu, perpustakaan adalah salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Maka, adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat.

Mekanisme akses perpustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan program khusus (biasanya menggunakan standar Z39.50 seperti Wais), aplikasi Telnet (seperti pada aplikasi Hytelnet), atau web browser (Netscape dan Internet Explorer). Tukar menukar informasi

atau tanya jawab dengan pakar juga dapat dilakukan melalui internet. Tanpa adanya internet banyak tugas akhir yang mungkin membutuhkan waktu lebih banyak. Begitu pula dengan mendiskusikan masalah dengan para pakar atau dosen yang berjauhan dapat dilakukan di rumah dengan mengirimkan surat elektronik atau menggunakan mekanisme *file sharing*. *Sharing information* juga sangat dibutuhkan dalam bidang penelitian agar tidak terjadi pengulangan (*reinvent the wheel*). Hasil penelitian di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat digunakan bersama-sama sehingga mempercepat proses pengembangan ilmu dan teknologi.

Distance learning dan *virtual university* merupakan aplikasi baru bagi internet. Bahkan pakar ekonomi, Peter Drucker mengatakan bahwa, "*Triggered by the internet, continuing adult education may will become our greatest growth industry*." *Virtual university* memiliki karakteristik yang *scalable* yaitu menyediakan pendidikan yang dapat diakses siapa saja dan dari mana saja. Jika pendidikan hanya dilakukan di dalam kelas, berapa jumlah orang yang dapat ikut serta dalam satu kelas? Mungkin hanya 50 orang. Bagi Indonesia, manfaat-manfaat yang telah diuraikan cukup menguatkan alasan agar internet dijadikan infrastruktur pendidikan.

Teknologi Informasi dalam Modernisasi Pendidikan

Menurut Resnick (2002), terdapat tiga hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait modernisasi pendidikan, yakni bagaimana kita belajar? (*how people learn?*); apa yang kita pelajari? (*what people learn?*); serta kapan dan di mana kita belajar (*where and when people learn?*). Pertanyaan pertama berkaitan dengan metode atau model peserta didikan. Menurut Pannen (2005), saat ini terjadi perubahan paradigma peserta didik terkait dengan ketergantungan terhadap guru dan peran guru dalam proses peserta didikan. Proses peserta didik saat ini lebih terpusat kepada siswa (*student-centered learning* atau *instructor independent*). Guru tidak lagi dijadikan satu-satunya rujukan semua pengetahuan, tetapi cenderung sebagai fasilitator atau konsultan. Dalam hal ini, hadirnya *e-learning* telah memfasilitasi perubahan ini. *E-learning* dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik, termasuk internet, intranet, extranet, satelit, audio/video tape, TV interaktif, dan CD ROM (Govindasamy, 2002).

Menurut Kirkpatrick (2001), *e-learning* telah mendorong demokratisasi pengajaran dan proses peserta didik dengan memberikan kendali

yang lebih besar dalam peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional seperti termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*" Dalam hal ini, sebagian besar proses pembelajaran dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan sebagian lagi tetap menggunakan pertemuan tatap muka dengan ditambah model interaksi berbantuan teknologi informasi. Saat ini, *regulasi* yang dikeluarkan oleh pemerintah juga telah memfasilitasi pemanfaatan *e-learning* sebagai substitusi proses peserta didik konvensional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 dengan jelas membuka koridor untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, di mana *e-learning* dapat masuk memainkan peran.

Pengembangan Teknologi sebagai Bahan Ajar

Bahan ajar dalam pendidikan teknologi dikembangkan atas dasar:

1. Pokok bahasan yang paling esensial dan representatif untuk dijadikan objek belajar bagi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Pokok bahasan, konsep, dan prinsip atau *mode of inquiry* sebagai objek belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan dan memiliki hubungan untuk berkembang, mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak teramalkan (Soedjiarto 2000: 19—51)

Atas dasar landasan pemikiran tersebut, maka ruang lingkup kajian pendidikan teknologi yang dikembangkan mencakup:

1. Pilar teknologi yaitu aspek-aspek yang diproses untuk menghasilkan produk.
2. Produk teknologi merupakan bahan ajar tentang materi/bahan, energi, dan informasi.
3. Domain teknologi adalah fokus bahan kajian yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan bahan pelajaran yang terdiri atas: (a) teknologi dan masyarakat (berintikan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, industri, profesi. dan lingkungan hidup), (b) produk teknologi dan sistem (berintikan bahan, energi, dan sistem), dan (c) perancangan dan pembuatan karya teknologi (berintikan gambar dan perancangan, pembuatan, dan kajian ulang).

4. Area teknologi adalah batas kawasan teknologi dalam program pendidikan teknologi, antara lain teknologi produksi, komunikasi, energi, dan bioteknologi.

Teknik pengajaran baru bersifat dua arah, yakni kolaboratif dan interdisipliner. Dalam era informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antarmanusia atau antarlembaga usaha sehingga menjadi dusun semesta atau *global village* atau dengan kata lain diistilahkan "jarak sudah mati" atau *distance is dead*. Romiszowski & Mason (1996) memprediksi penggunaan *Computer-Based Multimedia Communication* (CMC) bersifat sinkron dan asinkron. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, dan terkait pada produktivitas kerja saat itu juga serta kompetitif.

Fungsi TIK dalam Kegiatan Peserta Didikan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan peserta didikan sebagaimana berikut.

1. Teknologi berfungsi sebagai alat (*tools*)
   TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna (*user*) atau peserta didik misalnya dalam mengolah kata dan angka serta membuat unsur grafis, database, dan program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya.
2. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (*science*)
   Teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai peserta didik. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan kurikulum 2006 yang mencantumkan adanya mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa.
3. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk peserta didik (*literacy*)
   Teknologi dimaknai sebagai bahan peserta didik sekaligus alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip peserta didik tuntas untuk menguasai kompetensi.

literasi nusantara

Posisi teknologi adalah sebagai fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator.

Peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas yakni dalam manajemen dunia pendidikan. Berdasarkan studi tujuan pemanfaatan TI di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alavi, dan Gallupe (2003) tujuan pemanfaatan TI adalah memperbaiki *competitive positioning*, meningkatkan *brand image*, kualitas peserta didik dan pengajaran, kepuasan siswa, kualitas pelayanan, dan pendapatan, memperluas basis siswa, mengurangi biaya operasi, dan mengembangkan produk serta layanan baru. Maka, tidak mengherankan jika banyak institusi pendidikan di Indonesia yang berlomba-lomba berinvestasi dalam bidang TI. Untuk memenangkan pendidikan yang bermutu, maka solusinya adalah memosisikan institusi pendidikan pada sel satu yaitu lingkungan peluang yang menguntungkan dan kekuatan internal yang kuat.

Faktor Pendukung TIK dalam Pendidikan

Teknologi informasi merupakan bahan pokok *e-learning* dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi teknologi informasi, yaitu (1) infrastruktur, agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat, maka dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi di manapun dengan kecepatan yang mencukupi, (2) sumber daya manusia, menuntut ketersediaan *human brain* yang menguasai teknologi tinggi, (3) kebijakan, menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang, (4) finansial, membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lain untuk menyokong industri teknologi informasi, dan (5) konten dan aplikasi, menuntut adanya informasi yang disampaikan kepada orang, tempat, dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunanya. Berkaitan dengan *e-life* yang berarti kehidupan telah dipengaruhi oleh kebutuhan elektronik, maka banyak program-program yang telah mengikutsertakan internet, seperti *e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity*, dan sebagainya (Mason R. 1994).

informasi nusantara

Masalah dan Hambatan Penggunaan Teknologi Informasi

Selain membawa banyak manfaat, kehadiran teknologi informasi juga memunculkan permasalahan, khususnya internet. Penyebaran informasi yang tidak terkendalikan telah membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral. Oleh karena itu, penyiapan etika peserta didik perlu dilakukan. Etika yang terinternalinasi dalam jiwa peserta didik adalah *firewall* terkuat dalam menghadang serangan informasi yang tidak bermanfaat. Masalah lain yang muncul terkait asimetri akses yakni akses yang tidak merata. Hal ini akan menjadikan kesenjangan digital (*digital divide*) bahwa semakin jauh peserta didik atau sekolah dengan dukungan sumber daya yang kuat dengan siswa atau sekolah dengan sumber daya yang terbatas.

Dampak Penggunaan TIK

Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan, antara lain berbagi hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain, konsultasi dengan pakar dapat dilakukan dengan jarak jauh, melahirkan perpustakaan digital, diskusi daring sebagaimana digunakan lembaga jarak jauh seperti universitas terbuka.

Bagi pelajar, keuntungan pemanfaatan TIK, antara lain dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain, memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah, akses ke para ahli lebih mudah karena tidak dibatasi jarak dan waktu, materi pelajaran dapat disampaikan secara interaktif dan menarik, serta menghemat biaya dan waktu. Sedangkan bagi penyelenggara pendidikan, keuntungan yang didapat adalah dapat berbagi hasil penelitian dengan lembaga pendidikan lain, dapat memberi layanan lebih baik ke peserta didik, dapat menjangkau peserta didik yang jauh, dapat mengakses perpustakaan digital, menekan biaya untuk menyediakan buku, dan dapat saling berbagi sumber ilmu dengan institusi lain.

literasi
nusantara

11
MODEL DAN ORGANISASI PENGEMBANGAN KURIKULUM

Model Pengembangan Kurikulum

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas banyak definisi kurikulum. Untuk memperdalam pemahaman kita terhadap kurikulum, maka kita dapat mengulas kembali definisi kurikulum. Diketahui bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam sistem pendidikan dan strategis dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum sebagai instrumental input untuk mencapai tujuan pendidikan yakni pengembangan manusia sesuai falsafah hidup bangsa. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus dibelajarkan kepada peserta didik, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami dan diwujudkan dalam perilaku peserta didik.

Kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan memerlukan model untuk dijadikan landasan teoretis. Pemilihan model pengembangan kurikulum bukan hanya didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, melainkan juga disesuaikan dengan sistem dan pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan yang digunakan. Berikut ini diuraikan beberapa model yang diungkapkan para ahli dalam pengembangan kurikulum.

1. Robert S. Zais dalam bukunya *Curriculum Principles and Foundations* mengemukakan berbagai model pengembangan kurikulum yang diutarakan sebagai berikut.
   a. Model administratif (Model atas-bawah)
      Model ini menekankan kegiatannya terhadap orang-orang sesuai tugas dan fungsinya (Sholeh Hidayat, 2013). Pengembangan kurikulum model ini diwujudkan melalui langkah-langkah berikut.
      1) Atasan membentuk tim yang terdiri atas para pejabat yang berwenang.
      2) Tim merencanakan konsep rumusan, tujuan umum, dan falsafah yang diikuti.
      3) Dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari spesialis kurikulum dan staf pengajar.
      4) Hasil kerja dari butir 3 direvisi oleh tim atas dasar pengalaman atau hasil dari *try out*.
      5) Setelah *try out* yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya, lalu kurikulum tersebut diimplementasikan (Dakir, 2004).

      Model ini mudah diterapkan pada negara yang menganut sistem sentralistik dan negara yang kemampuan profesional tenaga pengajarnya masih rendah. Kekurangan model administratif ini kurang tanggap terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, kurikulum ini bersifat sama secara nasional sehingga sering kali melupakan kebutuhan dan kekhususan yang ada pada setiap daerah (Sholeh Hidayat, 2013).
   b. Model *grass roots* (Model dari bawah)
      Model *grass roots* ini tercipta karena keresahan guru terkait kurikulum yang berlaku. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan untuk memperbaharui atau menyempurnakannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan kurikulum model *grass roots* adalah
      1) Inisiatif pengembangan datangnya dari bawah (para pengajar).
      2) Tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masayarakat luas yang relevan.
      3) Pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan.

literasi nusantara

4) Untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya diadakan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan (Dakir, 2004).

Pengembangan model ini dapat dilaksanakan oleh negara-negara bersistem disentralistik. Kebijakan pendidikan seperti ini tidak lagi diatur oleh pusat secara sentralistik, tetapi ditentukan oleh daerah, bahkan oleh sekolah dan guru. Oleh karena itu, sistem pengembangan ini dapat memicu terjadinya persaingan antara madrasah atau sekolah yang satu dengan yang lainnya. Pengembangan model ini hanya mungkin dapat dilakukan apabila para guru di sekolah dan madrasah memiliki kemampuan dan sikap profesional yang tinggi serta yang memahami konsep dan teori pendidikan dan peserta didikan. Jika tidak sangat kecil kemungkinan perubahan bisa terjadi (Sholeh Hidayat, 2013).

2. Model pengembangan kurikulum Baeauchmap

Model kurikulum ini dikembangkan oleh G.A. Beauchamp, seorang ahli kurikulum dalam bukunya yang berjudul *Curriculum Theory.* Ia mengemukakan bahwa ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini, yakni

a. Menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum.
b. Menetapakan personalia yaitu pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum.
c. Menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh dalam merumuskan tujuan umum (standar kompetensi), tujuan khusus (kompetensi dasar), memilih isi dan pengalaman belajar, serta menentukan evaluasi.
d. Implementasi kurikulum.
e. Melaksanakan evaluasi kurikulum (Sholeh Hidayat, 2013).

3. Model terbalik Hilda Taba

Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Hilda Taba mengembangkan lima langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu

a. Kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kuriikulum untuk dieksperimenkan.

literasi nusantara

b. Uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan peserta didikan.
c. Merevisi hasil uji coba dan mngonsolidasikan unit-unit kurikulum.
d. Mengembangkan kerangka kerja teoretis.
e. Pengasemblingan dan desiminasi hasil yang telah diperoleh (Zainal Arifin, 2013).

4. Model hubungan interpersonal Rogers
Kurikulum diharapkan dapat mengembangkan individu agar siap menghadapi perubahan dengan cara melatih diri dan berkomunikasi secara interpersonal. Langkah-langkah pengembangan model ini adalah
a. Memilih sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat individu yang terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara akrab.
b. Mengikutsertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif.
c. Pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik dan antarpeserta didik lainnya secara akrab dalam suasana bebas ekspresi.
d. Menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator guru dan orang tua peserta didik. Dalam situasi yang demikian diharapkan masing-masing personal akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan berbagai pemecahan persoalan sekolah yang sedang dihadapi (Zainal Arifin, 2013).

5. Model *action research* yang sistematis
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum adalah adanya hubungan antara manusia, keadaan organisasi sekolah, situasi masyarakat, dan otoritas ilmu pengetahuan. Langkah-langkah pengembangan model ini adalah
a. Merasakan adanya persoalan di dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam.
b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.
c. Merencanakan secara mendalam tentang solusi pemecahan masalahnya.
d. Menentukan keputusan-keputusan yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut.

literasi nusantara

e. Melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun.
f. Menilai kelebihan dan kekurangannya.

Model Pengembangan Kurikulum di Indonesia

1. Kurikulum tahun 1964
   Kurikulum 1964 ini bersifat tradisonal, artinya pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada siswa dengan ciri khusus yakni tujuan peserta didik hanya memberi bekal kepada siswa agar mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Peserta didik hanya menekankan penguasaan materi dan pola komunikasi yang digunakan adalah komunikasi satu arah (guru aktif siswa pasif). Organisasi kurikulum ini sangatlah bervariasi, khusus untuk sekolah kejuruan, antara teori dan praktik dipisahkan. Kemudian, untuk mata pelajaran PAI masuk ke dalam pelajaran budi pekerti.
2. Kurikulum tahun 1968
   Mata pelajaran PAI yang awalnya masuk dalam pelajaran budi pekerti, kemudian pada tahun 1968 resmi menjadi mata pelajaran sendiri yakni mata pelajaran PAI karena PKI dibubarkan sehingga materi yang diberikan lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara RI.
3. Kurikulum tahun 1975
   Kurikulum ini mengajarkan bahwa pembelajaran harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat peserta didik belajar. Kurikulum 1975 mulai mengenal PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).
4. Kurikulum tahun 1984
   Pada kurikulum ini, pola komunikasi peserta didik sudah menggunakan sistem dua arah, artinya mereka ikut aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum 1984 mengenal adanya sistem semester untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan SD menggunakan sistem catur wulan (cawu).
5. Kurikulum tahun 1994
   Pengembangan kurikulum pada tahun ini adalah: a) adanya penerapan muatan lokal; b) konsep *link* dan *match* (keterkaitan dan kesepadanan) antara penddikan dengan dunia kerja; dan c) peningkatan wajib belajar yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun.

literasi nusantara

6. Kurikulum tahun 1999
   Karena adanya era reformasi, maka kurikulum 1999 disebut kurikulum suplemen yaitu adanya pelajaran yang dapat tetap diajarkan dan ada pula yang tidak seperti pelajaran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
7. Kurikulum tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK)
   Ciri khusus KBK adalah: a) lebih mengutamakan kemampuan; b) menekankan bantuan alat; c) evaluasi lebih menekankan kemampuan atau percepatan masing-masing siswa; dan d) berbasis kinerja atau lebih menekankan kinerja.
8. Kurikulum tahun 2006/2007 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP)
   Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah dan tingkat sekolah. Artinya, kepada sekolah dan guru memiliki keleluasaan mengembangkan kurikulum secara tepat dan proporsional.
9. Kurikulum 2013
   Kurikulum 2013 mencoba mengurangi beban administratif guru yang kemudian hanya terfokus pada proses peserta didikan. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik berikut.
   a. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
   b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
   c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
   d. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.

Organisasi Pengembangan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan perlu dikembangkan sebagaimana acuan yang telah tersedia. Salah satu upaya dalam pengembangan kurikulum perlu dilakukan pengorganisasian dan desain kurikulum. Dengan begitu, lembaga pendidikan akan mampu mengorganisasikan dan mendesain kurikulum yang digunakan

literasi nusantara

dengan baik agar lembaga mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Organisasi kurikulum adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Menurut Mustika Zed (2014), kerangka-kerangka umum program peserta didikan yang hendak disampaikan kepada peserta didik merupakan organisasi. Dalam hal ini, organisasi kurikulum turut menentukan aspek-aspek yang diperlukan dalam proses peserta didikan sebab peran pengorganisasian berkaitan dengan tujuan yang ingin diraih.

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, organisasi memiliki peran sebagai cara atau langkah untuk menentukan pemilahan dan pengorganisasian berbagai pengalaman belajar yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Organisasi merupakan kelompok sosial yang sifatnya tertutup atau terbuka dari/terhadap pihak luar yang berada di bawah aturan tertentu. Organisasi dipimpin oleh seorang pimpinan/staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk memulai proses manajemen yang meliputi: 1) organisasi perencanaan dilaksanakan oleh lembaga pengembang kurikulum atau tim pengembang kurikulum, 2) organisasi pelaksanaan, dan 3) organisasi evaluasi kurikulum.

Setiap organisasi kurikulum memiliki: ciri khusus, tuntutan sendiri seperti tuntutan terhadap pendidik, media, administrasi sekolah, dan tuntutan lain untuk melaksanakan kurikulum. Organisasi kurikulum berhubungan dengan pengelolaan bahan pelajaran dalam kurikulum, sedangkan sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek peserta didik dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam organisasi kurikulum ialah: 1) ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Dalam hal ini, setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup dan urutan bahan materi pelajaran yang berbeda-beda; 2) kontinuitas kurikulum terkait dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik. Pendekatan spiral termasuk salah satu upaya penerapan dari faktor ini. Artinya, materi yang diterima peserta didik semakin lama semakin sulit akibat dari pengembangan kurikulum berdasarkan keluasan kajian; 3) keseimbangan bahan pelajaran. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun ekonomi akan memengaruhi dimensi kurikulum; 4) alokasi waktu.

literasi nusantara

Pemilihan dan pengorganisasian kurikulum diperlukan adanya prosedur-prosedur berikut.

1. *Employee*
   Peran pendidik sangat penting sebab pemilihan dan pengorganisasian kurikulum ditentukan berdasarkan penguasaan isi kurikulum di kalangan pendidik, baik secara individu maupun kelompok.
2. Buku mata pelajaran
   Menentukan isi kurikulum didasarkan pada materi yang terdapat dalam buku pelajaran yang dipilih oleh panitia tertentu.
3. Survei pendapat
   Dalam prosedur ini, pemilihan, pengorganisasian, atau pengorganisasian kembali isi kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi pendapat beberapa pihak dengan survei.
4. Studi kesalahan
   Prosedur ini adalah menganalisis kesalahan dan kelemahan dari pengalaman belajar misalnya memerhatikan tingkah laku yang dibentuk melalui kurikulum tersebut.
5. Mempelajari kurikulum lainnya
   Prosedur ini dianggap sebagai metode tambal sulam yakni mempelajari bagaimana kurikulum di sekolah lain, pendidik, atau sekolah dapat melaksanakan dan menentukan isi kurikulum bagi lembaganya yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan.
6. Analisis kegiatan orang dewasa
   Langkah pertama adalah mempelajari berbagai kegiatan atau aktivitas yang ada dalam kehidupan. Tujuannya untuk menemukan kegiatan yang nantinya dapat berguna bagi peserta didik di lingkungan sekolahnya.
7. Fungsi-fungsi sosial
   Prosedur ini berhubungan dengan analisis kegiatan, tetapi memiliki pandangan yang sedikit lebih luas. Masyarakat dewasa melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam fungsi dan pada dasarnya berada dalam kehidupan tertentu yang tidak terlepas dari situasi kehidupan secara total. Oleh karena itu, fungsi yang telah ditemukan kemudian diklasifikasikan menjadi *area of living*.
8. Minat dan kebutuhan remaja
   Ruang lingkup prosedur ini ditentukan berdasarkan berbagai fungsi kehidupan orang dewasa yang diklasifikasikan menjadi

literasi ausantara

area of living (Rusman, 2009: 60─61). Adapun *sequence* dari prosedur ini didasarkan pada latar belakang, kematangan, minat dan kebutuhan para peserta didik secara kronologis dan logis. Dalam menjalankan prosedur ini, perancang kurikulum perlu melibatkan *persistent problems* dengan *scope* dan urutannya didasarkan pada para peserta didik itu sendiri dan juga berkaitan dengan kegunaan secara personal dan sosial selain untuk menyusun kesiapan menjalani kehidupan berikutnya.

Adapun bentuk-bentuk organisasi kurikulum yang biasa digunakan adalah

1. Kurikulum mata pelajaran (*Isolated subject atau subject matter curriculum*)

   Organisasi kurikulum ini dianggap sebagai bentuk kurikulum tradisonal. Kurikulum ini telah lama digunakan pada sekolah-sekolah terdahulu hingga munculnya kurikulum baru pada 1968 dan 1975. Ciri-ciri bentuk kurikulum mata pelajaran adalah: a) masing-masing mata pelajaran berdiri sendiri; b) setiap pelajaran seakan-akan memiliki ruang dan waktu tertentu; c) hanya bertujuan pada penguasaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan aspek tingkah laku lainnya; d) tidak berdasar dari kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi peserta didik; e) tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang selalu berkembang; f) metodologi atau pendekatan yang digunakan adalah imposisi dan menciptakan perbedaan di antara kalangan peserta didik; g) peran pendidik sangat aktif dalam proses peserta didikan; dan h) peserta tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif.

   Akibat kurikulum yang melihat masing-masing mata pelajaran berdiri sendiri, maka muncul upaya baru untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran tersebut. Tujuannya agar para peserta didik mudah memperoleh pemahaman. Upaya ini diistilahkan kurikulum dengan pelajaran yang berkorelasi. Pola korelasi ini terdiri dari dua macam, yakni korelasi informal dan formal (Oemar Hamalik, 2017).

2. Korelasi informal

   Seorang pendidik mata pelajaran meminta agar pendidik mata pelajaran lain menghubungkan pelajaran yang akan diajarkan di kelas dengan bahan yang telah dipersiapkan oleh pendidik pertama. Sebagai contoh pendidik Sejarah akan mengajarkan materi sejarah Perang Diponegoro. Kemudian, pendidik ini

meminta pendidik Ilmu Bumi untuk membahas tentang daerah geografis terjadinya Perang Diponegoro tersebut. Selanjutnya, pendidik bahasa diminta memberikan pelajaran bercerita tentang suasana masyarakat sewaktu terjadinya perang.

Dalam korelasi formal ini, pendidik secara kolektif merencanakan untuk menggabungkan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara para pendidik yang bersangkutan lebih dulu menentukan fokus permasalahan. Misalnya para pendidik menentukan topik tentang keluarga. Pendidik yang mengampu pelajaran bahasa memberikan cerita yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, pendidik pengampu pelajaran menyanyi mengajarkan nyanyian pengantar tidur, dan pendidik yang mengajar Ilmu Berhitung memberikan catatan anggaran belanja dalam keluarga. Dengan demikian, para pendidik mata pelajaran lainnya dapat memberikan sumbangan terhadap pembahasan tersebut.

Ciri-ciri kurikulum korelasi informal ialah: a) terdiri dari pengajaran yang di dalamnya terdapat perpaduan antara sejumlah mata pelajaran, sejenis, dan memiliki ciri-ciri yang sama; b) pelajaran bertitik tolak dari *core subject* yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan; c) berdasar pada tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan; d) sistem penyampaian bersifat terpadu; e) peran pendidik selaku pendidik bidang studi; f) penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat meskipun masih dalam batas tertentu, dan g) terdapat berbagai jenis bidang studi.

3. Kurikulum terintegrasi

Kurikulum ini menciptakan batas-batas antara semua mata pelajaran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi adalah: a) berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi; b) berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik; c) berlandaskan sosiologis dan sosial budaya; d) berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan peserta didik; e) lebih luas dan tidak hanya ditunjang oleh mata pelajaran yang ada, bahkan dapat memunculkan mata pelajaran baru dan digunakan sebagai solusi dari permasalahan mata pelajaran lain; f) sistem penyampaian yang digunakan adalah sistem pengajaran unit, baik *experience unit* atau *subject matter unit*; dan g) peran pendidik dan peserta didik

literasi nusantara

sama-sama aktif, bahkan peran peserta didik dapat lebih dominan dan pendidik hanya berperan sebagai pembimbing.

4. Kurikulum Inti

   Ciri-ciri kurikulum inti adalah: a) *core* pelajaran meliputi pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua peserta didik; b) *core* program berkenaan dengan pendidikan umum untuk memperoleh berbagai hasil; c) kesatuan dari kegiatan dan pengalaman inti; dan d) waktu pelaksanaan yang lama. Adapun ciri-ciri lainnya adalah: a) direncanakan dengan kooperatif oleh pendidik; b) unit-unit pengalaman belajar yang luas dan komprehensif; c) demokratis; d) pendidik bertanggung jawab sebagai pembimbing; e) peserta didik yang fleksibel dan sumber belajar yang luas; f) menggunakan metode *problem solving*; g) pendidik dan peserta didik memiliki hubungan yang baik; h) memiliki berbagai bentuk penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan utuh; i) pengalaman belajar yang fungsional dan bertanggung jawab terhadap peserta didik; j) berupaya memperbaiki proses peserta didikan.

Desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi, dan kegiatan belajar yang akan dijalani peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Di dalamnya akan tergambar berbagai unsur kurikulum dan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Menurut Fred Percival dan Henry Ellington, desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya Saylor mengajukan delapan prinsip sebagai acuan dalam mendesain kurikulum.

1. Memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang mendasar bagi pencapaian prestasi belajar.
2. Berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik.
3. Menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah.
4. Memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan kematangan peserta didik.
5. Mendorong pendidik mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah.

6. Menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar peserta didik berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya.
7. Kurikulum harus didesain agar bisa memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur.
8. Realistis, layak, dan dapat diterima (Oemar Hamalik, 2017).

Adapun langkah-langkah mendesain kurikulum sebagaimana berikut.

1. Mengidentifikasi misi yang ingin dicapai oleh institusi atau lembaga, menentukan kebutuhan peserta didik, menetapkan tujuan kurikulum, memilih strategi pendidikan yang tepat, mengimplementasikan kurikulum terbaru, evaluasi, dan umpan balik untuk memperbaiki kekurangan dalam kurikulum.
2. Para pengembang kurikulum telah mengonstruksikan kurikulum menurut pengklasifikasian di bawah ini.
   a. *Subject-centered design*
      Kurikulum didesain dengan berpusat pada mata pelajaran yang terdiri dari *subject design, disciplines design,* dan *broad fields design*. Bentuk desain ini termasuk dalam kategori paling tua, terpopuler, dan paling banyak digunakan. Desain kurikulum berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, warisan kultur masa silam, dan berusaha mewariskannya kepada generasi berikutnya. Kurikulum ini juga disebut *subject academic curriculum* karena menomorsatukan isi atau bahan ajar. Kelebihan desain ini adalah mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan (Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, 1986:75). Sementara kekurangannya adalah: a) tidak sesuai dengan kenyataan sebab pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, b) peserta didik berperan sangat pasif, dan c) peserta didik lebih ditekankan pada pengetahuan dan kehidupan masa lalu sehingga mereka lebih bersifat verbalistis dan kurang praktis.
   b. *Subject design*
      Pada desain ini, materi ajar disampaikan terpisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran. Pendidikan pada abad 19 cenderung ke arah yang bersifat praktis dan terkait dengan

literasi nusantara

pencaharian. Ketika itu, mulai berkembang mata pelajaran IPA, bahasa yang masih bersifat teoretis, dan pelajaran praktis, seperti pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Bahan ajar diambil dari pengetahuan dan nilai yang sebelumnya telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini, peserta didik diharuskan menguasai semua pengetahuan yang telah disampaikan oleh pendidik, baik suka ataupun tidak. Pelajaran yang diberikan secara terpisah membuat peserta didik belajar menggunakan metode hafalan sebab ia hanya menguasai pengetahuan secara verbalitas.

Kelemahan *subject desain* adalah a) memberikan pengetahuan yang terpisah-pisah; b) diambil dari masa lalu; c) kurang memperhatikan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik; d) sering menimbulkan kesukaran dalam mempelajari dan menerapkannya, dan e) kurang memberi perhatian pada cara penyampaian. Sedangkan kelebihannya adalah a) penyusunan materi cukup mudah; b) penerapannya mudah; c) memudahkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi; d) dapat dilaksanakan secara efisien karena metode utamanya adalah ekspositori yang dikenal tingkat efisiensinya yang cukup tinggi, dan e) sangat tepat digunakan sebagai alat untuk melestarikan dan mewariskan budaya.

literasi nusantara

Pengembangan desain kurikulum ini termasuk pengembangan di luar *subject centered*, seperti *activity* atau *experience design*, dan lainnya. Sementara *disciplines design* termasuk pengembangan dari *subject design*. Keduanya berfokus pada isi atau materi kurikulum. Namun, pada *subject design* belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut subjek, belum ada perbedaan antara matematika, psikologi, dengan teknik atau cara mengemudi, semuanya disebut subjek. Sementara pada *disciplines design,* kriteria subjek yang membedakan apakah pengetahuan itu ilmu atau subjek dan bukan batang tubuh keilmuannya telah ditetapkan. Dalam hal ini, batang tubuh keilmuan menentukan apakah bahan ajar termasuk disiplin ilmu atau bukan. Dalam *disciplines design*, isi kurikulum yang diberikan di sekolah berupa berbagai disiplin ilmu. Peserta didik didorong untuk memahami struktur dasar disiplin, konsep, ide, dan prinsip guna memahami cara mencari dan menemukannya. Saat itu,

peserta didik sudah menggunakan pendekatan inkuiri dan *discovery*.

Kelebihan desain ini adalah selain memiliki organisasi yang terstruktur dan tepat guna, desain ini juga mampu menjaga integritas intelektual pengetahuan, dan peserta didik mampu menguasai konsep, relevan, dan proses intelektual berkembang pada peserta didik. Sedangkan kekurangannya adalah pengetahuan yang terintegrasi belum sanggup diberikan, belum mampu menggabungkan antara sekolah dengan masyarakat atau kehidupan, belum bertolak dari minat dan kebutuhan atau pengalaman peserta didik, susunan kurikulum belum efisien baik untuk kegiatan belajar maupun untuk penggunaannya, dan meski sudah lebih luas dari *subject design*, tetapi secara akademis dan intelektual masih sempit.

c. *Broad fields design*

Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisah dalam *subject design* dan *disciplines design* adalah dengan *broad fields design*. Dalam model ini terjadi penyatuan mata pelajaran yang masih memiliki korelasi. Tujuan pengembangan *broad fields design* adalah membentuk peserta didik yang saat ini sedang hidup dalam dunia informasi yang sifatnya khusus dengan pemahaman yang menyeluruh. Desain *broad fields design* lebih banyak digunakan di SD dan SMP.

Nilai tambah yang dimiliki desain ini adalah: a) memungkinkan penyusunan warisan budaya secara terstruktur; dan b) memungkinkan peserta didik menemukan hubungan antara berbagai hal. Sedangkan kelemahannya adalah: a) kemampuan pendidik, pada sekolah dasar pendidik mampu menguasai bidang yang luas, tetapi di jenjang yang lebih tinggi apalagi di pendidikan tinggi sangat sulit; b) karena bidang yang dipelajari luas, maka tidak dapat diberikan secara mendetail, yang diajarkan hanya permukaannya saja; dan c) mengintegrasikan bahan ajar yang terbatas, tidak menggambarkan kenyataan, tidak memberikan pengalaman yang sesungguhnya bagi peserta didik sehingga belum maksimal membangkitkan minat belajar. Model ini menekankan tujuan penguasaan bahan dan informasi, tetapi kurang menekankan proses pencapaian tujuan yang bersifat sikap dan pengetahuan tingkat tinggi.

d. *Learner-centered design*
Model desain ini berpusat pada peserta didik dan mengutamakan peran peserta didik. Ciri utama yang membedakan antara *learner centered design* dengan *subject centered* adalah model *learned centered design* mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik, bukan dari isi, sedangkan *learned centered design* bersifat *not-preplanned* (kurikulum yang tidak diorganisasikan sebelumnya), tetapi dikembangkan bersama antara pendidik (Sukmadinata, 1995: 116—117).

Organisasi kurikulum didasarkan pada masalah atau tema yang menarik fokus pendidik dan dibutuhkan peserta didik serta sekuennya disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Beberapa desain ini adalah

1. *Activity design* atau *experience design*
Ciri utama model ini adalah: a) struktur kurikulum dipilih berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik; b) kurikulum disusun oleh para pendidik dan peserta didik; dan c) menekankan prosedur pemecahan masalah. Berbeda dengan *subject design* yang lebih menekankan isi, *activity design* lebih memperhatikan proses. Kelebihan desain ini ialah: a) motivasi belajar bersifat intrinsik; b) peserta didik memperhatikan perbedaan individual; dan c) kegiatan pemecahan masalah memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah. Sedangkan kritik tentang kelemahan dari desain ini, yakni: a) penekanan pada minat dan kebutuhan peserta didik belum tentu cocok dan memadai untuk menghadapi kenyataan; b) tidak memiliki pola dan struktur; c) *activity design* sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuens bahan; dan d) sulit menemukan referensi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar karena buku yang ada disusun berdasarkan *subject* atau *discipline design*.
2. *Problem-centered design*
Desain kurikulum ini berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan *learned centered design*, kurikulum model desain ini telah disusun sebelumnya. Isi kurikulum ialah berbagai masalah sosial yang dihadapi peserta didik masa kini dan masa yang akan datang. Penyusunan sekuens didasarkan pada kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. *Problem centered design* dikembangkan dengan menekankan isi maupun perkembangan peserta didik.

Salah satu model dari *problem centered design* adalah *areas of living design*. Di dalamnya ada penggabungan antara tujuan yang sifatnya proses dengan tujuan yang bersifat isi. Pemberian rangsangan pada penguasaan materi yang sifatnya pasif. Menggunakan pengalaman dan situasi nyata peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari kehidupan merupakan ciri lain dari desain ini. Pengalaman masing-masing peserta didik sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan, jadi apabila bidang kehidupan dirumuskan dengan baik, maka akan merangkum berbagai pengalaman sosial peserta didik.

Kelebihan dari desain ini, antara lain: a) masalah kehidupan sosial menjadi penghapus dan pemisah antarsubjek; b) mengarahkan pada penggunaan metode belajar pemecahan masalah; c) menyiapkan materi dalam bentuk yang sesuai untuk memecahkan masalah kehidupan; d) menyiapkan materi dalam bentuk yang fungsional; dan e) motivasi belajar datang dari faktor internal peserta didik. Terlepas dari kelebihannya, desain kurikulum ini juga memiliki kelemahan-kelemahan berikut: a) sangat sukar menentukan ruang lingkup dan sekuens dari sisi kehidupan yang sangat esensial; b) kurangnya integritas dan kontinuitas organisasi isi kurikulum; c) mengabaikan warisan budaya; d) ada kecenderungan untuk mengindoktrinasi peserta didik dengan kondisi yang ada, peserta didik tidak melihat alternatif lain, baik mengenai masa lalu atau masa yang akan datang; dan e) pendidik mengalami hambatan sebab belum adanya buku atau media lain untuk membantu pelaksanaannya.

Masing-masing desain di atas dikembangkan menjadi rancangan kurikulum yang di dalamnya terdapat unsur pokok kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi yang disesuaikan dengan bentuk pengembangan kurikulum.

literasi nusantara

12
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Sebagai upaya menanggapi berbagai persoalan dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi Indonesia, maka pada akhir 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud melalui kegiatan yang dikembangkan di dalam lingkungan Direktorat Peserta didik dan Kemahasiswaan (BELMAWA) mengambil inisiatif yang sejalan dengan gagasan Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Kepelatihan, Kemennakertrans untuk mengembangkan kerangka kualifikasi di tingkat nasional yang kemudian diberi nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Selama periode pengembangan konsep-konsep dasar KKNI tersebut, pihak-pihak di dalam lingkungan Kemendikbud, Kemennakertrans, dan pihak-pihak lain yang terkait, seperti asosiasi industri, asosiasi profesi, badan atau lembaga sertifikasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan tingkat menengah dan tinggi, badan atau lembaga akreditasi diikutsertakan secara intensif untuk menjamin terciptanya landasa pengembangan KKNI yang handal dan komprehensif. Program KKNI ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian peserta didik yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang

literasi nusantara

pekerjaannya masing-masing. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan capaian peserta didik (*learning outcomes*) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan ,atau pengalaman yang telah dilampauinya dan yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Terkait dengan proses pendidikan, capaian peserta didik merupakan hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, atau nonformal.

Dalam arti yang lebih luas, capaian peserta didik juga diartikan sebagai hasil akhir dari proses peningkatan kompetensi atau karier seseorang selama bekerja. Pinsip dasar ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam mengembangkan kerangka kualifikasi masing-masing. Pada proses penyusunan konsep-konsep KKNI, studi banding juga telah dilakukan ke berbagai negara. Kesepadanan antara KKNI dengan kerangka kualifikasi negara-negara lain sangat diperlukan agar KKNI dapat dipahami dan diakui sebagai sistem kualifikasi yang handal dan terpercaya. Selanjutnya, dengan adanya pengakuan dan kepercayaan terhadap KKNI, maka kerja sama atau program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan antara Indonesia dengan negara-negara lain akan lebih mudah diwujudkan.

literasi nusantara

Indonesia menganut *unified system* atau sistem terpadu. Capaian peserta didik untuk jenis pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi untuk jenjang kualifikasi yang sama atau setara, bahkan dapat disetarakan dengan hasil pendidikan non-formal atau informal, mendapat perhatian dalam KKNI. Oleh karena itu, KKNI di Indonesia disusun sebagai satu kesatuan kerangka kualifikasi untuk seluruh sektor pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan. Sebagai kebijakan yang memiliki implikasi luas di masyarakat, KKNI harus dikembangkan dengan teliti disertai dengan tahapan-tahapan yang jelas dan mendorong keikutsertaan semua pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan sehingga hasil yang dicapai merupakan kesepakatan bersama. Implementasi KKNI diharapkan dapat: 1) meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan nasional; 2) meningkatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap hasil pendidikan dan pelatihan nasional; 3) meningkatkan pengakuan terhadap hasil pendidikan non-formal dan informal oleh sistem pendidikan formal; dan 4) meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap

kualitas dan relevansi tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional.

Peran KKNI

Secara umum KKNI diharapkan dapat melahirkan sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran berikut.

1. KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas.
2. KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
3. KKNI yang akan dikembangkan harus luwes sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan keilmuan, keahlian, dan keterampilan di tempat kerja serta selalu dapat diperbaharui secara berkelanjutan.
4. Sifat luwes yang dimiliki KKNI harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai jenjang kualifikasi yang sesuai melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja termasuk perpindahan dari satu jalur ke jalur kualifikasi yang lain.
5. KKNI hendaknya menjadi salah satu pendorong program-program peningkatan mutu baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga kerja sehingga kesadaran terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan secara nasional.
6. KKNI harus mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessmen) terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan proses penyetaraan capaian peserta didik dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.
7. KKNI harus secara akuntabel dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya.
8. KKNI harus dapat menjadi panduan bagi para pencari kerja baru maupun lama dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau karier ditempat kerja masing-masing.
9. KKNI diharapkan dapat menguatkan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Nasional Sertifikasi

literasi

Pekerja (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan lain-lain.

10. KKNI diharapkan mencakup sistem Rekognisi Peserta didik Lampau (RPL) sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karier atau peningkatan jenjang kualifikasi.

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 yang merupakan kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 hingga 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang ditinjau dari sisi penghasil (*supply push)* maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Kualifikasi jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta bahwa jenjang tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi 6 yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan, kultur pendidikan/pelatihan/kursus di Indonesia saat ini dan gelar lulusan setiap jalur pendidikan yang berlaku di Indonesia. Di dalam pengembangannya, jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNI merupakan jembatan untuk menyetarakan capaian peserta didik yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan berbasis kompetensi (Competence Based Training/CBT) atau program peningkatan jenjang karier. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya.

Tapak jalan (diilustrasikan pada gambar 1) tersebut ditempuh melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karier di industri, dunia kerja, atau melalui akumulasi pengalaman individual. Dengan pendekatan tersebut, maka KKNI dapat dijadikan

rujukan oleh empat pemangku kepentingan yang menggunakan pendekatan masing-masing dalam peningkatan jenjang kualifikasi. Misalnya sektor pendidikan formal dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam merencanakan sistem peserta didik perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karier di dunia kerja. Dari sisi lain, pengguna lulusan, asosiasi industri, atau dunia kerja secara umum juga dapat merujuk KKNI untuk memperkirakan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan memposisikannya pada jenjang karier serta memberikan remunerasi yang sesuai. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penjenjangan keprofesian di ranah asosiasi profesi.

Pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat luas juga diakui memiliki jenjang kualifikasi tertentu dalam KKNI karena memiliki pengalaman otodidak yang memenuhi atau sesuai dengan deskripsi kualifikasi pada jenjang tertentu. Konsep dasar KKNI tersebut mengandung makna kesetaraan dan pengakuan yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, KKNI harus dilengkapi dengan mekanisme dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya saling pengakuan. Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas, dan integritas.

literasi nusantara

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh enam parameter utama, yaitu 1) ilmu pengetahuan (*science*), 2) pengetahuan (*knowledge*), 3) pengetahuan praktis (*know-how*), 4) keterampilan (*skill*), 5) afeksi (*affection*), dan 6) kompetensi (*competency*). Parameter tersebut terkandung dalam masing-masing jenjang dan disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut deskriptor kualifikasi. Dengan demikian, kesembilan jenjang kualifikasi dalam llmu pengetahuan (*science*) dideskripsikan sebagai sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan (*knowledge*) melalui hasil-hasil penelitian di suatu bidang pengetahuan (*body of knowledge*). Penelitian berkelanjutan yang digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan harus didukung oleh rekam data, observasi, analisa yang terukur, dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala-gejala alam dan sosial. Pengetahuan (*knowledge*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu

bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Pemahaman (*know-how*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.

Keterampilan (*skill*) dideskripsikan sebagai kemampuan psikomotorik (termasuk *manual dexterity* dan penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Afeksi (*affection*) dideskripsikan sebagai sikap (*attitude*) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh proses peserta didikannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau mayarakat secara luas. Kompetensi (*competency*) adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. KKNI memuat deskriptor-deskriptor yang menjelaskan kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai, dan kemampuan manjerial.

literasi nusantara

Parameter pembentuk setiap deskriptor KKNI diuraikan sebagai berikut.

1. Kemampuan di bidang kerja
   Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang sesuai bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai pula, serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai
   Artinya, deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya.
3. Kemampuan manajerial
   Kemampuan ini menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya.

Penjenjangan dalam KKNI memiliki karakteristik, setiap deskriptor KKNI pada jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how* atau *understanding*), dan keterampilan (*skill*) yang bervariasi satu dengan yang lain. Dengan kata lain, setiap capaian peserta didik dapat memiliki kandungan keterampilan (*skill*) yang lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuannya (*science*), akan tetapi diberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara. Karakteristik lainnya adalah jenjang kualifikasi yang semakin tinggi akan memiliki deskriptor KKNI yang semakin berkarakter keilmuan (*science*), sedangkan semakin rendah kualifikasi akan semakin menekankan pada penguasaan keterampilan (*skill*).

Jalur Ilmu Terapan dan Ilmu Akademik

Berikut skema jalur keilmuan KKNI 2015:

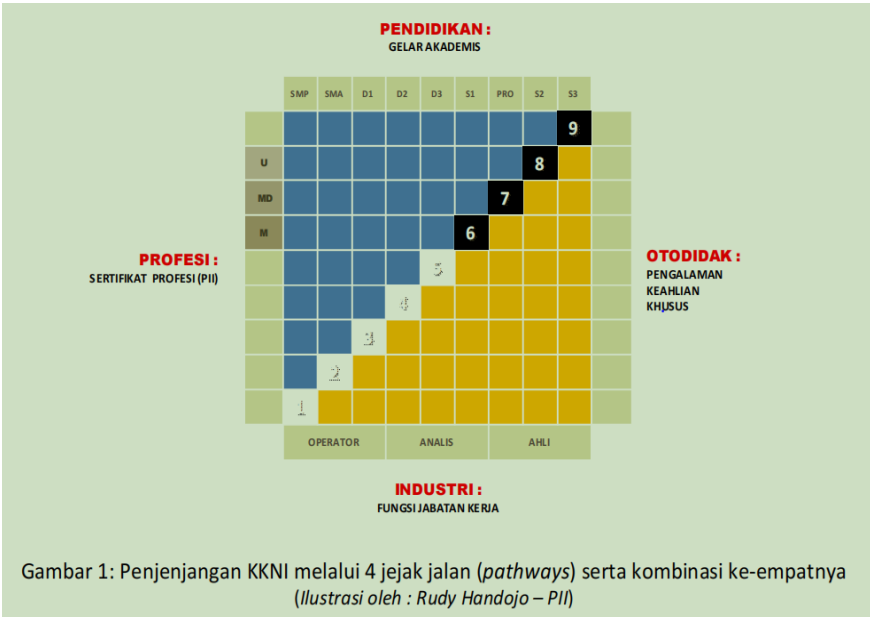

Gambar 1: Penjenjangan KKNI melalui 4 jejak jalan (*pathways*) serta kombinasi ke-empatnya (*Ilustrasi oleh : Rudy Handojo – PII*)

Paradigma Capaian Peserta Didik (Capaian Peserta Didik dan Kompetensi)

Capaian peserta didik (*learning outcomes*) merupakan pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan periode belajar. Dengan

kata lain, capaian peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian peserta didik kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Allan dalam Butcher (2006) menjelaskan bahwa banyak terminologi digunakan untuk menjelaskan *educational intent*, di antaranya *learning outcomes*; *teaching objectives*; *competencies*; *behavioural objectives*; *goals*; dan *aims*.

Menurut Butcher (2006), *aims* merupakan ungkapan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan umum serta menjelaskan informasi kepada siswa tentang tujuan pelajaran, program, atau modul dan umumnya ditulis untuk pengajar bukan untuk siswa. Sebaliknya capaian peserta didik (*learning outcomes*) lebih difokuskan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa selama atau pada akhir proses belajar. Sedangkan *teaching objectives* cakupannya meliputi belajar dan mengajar yang kerapkali digunakan dalam proses asesmen. *Competencies* adalah bentuk capaian peserta didikan dan bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat (*grade*). Capaian peserta didik dapat dicapai dalam bentuk berbagai tingkatan, bahkan dengan berbagai cara, dan hasilnya dapat diukur dengan berbagai cara pula, tidak hanya dengan observasi langsung. Bentuk lain dari capaian peserta didik adalah *behavioural objectives*, di mana pencapaiannya dapat diamati secara langsung.

Capaian peserta didik menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam kerangka kualifikasi. Capaian ini harus disertai kriteria penilaian yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil peserta didik yang diharapkan telah dicapai. Capaian peserta didikan bersama dengan kriteria penilaian dapat menentukan persyaratan untuk pemberian kredit (Butcher dan Highton, 2006). Akumulasi dan transfer kredit dapat dilakukan apabila terdapat capaian peserta didik yang jelas untuk menunjukkan secara tepat atas kredit yang diberikan (Gonzale'z dan Wagenaar, 2005). Hal ini mengidentifikasi capaian peserta didik sebagai tujuan belajar yang terukur.

Kompetensi berasal dari bahasa Latin 'competere' yang memiliki arti 'kesesesuaian'. Kompetensi umumnya direferensikan sebagai

literasi nusantara

kesesuaian dengan pekerjaan tertentu (Nordhaug dan Gronhaug dalam Nilsson, 1994). Di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan, seseorang dinyatakan kompeten apabila ia dapat secara konsisten menerapkan pengetahuan dan keahliannya ke dalam standar kinerja yang diperlukan di tempat kerja (Department of Education and Training, Western Australia, 2008). Kompetensi yang dicapai seseorang merupakan hasil belajar yang terstruktur dan berjenjang yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Menurut Burke (2005), kompetensi dikelompokkan ke dalam beberapa model. *Model pertama* adalah input yang didasarkan pada asumsi mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang (individual attribute). Model ini diasumsikan sebagai konsep yang memiliki pengertian luas (*broaden*), di mana kinerja dilihat sebagai elemen yang merupakan ciri-ciri atau elemen isi (keterampilan, tugas, dll). *Model kedua* adalah *outcome* yang didasarkan atas deskripsi aspek karakteristik pekerjaan (*work role*) atau hasil dari kinerja (*outcomes of performance*) yang memiliki ciri-ciri: didasarkan atas deskripsi hasil pekerjaan, interaksi antara keterampilan teknis dan lingkungan organisasi, serta dinamis terhadap perubahan organisasi dan teknologi. *Model ketiga* adalah kompetensi kerja (*job competence model*) yang didasarkan pada standar input yang sempit dan menekankan deskripsi tugas serta keterampilan kepada prosedur kerja.

literasi nusantara

Sementara Gonczi dalam Velde (2009) membedakan kompetensi ke dalam tiga konsep dasar, yakni: 1) *the behaviourist* yakni kompetensi dikonsepsikan dalam terminologi perilaku diskrit atau *discrete behaviours* yang diasosiasikan dengan penyelesaian berbagai tugas; 2) *the generic* memfokuskan pada atribut seperti *critical thinking capacity*; dan 3) *the integrated* merupakan kombinasi dari pendekatan *the behaviourist* dan *the generic*.

Adapun kompetensi menurut Ellstrom dalam Nilsson (2007) merupakan atribut individu/modal insani berupa kemampuan yang dihasilkan dari semua pengetahuan yang telah diakuisisi oleh seseorang (pengetahuan, afektif, dan keterampilan sosial). Kompetensi juga dapat dinyatakan sebagai *broaden concept*, *can be transferred into productivity* serta merupakan atribut dari suatu pekerjaan, potensi individu, atau kebutuhan tugas (kualifikasi). Kombinasi dari keduanya adalah kompetensi yang benar-benar digunakan di tempat kerja yang merupakan interaksi antara individu dan pekerjaan.

Landasan Hukum Kompetensi dan Capaian Peserta Didikan

Undang-Undang No. 20 2003 Pasal 35 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian kompetensi dalam pendidikan formal nampaknya lebih tepat diungkapkan dalam bentuk capaian peserta didikan. Alasan yang mendasarinya adalah hasil peserta didik pendidikan formal tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, akan tetapi lebih luas lagi untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis sebagaimana diungkapkan dalam visi pendidikan nasional dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010—2025.

Kompetensi memiliki ruang lingkup pengertian luas dan sempit, sedangkan capaian peserta didik (CP) identik dengan kompetensi yang memiliki ruang lingkup luas. Dengan demikian, dalam uraian selanjutnya istilah kompetensi akan digunakan secara bergantian dengan capaian peserta didik sesuai konteks kalimat yang akan diuraikan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 2012 Pasal 1 ayat 2 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menjelaskan bahwa capaian peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Sedangkan pengakuan terhadap capaian peserta didik dijelaskan dalam pasal 4, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut: 1) capaian peserta didik yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat; 2) sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, 3) ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian peserta didik yang diperoleh melalui pendidikan, 4) sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian peserta didik yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja, 5) capaian peserta didik yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat

yang bersangkutan bekerja.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 42 ayat (1) dijelaskan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dalam penyelesaian program studi tertentu yang terakreditasi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Kemudian dalam pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Capaian Peserta Didik Pendidikan Formal

Deskripsi capaian peserta didik untuk masing-masing jenjang kualifikasi lulusan pendidikan tinggi dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dalam Keputusan Menteri tersebut uraian hasil peserta didik dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan, melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
2. Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
3. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

4. Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannva.
5. Program Sarjana hasil lulusan diarahkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
   b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
   c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
   d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
6. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri: (a) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (b) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; (c) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
7. Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi: (a) mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian; (b) mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan

literasi nusantara

(c) mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Capaian Peserta Didik Pendidikan Non-Formal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan non-formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, capaian peserta didik pendidikan non-formal dalam lingkup ketenagakerjaan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Rumusannya dijelaskan dalam pasal (5) berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI. Rumusan kemampuan kerja mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian Peserta Didik Pendidikan Informal

Pendidikan informal diberikan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Werquin (2010) menyebutkan bahwa belajar informal dihasilkan dari kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, atau kesenangan. Tujuan belajar, waktu, dan fasilitas belajarnya tidak terorganisasi dan tidak terstruktur. Ditinjau dari perspektif peserta didik, belajar informal tergolong belajar yang tidak disengaja (Cedefop1, 2008). Oleh sebab itu, peserta didik informal disebut sebagai "peserta didik melalui pengalaman" atau "pengalaman".

Manusia adalah makhluk yang secara terus-menerus berada dalam situasi belajar. Seperti sudah diketahui bahwa kesulitan pertama dalam proses pengakuan hasil peserta didik informal adalah calon yang akan diberikan pengakuan belum tentu sepenuhnya menyadari sifat dan ruang lingkup peserta didik informal yang

telah mereka alami. Masalah kedua, kenyataan bahwa hasil peserta didik informal tidak dapat memperoleh pengakuan apapun jika hasil peserta didikannya jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh evaluator atau badan penilai. McGivney mendefinisikan peserta didik informal sebagai berikut.

1. Belajar yang terjadi di luar lingkungan belajar dan timbul dari kegiatan dan kepentingan individu dan kelompok, tetapi tidak dapat diakui sebagai proses peserta didikan.
2. Kegiatan tidak berbasis mata pelajaran (yang mungkin termasuk diskusi, pembicaraan atau presentasi, informasi, saran dan bimbingan) yang disiapkan atau difasilitasi dalam rangka menanggapi kebutuhan dari berbagai sektor dan organisasi (kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, pelayanan ketenagakerjaan, pendidikan dan jasa pelatihan, dan pelalayanan bimbingan).
3. Peserta didik yang direncanakan dan terstruktur seperti kursus singkat yang diselenggarakan dalam menanggapi kepentingan dan kebutuhan yang teridentifikasi, tetapi disampaikan dengan cara yang fleksibel dan informal serta dalam pengaturan masyarakat informal.

Sedangkan Dale dan Bell (1999) mendefinisikan peserta didik informal agak lebih sempit yakni sebagai proses belajar yang berlangsung dalam konteks kerja, berkaitan dengan kinerja seseorang pada pekerjaannya, tetapi tidak secara resmi diatur dalam program atau kurikulum.

literasi nusantara

Penyetaraan Capaian Peserta Didik Antara Jalur Pendidikan

Kebijakan pendidikan saat ini semakin fokus pada capaian peserta didik dan mengacu kepada perspektif belajar sepanjang hayat. Pengakuan kompetensi yang diperoleh seseorang dari peserta didik non-formal atau informal fokus pada capaian dan penyediaan kesempatan lintas jalur untuk melanjutkan ke pendidikan formal atau kualifikasi yang memiliki penghargaan di pasar tenaga kerja. Fokus utama pengakuan adalah membuat capaian peserta didik itu terlihat sehingga capaian pendidikan non-formal dan informal dapat dilegitimasi dan diakui pada kualifikasi yang sesuai. Meskipun peserta didik sering terjadi dalam kondisi formal pada lingkungan belajar yang tertata, tetapi banyak pula peserta didik yang berharga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari secara informal. Dalam banyak kasus, capaian peserta didik pendidikan informal ini diakui

melalui pemberian upah yang lebih tinggi kepada mereka yang sudah berpengalaman. Pengakuan tersebut telah membuat sumber daya manusia lebih terlihat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya (Werquin, Patric: 2010).

Pengakuan capaian peserta didik pendidikan non-formal dan informal berperan penting disejumlah negara dengan cara menyediakan validasi kompetensi untuk memfasilitasi akses menjadi mahasiswa di pendidikan tinggi. Hal ini sering kali dilakukan melalui pembebasan mata kuliah tertentu atau bagian dari kurikulum sebuah program studi. Pendekatan ini memungkinkan seseorang menyelesaikan pendidikan formal dengan lebih cepat, efisien, dan murah tanpa harus menempuh mata kuliah yang telah dipahami dan dikuasainya. Kesempatan untuk pengakuan capaian peserta didik pendidikan non-formal dan informal juga dapat membuat seseorang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan belajar secara mandiri.Peyetaraan dan pengakuan capaian peserta didik antarjalur pendidikan dapat dilakukan dengan adanya Kerangka Kualifikasi Nasional. Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa kerangka kualifikasi nasional merupakan penjenjangan capaian peserta didik yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

literasi nusantara

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pasal 117 ayat (1) menjelaskan bahwa hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non-formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, penyetaraan antara jalur pendidikan di atas terhadap KKNI digambarkan sebagai berikut.

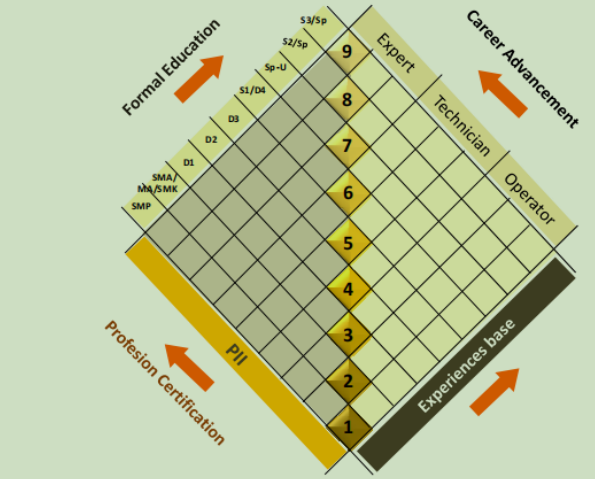

Gambar 1: Penyetaraan antar jalur pendidikan terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesian (Ilustrasi oleh Rudy Handojo, PII)

Werquin (2010) menjelaskan beberapa manfaat dari pengakuan capaian peserta didik pendidikan non-formal dan informal, antara lain

1. Pengakuan menjadikan capaian peserta didik pendidikan non-formal dan informal berguna untuk belajar lanjut pada jalur pendidikan formal.
2. Pengakuan menjadikan capaian peserta didik non-formal dan informal berguna untuk bursa ketenagakerjaan.
3. Pengakuan dapat memperbaiki kesetaraan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Usaha menciptakan kesetaraan dan pengakuan internasional yang telah dilakukan Indonesia adalah meratifikasi berbagai konvensi internasional di berbagai sektor, seperti perdagangan, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah GATS (General Agreement on Trade in Services-5 April 1994), WTO (World Trade Organization-1 Januari 1995), AFTA (Asean Free Trade Area-1992), Regional Convention, The Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific (16 Desember 1983 yang kemudian diperbaharui 30 Januari 2008) mempunyai cakupan yang jelas tentang perlunya kesepamahaman internasional dalam sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi, perdagangan, dan pendidikan.

Atas dasar prinsip kesetaraan internasional untuk sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, maka Indonesia didorong untuk mengembangkan sistem kualifikasi ketenagakerjaan yang dapat dipahami dan disepakati oleh negara-negara yang tercakup dalam konvensi-konvensi internasional. Di satu sisi kesetaraan internasional ini akan memberikan kesempatan mobilitas yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara lain, menciptakan pengakuan kesetaraan internasional terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan di dalam negeri, serta mempermudah pertukaran pelajar, mahasiswa, atau pakar dari Indonesia ke negara lain. Namun, di sisi lain penetrasi tenaga kerja dan pakar asing ke Indonesia juga tidak dapat dibendung lebih lama lagi.

Kondisi ini mendorong Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi implikasi merugikan dari ratifikasi konvensi internasional tersebut. Salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan pendidikan adalah menyusun KKNI dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 2012 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendididikan Tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 5) tersebut dinyatakan bahwa penyetaraan capaian peserta didik yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

1. Lulusan SMA dan SMK paling rendah setara dengan jenjang 2;
2. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
3. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
4. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
5. Lulusan Diploma 4, Sarjana, dan Sarjana Terapan paling rendah setara dengan jenjang 6;
6. Lulusan Magister dan Magister Terapan paling rendah setara dengan jenjang 8;
7. Lulusan Doktor dan Doktor Terapan paling rendah setara dengan jenjang 9;
8. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
9. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Selanjutnya Undang-Undang No. 12 2012 Pasal 29 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Bahwa: (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian peserta didik yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor; (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi; (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Keberadaan regulasi yang dapat menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sangat penting mengingat besarnya jumlah institusi pendidikan di Indonesia yang rinciannya diuraikan sebagai berikut: lebih dari 18.000 SMA dan SMK dan 3.216 perguruan tinggi dengan 17.000 program studi (data pada 2011—2012). Jumlah tersebut belum ditambah dengan ribuan instansi atau lembaga pendidikan informal, non-formal, dan lembaga pelatihan ketenagakerjaan yang tersebar di tanah air. Kedua pasal yang telah diutarakan tersebut relevan untuk mengatur *accountability* dan *compatibility* dari luaran beragam pendidikan yang diselenggarakan.

Upaya-upaya untuk memperbaiki akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan penyetaraan kualifikasi lulusan di Indonesia semakin dituntut karena masih ditengarainya hal-hal berikut: (1) adanya kesenjangan mutu atau capaian peserta didik antarlulusan sekolah menengah atas atau lulusan peguruan tinggi; (2) masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinkronisasi capaian peserta didik antara sekolah menengah atas dan perguruan tinggi secara berkelanjutan; (3) ragam jalur pendidikan dan pelatihan yang ada di Indonesia dengan karakteristik serta capaian peserta didik yang beragam pula; (4) belum terbangunnya saling pengakuan atau kesetaraan kualifikasi antara institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan yang memiliki kebutuhan serta sasaran yang berbeda-beda; (5) keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penjaminan mutu internal maupun eksternal untuk melakukan kajian mutu (*quality assessment*) secara periodik; dan (6) kesenjangan komunikasi, informasi, atau umpan balik dari pihak pengguna lulusan.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa pengembangan sistem kesetaraan kualifikasi dari semua luaran pendidikan dan pelatihan di Indonesia harus dapat mengantisipasi empat hal pokok, yaitu

1. sinkronisasi kebijakan lintas kementerian serta antarlembaga atau asosiasi yang terkait dengan ketenagakerjaan;
2. penyelarasan mutu capaian peserta didik dari institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;

literasi nusantara

3. koordinasi dan sinkronisasi lembaga-lembaga penjaminan mutu yang telah ada maupun yang akan dikembangkan kemudian; dan
4. menjamin terbentuknya kerja sama dan komunikasi yang berkesinambungan antarstakeholders ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam lingkungan Kemenristek-Dikti dibutuhkan adanya sinkronisasi luaran antara pendidikan formal, non-formal, dan informal, termasuk kesetaraannya dengan kriteria dan kebutuhan dunia kerja. Karakteristik dan proses pendidikan pada pendidikan tersebut perlu dikaji lebih komprehensif melalui program-program kegiatan lintas direktorat jenderal. Selain itu, kriteria yang ditetapkan oleh pengguna lulusan untuk berbagai jenis pendidikan yang ada juga beragam sehingga secara paralel diperlukan kerja sama lintas kementerian dan antara pemerintah dengan industri, asosiasi profesi serta kelompok masyarakat pengguna lulusan. Berdasarkan aspek legal Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf e dan f dan Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 huruf h ditetapkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia menganut sistem terbuka yaitu pendidikan harus diselenggarakan dengan fleksibilitas dalam pemilihan jalur pendidikan dan waktu penyelesaian program lintas satuan atau jalur pendidikan (*multi entry-multi exit sistem*).

Peserta didik dapat belajar sambil bekerja serta mengikuti peserta didik tatap muka atau jarak jauh. Pelaksanaan undang-undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa pengembangan kerangka kualifikasi yang mencakup bidang pendidikan hendaknya mampu memberi peluang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk memperoleh kesetaraan jenjang kualifikasi melalui setiap jalur atau berpindah jalur pendidikan sesuai dengan pilihanya masing-masing. Oleh karena itu, kerangka kualifikasi yang akan dikembangkan hendaknya mencakup sistem Rekognisi Peserta Didik Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) sehingga dapat menjamin fleksibilitas pengembangan karier atau peningkatan jenjang kualifikasi. Untuk mempertegas pengakuan terhadap aplikasi dari Sistem Terbuka, maka Pasal 38—40 Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38

(1) *Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar Program Studi pada program Pendidikan yang sama; jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau Perguruan Tinggi.*
(2) *Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 39

(1) *Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.*
(2) *Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.*
(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 40

(1) *Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.*
(2) *Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

literasi nusantara

Sampai saat ini secara terpisah-pisah proses penyelarasan awal telah dilakukan dan melahirkan beberapa kesepakatan antara Kemenristek-Dikti dengan kementerian lain seperti Kemnaker atau Kemenkes. Hal yang sama juga telah dilakukan secara terpisah tentang penyetaraan kualifikasi capaian peserta didik jenis pendidikan vokasi untuk tingkat SMK atau Diploma dengan asosiasi profesi atau asosiasi industri tertentu. Proses penyelarasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan deskripsi KKNI dalam bentuk persandingan capaian peserta didikan. Untuk mengkaji pendidikan antarnegara, maka kondisi berikut semakin menguatkan perlunya KKNI yang levelnya dideskripsikan dalam bentuk capaian peserta didik (*learning outcomes*) yang berhasil diperoleh peserta didik dari program pendidikan.

Perbedaan waktu studi menyulitkan untuk membuat pengakuan dalam program kerja bergelar. Untuk itu, deskripsi capaian peserta didik yang dituangkan dalam SKPI menjadi sangat penting sebagai metode atau alat berkomunikasi antarkualifikasi. Dari sisi Kemenristek-Dikti, implementasi KKNI dimulai dengan proses

mendeskripsikan kualifikasi lulusan program pendidikan secara jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Luaran dari proses ini adalah deskripsi capaian peserta didik dari program studi yang kemudian secara legal dituangkan dalam SKPI.

Dengan terbitnya SKPI, maka implementasi kebijakan KKNI akan secara substansial mendorong pengembangan sistem penjaminan mutu yang mampu melakukan fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (*assessment*) terhadap perguruan tinggi penghasil lulusan serta badan atau lembaga yang terkait dengan proses penyetaraan capaian peserta didik dengan jenjang kualifikasi yang sesuai. Dampak lebih lanjut dari pengembangan sistem penjaminan mutu yang mengevaluasi *outcomes* dari program pendidikan adalah peningkatan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada, baik SPMI maupun yang bersifat eksternal seperti BSNP, BAN, BNSP, LSP, dan lain-lain.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian peserta didik lulusan pada jenjang KKNI yang relevan dalam suatu format standar yang mudah dipahami masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik, buka pula media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

SKPI mula-mula dikembangkan oleh UNESCO pada 1979. Selanjutnya, pada 2003, ENQA menyatakan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh European Commission, Council of Europe, dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kemudian, ijazah perguruan tinggi di Eropa yang lulus pada 2005 telah dilengkapi oleh SKPI. Selain itu, mahasiswa di Eropa yang lulus dari sekolah vokasi atau peserta program pelatihan juga menerima sejenis SKPI yang disebut Europass Certificate Supplement. Para pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa sangat terbantu dengan adanya Europass Certificate Supplement dalam memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat tersebut atau posisi kualifikasinya dalam Eropean Qualification Framework

literasi nusantara

sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

Manfaat SKPI

Surat keterangan pendamping ijazah bagi setiap alumnus bermanfaat untuk:

1. Menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan agar mudah dimengerti pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Menjelaskan prestasi dan kompetensi pemegangnya.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Adapun bagi pendidikan tinggi, SKPI memiliki manfaat untuk:

1. Menyediakan penjelasan terkait kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian peserta didik suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan *trust* dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara.
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Dokumen SKPI juga membantu pemegangnya dalam:

1. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi).
2. Kemudahan dibaca dan diperbandingkan dengan negara-negara lainnya.
3. Memberikan rekaman karier akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah.
4. Menekankan kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri.
5. Menekankan peserta didik sepanjang hayat.
6. Memfasilitasi mobilitas mahasiswa.
7. Meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional.

literasi nusantara

8. Memperlancar penerimaan mahasiswa baru.
9. Meningkatkan profil institusi perguruan tinggi ke dunia internasional Substansi Pokok SKPI.

Surat keterangan pendamping ijazah akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan Capaian Peserta Didik (CPM) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun capaian peserta didik menurut Peraturan Presiden No. 8 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat *outcome* dari semua proses pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal sebagai proses internasilisasi dan akumulasi empat parameter utama, yaitu (a) ilmu pengetahuan (*science*) atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*), dan (d) kompetensi kerja (*competency*) sebagaimana diilustrasikan pada diagram capaian peserta didik/ kompetensi lulusan. Berikut uraiannya.

1. Ilmu pengetahuan (*science*) dideskripsikan sebagai sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan (*knowledge*) melalui hasil penelitian dalam suatu bidang pengetahuan (*body of knowledge*). Penelitian berkelanjutan digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan yang harus didukung oleh rekam data, observasi, dan analisis yang terukur serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala alam dan sosial.
2. Pengetahuan (*knowledge*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
3. Pemahaman (*know-how*) dideskripsikan sebagai penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
4. Keterampilan (*skill*) dideskripsikan sebagai kemampuan psikomotorik (termasuk *manual dexterity* dan penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman

(*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.

5. Afeksi (*Affection*) dideskripsikan sebagai sikap (*attitude*) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan karena proses peserta didikannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau mayarakat secara luas.
6. Kompetensi (*competency*) adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Sementara untuk pendidikan tinggi, penyesuaian terhadap definisi capaian peserta didik didasarkan atas Peraturan Presiden No. 8 2012 yang luas dan komprehensif agar sejalan dengan karakteristiknya. Penyesuaian ini menghasilkan definisi CPM dan digunakan sebagai ukuran untuk menilai kompetensi lulusan suatu program studi. Standar kompetensi lulusan merupakan capaian peserta didik minimum yang diperoleh melalui internalisasi: 1) pengetahuan; 2) sikap; dan 3) keterampilan. Sedangkan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan juga asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
2. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, atau pengalaman kerja mahasiswa.
3. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktik, atau praktik kerja lapangan.

Secara konseptual, setiap jenjang pendidikan yang berkesesuaian

Digitasi Nusantara

dengan jenjang KKNI tertentu, pernyataan kualifikasi lulusan (CPM atau SKL) disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut deskriptor kualifikasi. Ketiga parameter dari CPM atau SKL diterjemahkan dalam empat jenis uraian sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang serta tanggung jawab. Uraian parameter pembentuk setiap deskriptor KKNI sebagaimana berikut.

1. Sikap dan tata nilai
   Komponen ini menjelaskan moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Selain itu, komponen tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi tetapi merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia dan mengandung aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Kemampuan di bidang kerja
   Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai, serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Pengetahuan yang dikuasai
   Deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya.
4. Hak/wewenang dan tanggung jawab
   Komponen ini menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya.

literasi nusantara

Data SKPI

SKPI minimal wajib memuat data-data sebagaimana di bawah ini.

1. Logo dan kop surat perguruan tinggi
2. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI:
   a. nama lengkap;
   b. tempat dan tanggal lahir;
   c. nomor induk mahasiswa;
   d. tahun masuk;
   e. tahun lulus;

f. nomor ijazah; dan
g. gelar/sebutan lulusan.

3. Informasi tentang identitas penyelenggara program
   a. nama perguruan tinggi;
   b. status akreditasi perguruan tinggi saat SKPI ditandatangani; dan
   c. Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani.

   Adapun identitas penerima SKPI yang dicantumkan dalam situs resmi perguruan tinggi adalah;
   a. nama program studi;
   b. status akreditasi program studi saat SKPI ditandatangani;
   c. Nomor SK akreditasi program studi saat SKPI ditandatangani;
   d. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
   e. jenjang pendidikan;
   f. jenjang kualifikasi sesuai KKNI;
   g. persyaratan penerimaan;
   h. bahasa pengantar kuliah;
   i. sistem penilaian (uraian gradasi penilaian dan penjelasannya);
   j. lama studi reguler;
   k. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan; dan
   l. status profesi (bila ada).
4. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai
5. Bagian ini berisi capaian peserta didik (CP) lulusan berdasarkan Undang-Undang No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai Kompetensi Lulusan (KP), dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang dan tanggung jawab. Tambahan informasi terkait prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan di SKPI seperti perolehan penghargaan, sertifikat, atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel.
6. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Pengesahan SKPI

literasi nusantara

a. tanggal;
b. tanda tangan;
c. nama jelas;
d. jabatan (minimal dekan);
e. nomor identifkasi pejabat penandatangan; dan
f. cap PT (*official stamp*);

8. Akuntabilitas SKPI
   PT bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan pada SKPI.
9. Lampiran
   Lampiran ini bersifat pilihan yang berisi tambahan informasi terkait prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa), seperti perolehan penghargaan, sertifikat atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel.
10. Akuntabilitas lampiran SKPI
    Lulusan bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan pada lampiran SKPI.

literasi
nusantara

literasi
nusantara

13
KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

Kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka telah mendominasi berbagai diskursus mulai dari lingkungan formal di ruang perkuliahan hingga diskusi di teras-teras cafe, baik oleh civitas akademika maupun masyarakat umum sehingga menuai beragam respons yang sifatnya pro dan kontra. Dalam hal ini, tentu lingkungan pendidikan tinggi berpotensi memiliki dampak tercepat untuk perubahan sumber daya manusia unggul sebab jangka waktu dari lulus hingga masuk ke dunia pekerjaan tergolong cepat. Pada tahap ini, masyarakat berpeluang meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus membangun sumber daya manusia yang unggul, terutama pada jenjang S-1.

Perguruan tinggi yang berkualitas membuatnya berposisi sebagai ujung tombak karena sangat dekat dengan dunia kerja. Institusi ini sejatinya harus memiliki gerak inovasi tercepat dari unit pendidikan lainnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi seharusnya memiliki taktik dan strategi untuk terus berubah secara lincah dan fleksibel. Namun faktanya, perguruan tinggi saat ini belum memiliki perhatian yang signifikan dalam aspek inovasi, baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, riset, maupun pengabdian masyarakat. Terlepas dari kenyataan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk menjaga spirit kampus merdeka: "*Inovasi tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak, inovasi sangat berkembang dalam ekosistem yang tidak dibatasi.*" Kebijakan-kebijakan kampus merdeka diuraikan sebagai berikut.

1. Kemerdekaan Akademik
   a. Melalui kebijakan kampus merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginginkan universitas di Indonesia diberi ruang yang cukup memadai untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.
   b. Kebijakan kampus merdeka menitikberatkan pada pelonggaran proses akreditasi, pemberian hak pada mahasiswa untuk belajar di luar kelas, otonomi pembukaan program studi (prodi) baru, dan kemudahan PTN Badan Layanan Umum (BLU) serta Satuan Kerja.
   c. Satuan kerja menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemerdekaan akademik memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi atau prodi apapun, sementara dosen memiliki kebebasan untuk mengajar ilmu yang sesuai dengan kepakarannya.
   d. Pemberian otonomi pembukaan prodi baru menuntut universitas untuk cermat mengamati perkembangan zaman agar mampu menawarkan bidang studi yang tidak cepat kadaluwarsa dan mampu bertahan di masa depan, misalnya sains data, kecerdasan buatan, bio-ekonomi, *e-commerce*, dan sebagainya.
   e. Keberadaan prodi-prodi baru tersebut memberi kebebasan lebih besar kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan tren lapangan pekerjaan di masa depan.
   f. Mahasiswa menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan kehadiran prodi-prodi baru tersebut. Demikian pula dengan hak mahasiswa, kelas dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, dan sejenisnya. Dengan demikian, mahasiswa menjadi pihak yang sangat diuntungkan dengan kebijakan ini. Melalui pengalaman belajar di luar kelas, mahasiswa akan lebih mampu menerapkan ilmunya pada kehidupan nyata sekaligus meningkatkan daya saing dalam mencari pekerjaan.

Seorang filsuf Jerman, *Johann Gottlieb Fichte* (1809) telah menekankan salah satu ciri universitas modern yakni kemampuan lulusannya untuk menerapkan ilmu yang dipelajarinya di dunia nyata dan tidak hanya pandai berteori (Fichte, 1807). Walaupun belum diwajibkan dan hanya berbentuk pilihan, kesempatan untuk belajar di luar kelas menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Apabila kita menelaah

literasi nusantara

data publikasi UNESCO yang menunjukkan sebanyak 5 juta mahasiswa di seluruh dunia mengikuti program pertukaran pelajar (*student exchange/mobility*), jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya mencatat 4 juta mahasiswa. Demikian pula dengan program magang yang semakin banyak dipilih oleh mahasiswa di Indonesia. Tahun lalu, Kemenristekdikti (sekarang-Kemendikbud) memberi kemudahan dengan membuat keputusan bahwa 45 jam kerja magang setara dengan satu satuan kredit semester (SKS) sehingga mahasiswa tidak khawatir kehilangan SKS selama proses magang.

Jika mahasiswa banyak diuntungkan dengan kebijakan kampus merdeka, bagaimana dengan kondisi dosen? Dosen di Indonesia memiliki tiga tugas pokok, yaitu: 1) pendidikan dan pengajaran, 2). penelitian, dan 3) pengabdian masyarakat yang dikenal dengan istilah "Tri Dharma Perguruan Tinggi". Walaupun secara umum terlihat sederhana, tetapi dalam praktiknya cukup berat terutama terkait pelaksanaan projek penelitian dan publikasi hasil penelituan dalam jurnal bereputasi sebagai bagian wajib dalam pelaporan BKD (Beban Kerja Dosen) yaitu satuan SKS yang harus dicapai seorang dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada periode tertentu.

Penelitian Doyle dan Hind (1998) terhadap 582 dosen di berbagai universitas di Inggris menunjukkan 77% responsden pria dan 74% responsden wanita mengakui beban tugas mereka telah meningkat selama 5 tahun terakhir, terutama tugas-tugas administratif yang memiliki relevansi minimal dengan tugas-tugas pokok sebagai akademisi. Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019) yang mengambil sampel tenaga pengajar di Universitas Padjajaran menunjukkan indikasi tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh dosen dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental serta fisik mereka. Keinginan Mendikbud untuk mendorong dunia pendidikan di tanah air agar adaptif terhadap perkembangan zaman bisa dipahami dan patut didukung secara penuh. Namun, hal tersebut sukar terwujud jika para dosen sebagai mesin penggerak revitalisasi pendidikan tinggi masih dibelenggu oleh tugas-tugas administratif yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada baiknya Mendikbud meninjau ulang beban kerja dosen, terutama yang terkait dengan tugas-tugas administratif agar cita-cita kampus merdeka tidak

literasi nusantara

hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga para dosen.

Kebijakan kampus merdeka program pertama adalah perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS memiliki otonomi pembukaan program studi baru. Syaratnya, mereka harus membuka studi baru dengan akreditasi tinggi yakni A dan B serta telah bekerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World University.* Namun, hal ini tidak berlaku atau dikecualikan untuk prodi kesehatan dan pendidikan sebab semua program studi baru akan mendapat akreditasi C. Kemendikbud juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan serta akan mengawasi secara ketat dan mewajibkan melakukan "*tracer study*" setiap tahunnya.

2. Proses reakreditasi secara otomatis dan sukarela
   Proses akreditasi saat ini wajib dilakukan setiap lima tahun sekali. Kebijakan ini akan membuat proses tersebut diperbarui secara otomatis untuk seluruh peringkat di semua perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap. Evaluasi akreditasi akan dilakukan oleh BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas berdasarkan pengaduan masyarakat yang disertai bukti konkret, penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.
3. Syarat menjadi PTN-BH dipermudah
   Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN-BH tanpa terikat status akreditasi. Hingga saat ini, hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN BH.
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi dan perubahan definisi SKS
   Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Kementerian menilai saat ini bobot SKS untuk kegiatan peserta didik di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Apalagi di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Setiap SKS diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan lagi "jam belajar". Kegiatan di sini bisa berarti belajar di kelas, magang,

literasi nusantara

atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, ataupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Nadiem Anwar Makarim menganalogikan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai kondisi masa lalu dan masa kini. Bayangkan, jika suatu hari seorang mahasiswa S-1 harus berenang ke suatu pulau yang berada di laut bebas dan ia hanya dibekali satu gaya renang misalnya gaya bebas. Dalam hal ini satu gaya dianggap satu prodi dan ia hanya dilatih di kolam renang (kampus). Secara otomatis semua mahasiswa hanya akan belajar satu disiplin ilmu dan tempat berlatihnya adalah kolam renang yang aman, tidak menemui ombak, tidak ada arus cuaca, dan telah dilengkapi dengan beragam pengaman yang tersedia. Padahal, semua mahasiswa ini nantinya akan berenang menuju pulau dan tentu akan terkena ombak, menghadapi cuaca yang tidak menentu, dan berbagai rintangan lainnya. Jadi, bagaimana mungkin mahasiswa dapat melalui itu semua jika ilmu yang diberikan hanya terbatas? Oleh karena itu, seorang sarjana disarankan untuk belajar berbagai disiplin ilmu. Mereka dapat belajar berenang gaya bebas, gaya punggung, cara mengapung, dan tidak hanya berlatih di kolam renang, tetapi juga di lautan bebas. Inilah sebenarnya tujuan belajar tiga semester di luar prodi pada program S-1, para mahasiswa benar-benar akan disiapkan untuk terjun ke dunia nyata yang penuh berbagai rintangan.

Pemberlakuan kebijakan kampus merdeka dijalankan berdasarkan pembukaan program studi baru sesuai: 1) Permendikbud No. 7 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 2) Permendikbud No. 5 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 3) Permendikbud No. 4 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan 4) Hak belajar tiga semester di luar program studi sesuai Permendikbud No. 3 2020 tentang Standar Nasional Perguruan tinggi.

Perguruan tinggi wajib menjalankan konsep merdeka dalam belajar dan memberikan hak mahasiswa secara sukarela dengan cara memperbolehkan: 1) mahasiswa mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester (setara dengan 40 SKS); dan 2) mahasiswa dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Dengan

kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah 4 sampai 11 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Adapun perubahan definisi SKS adalah: 1) setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar; 2) definisi kegiatan belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi; dan 3) daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) dapat dipilih dari: a) program yang ditentukan pemerintah; dan b) program yang disetujui oleh rektor. Kurikulum prodi harus dikembangkan dan dirancang dengan cermat. Sebagai penggerak, dosen memfasilitasi mahasiswanya secara independen. Salah satunya menggunakan metode-metode non-kuliah, seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri) bila perlu di RPL-kan, dan *project* yang melibatkan mahasiswa.

Mekanisme Pelaksanaan Kampus Merdeka di Indonesia beserta Permasalahannya

M. Wiranto B. Manalu dalam tulisannya menyatakan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Pendidikan yang berkualitas akan mencerminkan masyarakat yang maju, damai, dan mengarah pada sifat-sifat konstruktif. Pendidikan juga menjadi roda penggerak sehingga kebudayaan dan kebiasaan setiap zaman akan mencapai kehidupan yang lebih baik sebab pendidikan akan melahirkan hal-hal yang kreatif dan inovatif.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi beban untuk pemerintah Indonesia. Jika dilihat dalam sejarah pendidikan kita, pendidikan di Indonesia memang tertinggal jauh dengan negara-negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Hal ini disebabkan pada zaman kolonialisme, banyak pemikir Indonesia belajar ke luar negeri. Memang di Indonesia, telah dibangun beberapa sekolah, tetapi hanya untuk orang-orang Belanda dan keluarga ningrat.

Baru setelah Indonesia merdeka, sekolah mulai dibangun. Pada masa orde lama dan orde baru, bahkan hingga saat ini, kehidupan bangsa semakin baik, tetapi tetap dianggap kurang maksimal.

Kebijakan-kebijakan yang menyimpang membuat pendidikan di Indonesia masih saja tertinggal dengan negara-negara lain. Berbagai upaya pemerintah di setiap zaman telah dilakukan, mulai dari program wajib belajar, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, dan program-program lain yang mengupayakan peningkatan kualitas. Namun, yang menjadi pertanyaan hingga saat ini adalah: Ke mana arah pendidikan Indonesia saat ini? dan Mengapa pendidikan Indonesia melakukan perubahan-perubahan sistem? Menurut penulis, pada dasarnya yang perlu diubah adalah orang-orang yang menjalankan sistem pendidikan.

Pada dasarnya, sistem dibuat untuk dijalankan dengan benar sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai. Maka, dalam hal ini perlu penegasan dalam menjalankan revolusi mental bagi orang yang diberikan tanggung jawab. Dengan demikian, diperlukan penataan secara kompleks agar pendidikan juga tersampaikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Sehubungan dengan hal tujuan, mungkin Indonesia perlu belajar dari pendidikan di Yunani yang mengarahkan tujuan pendidikan kepada pertahanan sehingga sistem pendidikan mereka diatur secara sistematis dan terfokus kepada pertahanan. Pendidikan di Indonesia menurut penulis, tampaknya belum mengarahkan fokus tujuan pendidikan, apakah akan dibuat ke arah ekonomi politik atau seperti Yunani Kuno yang memfokuskan pendidikannya ke arah pertahanan atau arah pendidikan yang mendukung semua sektor?

literasi nusantara

Saat ini, di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo melalui Nadiem Makarin, Kemendikbud menetapkan kebijakan "Merdeka Belajar". Wujud nyata dari program ini adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021 dan diganti dengan sistem penilaian "Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter". Melalui asesmen kompetensi minimum, kita dapat memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum, ungkap Nadiem Makarin dalam peluncuran empat pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar di Jakarta. Beliau juga menjelaskan alasan-alasan yang mendasari kebijakan ini, salah satunya bahwa di masa sekarang, nilai bukanlah penentu kompetensi seseorang dan akreditasi pun tidak lagi menjadi tolak ukur kemampuan. Tentu adanya program ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Pada sisi lain, banyak masyarakat yang mendukung kebijakan, tetapi ada pula masyarakat yang kurang setuju sebab menganggap anak-anaknya akan terlalu santai sebab tidak lagi memikirkan UN yang

sebenarnya dapat dijadikan tolak ukur kompetensi secara nasional yang soal-soalnya telah disesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku.

Rocky Gerung pernah mengatakan, "Bahwasannya ijazah itu menandakan kita pernah sekolah, bukan membuktikan bahwasannya kita pernah berpikir." Argumentasi ini senada dengan apa yang akan diupayakan oleh Kemendikbud saat ini. Peningkatan mutu sumber daya manusia menghadirkan masyarakat yang kaya akan kreativitas dalam pengaktualisasian ilmunya sendiri dan memaksa supaya tidak berpikir monoton. Hal tersebut adalah tujuan utama perubahan kebijakan saat ini. Adapun kebijakan berfokus pada peningkatan tiga indikator ,yaitu numerasi yang merupakan peningkatan kemampuan penguasaan tentang angka-angka, literasi adalah kemampuan menganalisis bacaan dan memahami tulisan tersebut, serta pembinaan karakter yakni mendorong peserta didik agar selalu menanamkan sikap gotong-royong ke-bhinnekaan dan sebagainnya.

Namun, konsep merdeka belajar ini tampaknya juga belum menentukan arah pendidikan, begitu pula dengan konsepnya, apakah akan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi sehingga menuntut siswa belajar dengan bebas? Dalam hal ini, penulis bukan bermaksud pesimis dengan kebijakan Kemendikbud, tetapi melihat sejarah, pendidikan kita memang belum menentukan fokusnya sehingga persoalan pendidikan banyak yang belum terselesaikan. Selain itu, diperlukan pula ketelitian melihat situasi psikologi pendidikan di negara kita sebab potensi dan kondisi di setiap wilayah kita juga berbeda.

literasi nusantara

Program merdeka belajar ini telah dijalankan selama dua tahun yakni sepanjang tahun 2020 (episode pertama hingga keenam) dan pada tahun 2021. *Episode pertama*, Kemendikbud menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan yakni menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Peserta didik (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Episode kedua,* Kemendikbud menetapkan program "Kampus Merdeka". Mereka melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi, di antaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi. *Episode ketiga*, Kemendikbud mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. *Episode keempat* melahirkan Program

Organisasi Penggerak (POP) yang tujuannya memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun "Sekolah Penggerak". *Episode kelima*, Kemendikbud mengagas program "Merdeka Belajar: Guru Penggerak" yang fokus pada pedagogi dan berpusat pada murid serta pengembangan holistik serta pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on-the-job coaching*. *Episode keenam*, pada 3 November 2020, Kemendikbud meluncurkan "Merdeka Belajar: Transformasi Dana Pemerintah" untuk Pendidikan Tinggi yang diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Berikut adalah delapan prioritas Merdeka Belajar pada 2021 yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

1. KIP Kuliah dan KIP Sekolah
   Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan rincian: KIP Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa dan KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa; layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah; tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru; pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN); serta bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.
2. Program digitalisasi sekolah
   Program digitalisasi sekolah dan medium peserta didik melalui empat sistem penguatan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.
3. Prestasi dan penguatan karakter
   Prestasi dan penguatan karakter diwujudkan melalui pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 pemerintah daerah, dan peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.
4. Guru penggerak
   Pada 2021 Kemendikbud menargetkan akan melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap

literasi nusantara

10.000 guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 pemerintah daerah, dan penjaminan mutu, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.

5. Kurikulum baru
   Dalam peningkatan kurikulum dan asesmen nasional, Kemendikbud akan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan, serta akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga.
6. Revitalisasi pendidikan vokasi
   Kemendikud akan merevitalisasi 900 SMK berbasis industri 4.0, dukungan dan percepatan *link and match,* kemitraan dengan 5.690 orang, 250 dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Selain itu, ada pula dukungan pencapaian indeks kinerja utama pada 47 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang akan melakukan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan kewirausahaan kepada 66.676 orang, penguatan pendidikan tinggi vokasi pada 200 program studi, sertifikasi kompetensi kepada 300 orang dosen, penguatan pendidikan PNBP/BLU kepada 75 perguruan tinggi, dan penguatan sarana prasarana di delapan perguruan tinggi.
7. Kampus Merdeka
   Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi, *competitive fund dan matching fun* bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta, peningkatan kualitas SDM, peserta didik, dan kemahasiswaan sehingga tercipta 50 ribu mahasiswa yang berwirausaha, 400 ribu mahasiswa kampus merdeka, 660 program studi terkait inovasi peserta didik digital, dan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.
8. Pemajuan kebudayaan dan bahasa
   Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan, mengadakan kegiatan dan program publik dengan sasaran 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya tak benda pada 72.305 unit, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan kepada 359 desa dan 260 kelompok masyarakat, serta layanan kepercayaan

literasi nusantara

dan masyarakat adat kepada 1.031 orang di 25 wilayah adat. Selain itu, Kemendikbud menyasar pembinaan bahasa dan sastra bagi 4.117 penutur bahasa, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga, dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah bagi 21.132 penutur bahasa.

literasi
nusantara

literasi
nusantara

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. 1998. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Mohammad dkk. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.

Arends, Richard L. 2004. *Learning to Teach.* New York: McGraw Hill.

Arifin, Zainal. 2012. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2014. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Jakarta: Rosda Karya.

_____. 2014b. *Pendekatan dan Model Pengembangan Kurikulum.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 1988. *Penilaian Program Pendidikan.* Jakarta: PT Bina Aksara.

_____. 1990. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta: BSNP.

Burke, Travis B. 2005. *Defining Competency and Reviewing Factors That May Impact the Perceived Importance. Knowledge and Use of Competencies in The 4- H Professional's Job. Dissertation*. Department of Adult and Community College Education: Caroline State University.

Butcher, C., Clara D., dan Melissa H. 2006. *Designing Learning: From Module Outline to Effective Teaching.* London and New York: Routledge .

Daft, Richard L. 2008. *New Era of Management*. New Jersey: South Western.

literasi nusantara

_____. 2010. *Management*. New Jersey: Prentice.
Daft, Richard L. dan Dorothy Marcic. 2009. *Understanding Management.* London: South Western.
Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan kurikulum.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
_____. 2004b. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
Danim, Sudarman. 1994. *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Dedi, Supriadi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Dirawat dkk. 1986. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
Everard, K. B., Geoffrey Morris dan Ian Wilson. 2004. *Effective School Management.* London: Paul Chapman Publishing.
Fathurrahman, Khoiru Ahmadi. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka karya.
Fattah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
_____. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdkarya.
_____. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Gough, R. W. 1998. "A Practical Strategy for Emphasizing Character Development in Sport and Physical Education". dalam *Journal of Physical Education. Recreation & Danc,* 69(2).
Guba, Egon G. dan Yvonna S Licoln. 1991. *Effective Evaluation*. Oxford: Bass Publisher.
Gunawan, A. H. 1996. *Administrasi Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
Hamalik, Oemar. 1990. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
_____. 1990b. *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Pengembangannya.* Bandung: Mandar Maju.
_____. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
_____. 2011. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Hasibuan, Malayu S.P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

literasi nusantara

Havelock, Ronald G. 1995. *The Change Agent's Guide.* Edisi Kedua. NJ: Educational Technology Publ.
Hidayat, Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hornby, A.S. 1974. *Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English.* Britani Raya: Oxford University Press.
Ibrahim. 1988. *Inovasi Pendidikan: Proyek Pengembangan* LPTK Depdikbud. Jakarta: Dikti.
Idi, Abdullah. 2014. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Imron, Ali. 2015. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara.
Jalal, Fasli dan Dedi Supardi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Kasan, Tholib. 2000. *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan.* Jakarta: Studia Press.
Kastawi, N. S., Suwarno W., dan Eko Retno M. 2017. "Kendala dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya". dalam *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*. 5(2).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Dokumen Kurikulum 2013.* Jakarta: Depdiknas.
Kompri. 2012. *Manajemen Pendidikan-2*. Bandung: Alfabeta.
Lumpkin, A., Sharon Kay St., dan Jennifer B. 2003. *Sport Ethics: Applications for Fair Play*. Edisi Ketiga. Boston: Mc-Graw-Hill.
M, Surya dkk. 2007. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya.* Jakarta: Rineka Cipta.
Mannulang. 1976. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
McGivney, Veronica. 1999. *Informal learning in the community: a trigger for change and development. Published: Leicester*. England: National Institute of Adult Continuing Education (England and Wales)
Mudlofir, Ali. 2011. *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muflihin, Muh. Hizbul. 2017. *Administrasi Manajemen Pendidikan*. Klaten: CV Gema Nusa.
Mujamil Qomar. 2007. *Manjemen Pendidikan Islam*. Jakarta : Erlangga.
Mulyasa, E. 2008. *Kurikulum Berbasis Kompetensi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

literasi nusantara

_____. 2009. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Peserta Didik Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
_____. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
_____. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
_____. 2014. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
Musyarapah. 2014. "Manajemen Proses Pengembangan Kurikulum (Need Assesment dan Pengembangan Desain Kurikulum)". dalam *Jurnal Al-Risalah*, 10(2), pp.227–40.
Nahlawi, Abdurarahman. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Pers.
Nasution. 1993. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
_____. 2006. *Asas-Asas Kurikulum.* Jakarta: Bumi Aksara.
_____. 2008. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
Nazarudin. 2007. *Manajemen Peserta didikan*. Yogyakarta: Teras.
Nilsson, Staffan dan Kerstin Ekberg. 2013. "Employability and work ability: returning to the labour market after long-term absence." dalam *A Journal of Prevention Assesment and rehabilitation*, 44(4), pp. 449–457.
Nurhadi, Mulyani A. 1983. *Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ornstein, Allan C. dan Francis P. Hunkins. 1978. *Curriculum Foundations. Principles. and Issues.* New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs.
Patmonodewo, Soemiarti. 2003. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
Popham, Estelle L. 1975. *A Teaching Learning Sistem for Business Education.* New York: McGraw-Hill.
Purwanto, Ngalim. 1995. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
_____. 2002. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Qomar, Mujamil. 2008. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

literasi nusantara

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kesekretariatan Indonesia.

Ruhimat, Toto dan Muthia Alinawati. 2013. *Kurikulum dan Peserta didikan*. Jakarta: Rajawali Press.

Rusman. 2012. *Manajemen Kurikulum.* Jakarta : Rajawali Pers.

Sa'ud, Udin Syaefudin. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Samsih. 2014. "Peran Guru Kelas dalam Menangani Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar Melalui Layanan Bimbingan Konseling". dalam *Jurnal Ilmiah Mitra Ganesha,* 1(1), Surakarta: FKIP UTP Surakarta.

Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Peserta Didik Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

_____. 2010. *Perencanaan dan Desain Sistem Peserta didikan.* Jakarta: Kencana.

Santoso, Megawati dkk. 2015. *Landasan Hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Ristekdikti.

Schermerhorn, John R. 2010. *Introduction to Management*. New Jersey: John Willey & Sons. Inc.

Seifert, Kelvin. 2010. *Manajemen Peserta didik dan Instruksi Pendidikan* (*Manajemen Mutu Psikologi Pendidikan Para Pendidik)*. Jakarta: IRCiSoD.

Seligman, Marttin. E. P. 2005. *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. Terjemahan Eva Yulis. *Authentic Happiness. Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Setyaningsih, Nur. 2013. "Manajemen Kurikulum Untuk Meningkatkan Kemandirian Siswa Tunagrahita Jenjang SMKLB di SLB Tunas Kasih 2 Turi Sleman Yogyakarta". Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pada Masyarakat (LP2M). UIN Sunan Kalijaga.

Sinambela, Pardomuan N. J. M. 2013. *Kurikulum 2013, Guru, Siswa, Afektif, Psikomotorik*. Kognitif E-Journal Universitas Negeri Medan. 6.

Slameto. 2010. *Belajar & Faktor-faktor yang Memengaruhinya.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soetjipto. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2014. "Dampak Pengimplementasian Kurikulum 2013 terhadap Performa Siswa Sekolah Menengah Pertama Implementation Impact of Curriculum 2013 Junior Secondary School". dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2).

literasi nusantara

Soetopo, Hendrayat dan Wasty Soemanto. 1986. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.

_____. 1993. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soetopo, Hendrayat. 1982. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Stoll, Sharon Kay dan Jennifer M. Beller. 1998. "Can Character be Measured?". dalam *Journal of Physical Education. Recreation &* Dance, 69(1).

Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sudjana, Nana. 2005. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Sugiana, Aset. 2018. "Proses Pengembangan Organisasi Kurikulum di Indonesia". dalam *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam,* 12(1), pp. 91—103.

Sukiman. 2015. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosda Karya.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2013. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sulistyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: Teras.

Suryosubroto, Sumadi. 1990. *Tata Laksana Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2002. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta

_____. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya

Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang.1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang: IKIP Malang.

Triwiyanto, Teguh. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Peserta didikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Umiarso, Imam Ghozali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta:IRCiSoD

literasi nusantara

Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. 2013. *Landasan Pendidikan (Sebuah Pemikiran Komprehensif Landasan Pendidikan Berbasis Karakter Di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publising.

Velde, Christine. 1999. "An Alternative Conception of Competence: Implications for Vocational Education". Dalam *Journal of Vocational Education and Training*, 51(3).

Wahyu, Aprilia. 2020. "Islamika". dalam *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), pp. 208─226.

Wahyudin, Dinn. 2014. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wangid, M. N. dkk. 2014. "Kesiapan Guru SD dalam Pelaksanaan Peserta Didik Tematik-Integratif pada Kurikulum 2013 di DIY". dalam *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2).

Werquin, Patrick. 2010. "Recognising Non-Formal and Informal Learning; Outcomes". <www.oecd.org/publishing/corrige.>

Yamin, Martini. 2013. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Zais, Robert S. 1976. *Curriculum Principles and Foundation*. New York: Harper and Row Publishers.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

literasi nusantara

IKATAN ALUMNI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII
IKA-PMII

TENTANG PENULIS

Dr. Khusnul Wardan, M.Pd adalah anak keenam dari sembilan bersaudara, pasangan H. Muhammad Yusuf dan Hj. Siti Maimunah. Penulis lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 10 Mei 1976. Kemudian pada 2007, ia menikahi seorang gadis bernama Muslihati, S.P.I dan dikaruniai tiga orang putri dan satu putra bernama Najwa Ardan, Khairin Nazila Ardan, Khairina Lubna Ardan, dan Ahmad Zaky El Fata Ardan. Saat ini, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponogoro Gang Taruna VI A, No. 138, RT. 10, Singakarti, Desa Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pendidikan formalnya ia selesaikan di: SDN 033 Tenggarong Seberang (1992); MTs Al-Masyhuriah Tenggarong Seberang (1995); MA Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang (1998); S-1 STAIN Samarinda Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (2004); S-2 Jurusan Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Samarinda (2008); dan S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman (November 2018).

Sejak 2002 hingga Desember 2007, penulis aktif mengajar di MA Nahdlatul Wathan Tenggarong Seberang. Kemudian pada 2008 hingga saat ini menjadi dosen di STAIS Kutai Timur. Selain aktif mengajar, penulis juga turut mengikuti berbagai pelatihan, seperti: Workshop Analisis Kurikulum dan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa (Juni 2010) di Sangatta; Workshop Sosialisasi Akreditasi BAN-PT (Oktober 2010) di Balikpapan; Workshop Karya Ilmiah (Desember 2010) di Banjarmasin; Program Pembinaan/Pendampingan penyusunan Program Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP/SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (10—14 Agustus 2009) di Sangatta Kutai Timur; Seminar Nasional Pendidikan dalam Rangka Hari Guru (2009); Sosialisasi Program Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai

Timur (5 Desember 2009) di GOR Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta; National Roundtable Seminar "Guruku Hebat, Murid ku Luar biasa" (1 Mei 2010) di Sangatta; Seminar ESQ Bekerja dengan Hati Nurani (5 Juni 2010) di Sangatta, Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Implementasi dari Kebijakan Penerapan 4 Jam Pelajaran/Minggu dalam Forum MGMP Guru PAI (31 Juli—1 Agustus 2012) di Sangatta Kutai Timur; MGMP Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berkarakter oleh tim pengembangan kurikulum Kabupaten Kutai Timur di SMA Muara Ancalong (12—15 September 2012) di Muara Ancalong; MGMP Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA/MA dan SMK se-Kabupaten Kutai Timur (8—10 Oktober 2013) di Hotel Royal Victoria Sangatta; Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti se-Kalimantan Timur (24—26 Januari 2014) di LPMP Samarinda; Pelatihan Penilaian berdasarkan Permendiknas No. 53 2015 (Agustus 2016) di Sangatta Kutai Timur.

Penulis juga aktif terjun diberbagai kegiatan organisasi, antara lain: PC PMII cabang Samarinda (2002), HIMMAH NW Cabang Samarinda (2002), KNPI Kukar (2006—2008), KKSL (2006—2008), Dai Ramadhan BKMM (2010—2015), Pengurus Masjid Baitul MAAL Sangatta (2009—2015), Pengurus MABINCAB PMII Kutai Timur (2010—2012).

literasi nusantara

Artikel-artikel yang pernah diterbitkan adalah: 1) "Demokrasi dalam Perspektif Islam" (Jurnal Manahij Vol. II. No. 1, Mei 2009); 2) "Multi Media dalam Pengajaran" (Jurnal Manahij Vol. III. No. 2, November 2010); 3) "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi Peserta didik dan Partisipasi Komite Sekolah terhadap Kinerja Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara" (Jurnal Manahij Vol. IV. No. 1, Mei 2011); 4) "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Semangat Nasionalisme" (Jurnal ITTIHAD Volume 9 No. 16, Oktober 2011); 5) "Pentingnya Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Masyarakat bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)" (Jurnal Al-Rabwah Vol. V. No. 1, Mei 2012), 6) "Hubungan Motivasi Kerja dan Kemampuan Guru dengan Kinerja Guru SMPN Tenggarong Seberang" (Jurnal Al-Rabwah Vol. VIII. No. 2, November 2013); 7) "Lesson Studi sebagai Upaya Pembinaan Mutu Guru" (Kaltim Post 30 Juli 2018); 8) "Pembinaan Mutu Guru Melalu Program Sertifikasi dan penilain Kinerja Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur" (Jurnal Al-Rabwah Vol XII No. 2, November 2019); 9) "Peningkatan Mutu Guru Melalui Program

Pendidikan dan Latihan" (Okkutim.com, 3 Mei 2020); 10) "Teacher Training Program of the East Kutai Regency Office of Education East Borneo" (International Journal of Secondary Education, 3 Juni 2020).

Adapun buku-buku yang pernah ia tulis dan telah terbit adalah: 1) *Motivasi Kerja Guru* (Interpena Yogyakarta, 2010); 2) *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Konsep, dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Interpena Yogyakarta, 2013); 3) *Psikologi Belajar* (Interpena Yogyakarta, 2016); 4) *Bimbingan dan Konseling* (Mujahid Press Bandung, 2016); 5) *Guru sebagai Profesi* (Deepublish, 2019); 6) *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Literasi Nusantara, 2020); 7) *Motivasi Kerja Guru dalam Peserta didik* (Media Sains Indonesia, 2020).

Dr. Anik Puji Rahayu, M. Kep, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 17 April 1972. Penulis adalah anak dari Alm. Bapak Maksum Pujantoro dan Almh. Ibu Sunarsih. Suaminya seorang pegawai BUMN PT Pelabuhan Indonesia IV cabang Samarinda, Nursali, S.Sos (lahir di Kediri, 10 Juli 1971). Atas pernikahannya, dikaruniai dua orang putra, yakni Fiky Anggara (lahir di Jakarta, 4 Mei 2000) yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Telkom University dan Audrey Nabillah (lahir di Samarinda, 8 Oktober 2003) yang sedang duduk di bangku SMA Negeri 10 Samarinda kelas XII.

Adapun riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah: SDN 011 Manggar Balikpapan Timur (lulus 1985); SMP Negeri 8 Balikpapan (lulus 1988); SMA Negeri 8 Balikpapan (lulus 1991); Akademi Perawat RSUD. Abdul Wahab Sjahranie (lulus 1995); S-1 Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta (lulus 2001); S-2 Kekhususan Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia Jakarta (lulus 2007); dan S-3 Manajemen Pendidikan di Universitas Mulawarman (lulus 2018).

Sejak lulus dari pendidikan sarjana, penulis pernah bekerja sebagai: 1) perawat pelaksana di IGD RS AWS Samarinda (1995—1997); 2) perawat di RSIA Aisyiah Samarinda (1995—1997); dan 3) dosen keperawatan di Akper Pemprov Kaltim (1995—2017). Beriringan dengan pekerjaannya, penulis juga aktif di beberapa organisasi dan menjabat sebagai ketua di: 1) ILUNI Akper Pemprov Kaltim (2010—2015); 2) IPEMI Kaltim 2 Periode (2009—2020); 3) Prodi Stikes Wiyata Husada Samarinda (2007—2009); dan 4) Stikes Wiyata Husada Samarinda (2010—2014).

Kemudian saat ini: sejak 1 April 2018, penulis menjabat sebagai dosen di Prodi D-3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman; mulai 1 Februari 2020, memegang Jabatan Fungsional Dosen Lektor (300); menjabat sebagai sekretaris Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2019—2023; dan mulai 1 Maret 2020 hingga sekarang, menduduki kursi sebagai sekretaris Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan LP3M Universitas Mulawarman.

literasi nusantara

UNIVERSITAS
MULAWARMAN

MANAJEMEN KURIKULUM

MANAJEMEN KURIKULUM mengupayakan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Secara umum, tahapan pelaksanaan manajemen kurikulum dimulai dari proses perencanaan; pengorganisasian yakni pengaturan bahan pelajaran; implementasi rencana yang telah disusun; dan evaluasi yakni proses penilaian dan penentuan tindakan selanjutnya.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan Indonesia diwujudkan melalui program "Merdeka Belajar" dan "Kampus Meredeka". Kebijakan dibentuk dengan alasan bahwa siswa-siswi kita berhak belajar di mana dan kapan saja agar mereka dapat menggali ilmu lebih mendalam dari berbagai sumber dan tidak hanya bergantung pada sekolah serta memperoleh pengalaman kerja saat di bangku kuliah melalui program "magang" agar lebih matang dan siap saat akan memasuki dunia kerja. Selain itu, untuk menyetarakan sistem pendidikan di Indonesia, pemerintah membuat standar bernama "Kerangka Kualifikasi Nasional" agar kualifikasi ketenagakerjaan para alumni mudah diakui negara lain saat akan terjun ke dunia kerja.

Berbagai konsep dan persoalan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum dikemas dalam bab-bab berikut: 1) konsep manajemen kurikulum; 2) sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia; 3) ruang lingkup manajemen kurikulum lembaga pendidikan; 4) implementasi kurikulum 2013; 5) tahapan manajemen kurikulum; 6) analisis dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan satuan pendidikan; 7) evaluasi manajemen kurikulum; 8) tugas pokok dan fungsi manajer beserta jajarannya; 9) inovasi dalam implementasi manajemen kurikulum; 10) peranan dan implementasi TI; 11) model dan organisasi pengembangan kurikulum; 12) kerangka KKN Indonesia; dan 13) kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar.

literasi nusantara
literasi nusantara
Perum Paradiso Kav A1 Junrejo - Batu
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.com
0812-3602-3633

Manajemen Pendidikan U+17
ISBN 978-623-329-122-4
9 786233 291224
Harga P.Jawa Rp105.000,-